

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERAN PENDAMPING MASYARAKAT PADA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
DI KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

TIMBUL SIBARANI

NIM. 500025182

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**

Role of Community Assistance at the
National Program of Community Empowerment (PNPM) Mandiri Perdesaan
in Bulungan District North Kalimantan Province

Timbul Sibarani
timbul.sibarani@yahoo.com

Abstract

Community-based development approach is one alternative development taken by the government which wanted the community to be independent in fulfilling his life. Program - a community empowerment program lately including PNPM Mandiri program is considered the most successful in the context of poverty reduction in Indonesia, including in Bulungan although there are cons of it, one of the program 's success is inseparable from the role of community care . Placed Companion Program PNPM Rural does not mean implementation of the event to run smoothly , but there are also many barriers or obstacles, both because of the quality of human resources are limited which resulted contained a number of irregularities , including in the realm of criminal offenses or because of other factors .

The purpose of this study is to analyze the role of community assistance, inhibiting factors and effort by the community assistance of PNPM Mandiri Perdesaan in Bulungan District North Kalimantan Province.

The analytical method is used descriptive analysis method that is explored to 9 informants as the subjects of PNPM Mandiri Perdesaan in 2014 Fiscal Year. There are 28 indicators of role of the community assistance to implement PNPM Mandiri Perdesaan based on the guidance from Ministry of Internal Affairs. Afterward the indicators are simplified into five parts of the role of community assistance those are consists of motivation, the increasing of awareness and capability training, self management, resource mobilization, and construction and development of the network to know how big the role of community assistance by comparing the value of the achievement against the targets of achievement by the role of community assistance.

Based on the results of the analysis of the role of community care in the National Program for Community Empowerment in Rural Areas (PNPM Rural) in Bulungan, the role of chaperone considered very important role. Implementation of PNPM Rural in Bulungan runs accordingly. The inhibiting factors of the role of community assistance is the lackness from the most of society to maximize the potential, indication to enrich themselves which is resulted in a criminal offense, late to execute a job due too accommodate the various business, whereas efforts that have been done by the community assistance include coordinate of relevant stakeholder, to educate and to convince public about the importance of the benefits implementation of the program, facilitating program in order to appropriate the determined plan.

Keyword : The role of community care, community empowerment, PNPM Mandiri Perdesaan

Peran Pendamping Masyarakat Pada Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM Mandiri Perdesaan)
di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Timbul Sibarani
timbul.sibarani@yahoo.com

Abstrak

Pendekatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pembangunan alternatif yang ditempuh pemerintah yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi hidupnya. Program – program pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini termasuk program PNPM Mandiri Perdesaan dinilai paling sukses dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia termasuk di Kabupaten Bulungan meskipun ada yang kontra akan hal tersebut, salah satu keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari peran pendamping masyarakat. Ditematkannya Pendamping Program PNPM Mandiri Perdesaan bukan berarti pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan mulus dan lancar, namun juga terdapat berbagai hambatan atau kendala, baik karena faktor kualitas SDM yang terbatas yang mengakibatkan adanya terdapat berbagai penyimpangan, termasuk dalam ranah tindak pidana maupun karena faktor yang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pendamping masyarakat, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan pendampingan masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang dieksplor terhadap 9 informan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014. Terdapat 28 indikator peran pendamping masyarakat untuk melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan pedoman Kementerian Dalam Negeri. Kemudian indikator tersebut disederhanakan menjadi lima unsur peran pendamping masyarakat terdiri atas motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri, mobilisasi sumber, dan pembangunan dan pengembangan jaringan untuk dapat diketahui seberapa peran pendamping masyarakat dengan cara membandingkan nilai capaian terhadap target capaian peran pendampingan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis peran pendamping masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Bulungan, maka peran pendamping dinilai sangat berperan. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan berjalan sesuai ketentuan. Adapun faktor-faktor penghambat peran pendamping masyarakat adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang ada, adanya indikasi untuk memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan tindak pidana, lambatnya mengeksekusi pekerjaan akibat terlalu mengkomodir berbagai kepentingan, sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan pendampingan masyarakat diantaranya adalah melakukan koordinasi terhadap pihak terkait, mengedukasi dan meyakinkan masyarakat arti penting manfaat dari pelaksanaan program, memfasilitasi program agar berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

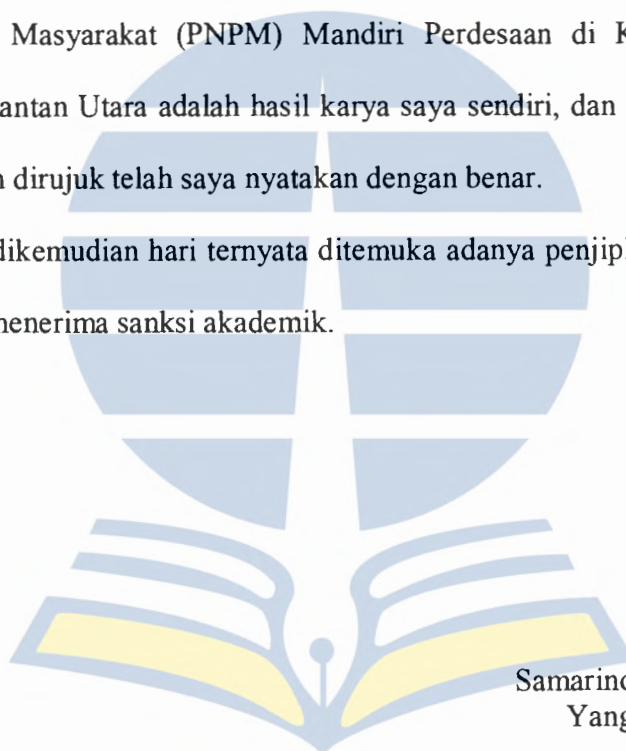
Kata Kunci : Peran Pendamping Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, PNPM Mandiri Perdesaan.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Peran Pendamping Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.



Samarinda, 4 Desember 2015
Yang Menyatakan,

TIMBUL SIBARANI
NIM. 500025182

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa:

Nama/NIM : Timbul Sibarani/500025182

Judul TAPM : Peran Pendamping Masyarakat Dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang
bersangkutan sudah/baru selesai sekitar 90% sehingga dinyatakan sudah layak
uji/belum layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Jakarta, 19 November 2015

Pembimbing II,

Pembimbing I,

SUDIRAH, M.Si., Dr
NIP.

DARMANTO, M.Ed.,Dr
NIP.

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Timbul Sibarani
 NIM : 500025182
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Peran Pendamping Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : 4 Desember 2015

W a k t u : 10.45 wita

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Drs. Yusrizal Rachman, M.K.K.K

Tandatangan

.....

Penguji Ahli

Nama : Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D

.....

Pembimbing I

Nama : Dr. DARMANTO, M.Ed.

.....

Pembimbing II

Nama : Dr. SUDIRAH, M.Si.

.....

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Peran Pendamping Masyarakat Pada Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di
Kabupaten Bulungan

Penyusun TAPM : Timbul Sibarani

NIP : 500025182

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal :

Menyetujui:

Pembimbing II,

Pembimbing I,




Dr. Sudirah, M.Si.
NIP.

Dr. Darmanto, M. Ed.
NIP. 19591027 198603 1 003

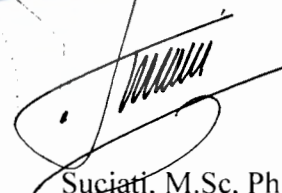
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Magister Administrasi Publik,

Direktur
Program Pascasarjana,



Dr. Darmanto, M. Ed.,
NIP. 19591027 198603 1 003

Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan puja Syukur Saya panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat Rahmat, Lindungan dan Bimbingan-Nya TAPM ini dapat disusun.

Penelitian dengan judul Peran Pendamping Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara ini selain ditujukan sebagai syarat untuk mencapai derajat sarjana S-2 juga bertujuan untuk mengetahui peran pendamping masyarakat di Kabupaten Bulungan, mengetahui faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di perdesaan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Pencapaian tujuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar acuan untuk mengambil kebijakan terutama dalam aspek pelaksanaan pendampingan masyarakat sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi setiap program pemberdayaan masyarakat. Dengan hal tersebut diharapkan program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik dan tujuan kegiatan dapat dicapai dimasa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian TAPM ini, khususnya kepada ;

1. Gubernur Kalimantan Utara yang memberi ijin belajar untuk mengikuti pendidikan pascasarja pada Universitas Terbuka.
2. Direkur Universitas Terbuka Indonesia yang memberi kesempatan kepada penulis menempuh pendidikan Pascasarjana di Universitas Terbuka.
3. Bapak Darmanto, M.Ed., DR sebagai Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka dan sebagai Pembimbing I dalam penulisan TAPM ini.
4. Bapak Sudirah, M.Si.,DR sebagai Pembimbing II.
5. Kepala Bappeda Provinsi Kaltara yang memberikan ijin mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka.
6. Mamaku terkasih dan istri tercinta, serta anakku Ruth Githa Uliartha Sibarani yang selalu memberikan do'a semangat, dorongan dan dukungan dalam segala hal.
7. Rekan kerja; Syamsaimun, Berlin Palabuan, Nurwahidah untuk dukungan data dan diskusinya.
8. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyelesaian penelitian dan penulisan TAPM ini. Penulis sungguh menyadari bahwa isi dan makna dari TAPM ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik demi perbaikan dan pengembangan TAPM ini sangat diharapkan.

Semoga TAPM ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Tanjung Selor, 04 Desember 2015
Penulis,

Nama : Timbul Sibarani
 NIP : 500025182
 Program Studi : Administrasi Publik
 Tempat / Tanggal Lahir : Lumban Sibinbin, 20 April 1972
 Riwayat Pendidikan :

1. Lulus SD di Nagatimbul pada tahun 1985
2. Lulus SMP di Lumban Lobu pada Tahun 1988
3. Lulus SMA di Pardinggaran pada Tahun 1991
4. Lulus STPDN di Jatinangor pada tahun 95
5. Lulus IIP di Jakarta pada tahun 2000

Riwayat Pekerjaan :

1. Tahun 1995 s/d 2000 sbg staf di BPMD
2. Tahun 2001 s/d 2003 sbg Sekcam di Peso
3. Tahun 2003 s/d 2007 sbg Sekcam di Peso Hilir
4. Tahun 2007 s/d 2013 sbg Kasubbid di Bappeda
5. Tahun 2013 s/d skrg sbg Kabid di Bappeda

Tanjung Selor, 4 Desember 2015

TIMBUL SIBARANI
 NIM. 500025182

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	16
1. Konsep <i>Community Development</i>	16
2. Pendampingan Masyarakat.....	25
3. Pemberdayaan Masyarakat	34
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Pikir.....	43
D. Operasionalisasi Variabel	45
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	49
1. Lokasi Penelitian.....	49
2. Fokus Penelitian.....	49
B. Informan Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	51

D. Prosedur Pengumpulan Data.....	51
E. Metode Analisa Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Deskripsi Objek Penelitian	54
1. Kondisi Geografis	54
2. Kondisi Demografi.....	56
3. Kondisi Pendidikan	62
4. Kondisi Kesehatan	65
5. Administrasi Wilayah	68
6. Penanggulangan Kemiskinan.....	69
7. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Kalimantan Utara.....	72
a). Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan	72
b). Pendamping Masyarakat	75
8. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan	76
a). Alokasi BLM dan UPK	76
b). Lokasi dan Usulan Kegiatan BLM PNPM Mandiri Perdesaan	79
c). Realisasi BLM	80
d). Realisasi DOK BLM PNPM Mandiri Perdesaan	82
e). Realisasi SPP dan UEP	87
f). UPK	88
g). Pendamping Masyarakat	89

B. Hasil dan Pembahasan	91
1. Analisis Pentingnya Peran Pendamping pada Program	
PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan	91
a). Motivasi	92
b). Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan	97
c). Manajemen diri	104
d). Mobilisasi Sumber	115
e). Pembangunan dan Pengembangan Jaringan	121
2. Permasalahan dan Hambatan	137
a) Peran Pendamping Dalam Menangani Masalah PNPM	
Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan	137
1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Daerah (KPM-D).....	137
2. Pendamping Lokal	137
3. Fasilitator Kecamatan (FK)	138
4. Fasilitator Kabupaten (Faskab).....	138
5. KM Provinsi	139
6. Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah (SP2M) di	
Tingkat Provinsi	140
7. Spesialis Penanganan dan Pengaduan Masalah di Tingkat	
Pusat.....	141
3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Mengatasi Permasalahan	
PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan	144

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	149
A. KESIMPULAN	149
B. SARAN.....	150



DAFTAR TABEL

1.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia	2
1.2	Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kanupaten Bulungan Menurut Kecamatan Tahun 2005-2011	9
1.3	Daftar Tenaga Pendamping Masyarakat di Kab. Bulungan	11
2.1	Penelitian Terdahulu	40
2.2	Indikator Peran Pendamping Masyarakat	44
3.1	Menunjukkan Informan Penelitian	50
4.1	Persebaran Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2013	58
4.5	Jumlah Anak Sekolah Menurut Kelompok Usia	63
4.6	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Berdasar Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bulungan Tahun 2011 - 2012	64
4.7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara.....	66
4.8	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bulungan Tahun 2009-2012	67
4.9	Daftar Nama dan Kode Wilayah Administrasi di Kabupaten Bulungan ..	68
4.10	Data Posisi, Kuota, Realisasi dan Proses Rekrutmen Pendamping Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Kalimantan Utara.....	76
4.11	Data Pengurus UPK dan Alokasi BLM PNM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan	78
4.12	Lokasi, Usulan Kegiatan, Alokasi Dana dan Pemanfaatan BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Bulungan	80

4.13	Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Reguler TA.2014 Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan	81
4.14	Realisasi Penyaluran BLM PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2014 menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan	82
4.15	Realisasi Pencairan dan Penyaluran DOK Reguler PNPM Mandiri Perdesaan TA.2014 menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan.....	83
4.16	Realisasi Pencairan dan Penyaluran Dana Operasional Kegiatan (DOK) Integrasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan	85
4.17	Realisasi Triwulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Bulungan.....	87
4.18	Realisasi Pertumbuhan SPP dan UEP PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Bulungan.....	88
4.19	Data Pendampingan Masyarakat di Kabupaten Bulungan.....	90
4.22	Peran Pendamping Masyarakat untuk Unsur Motivasi.....	97
4.23	Peran Pendampingan Masyarakat Indikator Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan	103
4.24	Peran Pendampingan Masyarakat Untuk Unsur Manajemen Diri.....	115
4.25	Peran Pendamping Masyarakat untuk Unsur Manajemen Sumber.....	120
4.26	Peran Pendampingan Masyarakat dengan Indikator Pembangunan dan Pengembangan Jaringan.....	125
4.27	Peran Pendampingan Masyarakat untuk Unsur Motivasi	127

4.28 Peran Pendamping Masyarakat untuk Unsur Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan	130
4.29 Peran Pendamping Masyarakat untuk Unsur Manajemen diri	132
4.30 Peran Pendamping Masyarakat untuk Unsur Manajemen Sumber.....	134
4.31 Peran Pendampingan Masyarakat untuk Unsur Pembangunan dan Pengembangan Jaringan	136
4.32 Analisis Peran Pendampingan Masyarakat.....	136



DAFTAR GAMBAR

4.1	Peta Administratif Kabupaten Bulungan	55
-----	---	----



DAFTAR GRAFIK

4.1	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bulungan Tahun 2012	57
4.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan 2007-2012	59
4.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2012	60
4.4	Pekerjaan Penduduk Kabupaten Bulungan	61
4.5	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bulungan	65
4.8	Perbandingan Luas Kecamatan di Kabupaten Bulungan	69
4.9	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2013	70
4.10	Komposisi Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan dengan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulungan Tahun 2002-2013	71
4.11	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2013	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat telah tercantum tujuan Negara Republik Indonesia diantaranya melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dengan berbagai upaya melaksanakan pembangunan diberbagai bidang dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya inti dari pembangunan sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Jika kita melihat dari setiap masa pemerintahan, baik pada masa orde lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, Masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto sampai masa Pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono hingga saat ini, program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak pernah berhenti dilaksanakan. Namun demikian diakui atau tidak berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan masanya masing-masing tidak pernah bisa menghapus kemiskinan dan kesenjangan yang ada di Republik ini. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah nyata ada namun kelihatannya upaya-upaya penanggulangan kemiskinan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang dapat dikatakan memuaskan. Hal ini dapat kita lihat dari tingginya angka kemiskinan nasional dari waktu ke waktu. Berdasarkan Data BPS

pada Maret 2015 angka kemiskinan nasional berada pada kisaran 11,22 % dari jumlah penduduk Indonesia. Tabel 1.1. menunjukkan perkembangan penduduk miskin secara nasional tahun 2010-2015.

Tabel. 1.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia
2010-2015

No.	Tahun	Jlh Penduduk Miskin (jt)	Persentase (%)	Ket.
1.	2010	31,02	13,33	Sept 2010
2.	2011	30,02	12,49	Sept 2011
3.	2012	28,60	11,66	Sept 2012
4.	2013	28,55	11,47	Sept 2013
5.	2014	27,73	10,96	Sept 2014
6.	2015	28,59	11,22	Maret 2015

Sumber : TNP2K 2015 (diolah)

Tingginya jumlah penduduk miskin sebagaimana pada Tabel 1.1 tersebut diatas, bukan berarti pemerintah selama ini berpangku tangan, namun berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin dengan berbagai Program yang sifatnya secara nasional.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang ditempuh pemerintah yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi hidupnya. *Empowerment* (pemberdayaan) berasal dari Bahasa Inggris, dimana power diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Robert Dahl (1973), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitas. Sedangkan menurut Korten (1992)

pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal.

Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat yang paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah *inner resources approach*. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi *concern* akan pemenuhan dan pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki (Ross 1987).

Sebagaimana kita ketahui, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manifestasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.

Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri - 1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum - 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.

Belajar dari berbagai pengalaman dari masa-masa pemerintahan sebelumnya dalam pengentasan kemiskinan serta bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono-Boediono mentargetkan angka kemiskinan mencapai 8-10 % pada akhir tahun 2014 atau pada masa berakhirnya masa kepemimpinannya. Dalam rangka mencapai target tersebut pemerintah sejak tahun 2007 yang lalu melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan dalam tiga klaster yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, program kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan berbasis mikro dan kecil.

Program Kemiskinan berbasis keluarga yaitu melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras miskin, Jamkesmas dan lain-lain, dan program berbasis pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-Mandiri Perdesaan, PNPM-Mandiri Perkotaan, PISEW, Perikanan dan lain-lain serta program

kemiskinan berbasis mikro dan kecil seperti KUR, UMKM, dan lain sebagainya termasuk program penanggulangan kemiskinan lainnya yang memberikan rumah murah, rumah layak huni, perbaikan sanitasi, air bersih, listrik gratis.

Dalam hal program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan, perhatian khusus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang langsung memperluas akses pada sumber daya pembangunan dan penciptaan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat dilapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan harapan diletakkannya masyarakat sebagai objek dan sekaligus subyek pembangunan berbanding lurus dengan perbaikan kesejahteraan. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat didesain sedemikian rupa disamping penguatan individu masyarakat juga menanamkan budaya kerja keras, hemat, keterbukaan, mempunyai rasa kepedulian, dan sikap bertanggungjawab.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor.10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menetapkan 3 (tiga) kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagai instrument percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang termasuk dalam Klaster 2 terdiri atas 17 program penanggulangan kemiskinan dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga.

Setiap Program pemberdayaan masyarakat sebelumnya dan hinggasaat ini memiliki kesamaan tujuan, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan dalam sebuah siklus kegiatan.

Tahap-tahapan tersebut adalah:

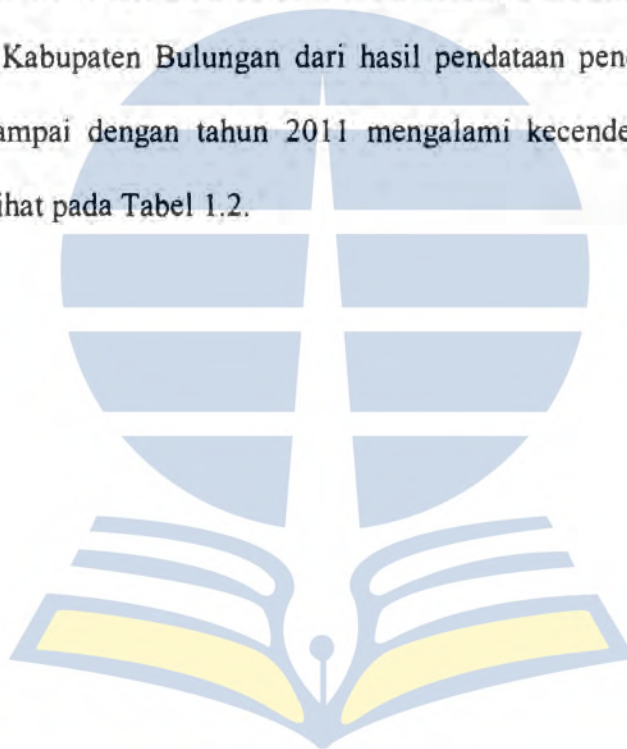
1. **Diseminasi Informasi dan Sosialisasi.** Tahapan ini dilakukan dalam beberapa cara: lokakarya di berbagai level pemerintahan, *hearing* anggota legislatif di berbagai jenjang, dan forum-forum musyawarah masyarakat. Setiap desa dilengkapi Papan Informasi sebagai salah satu media (penyebaran) informasi. Membuka kerjasama dengan berbagai pihak (media massa, *NGO*, akademisi, anggota dewan).
2. **Proses Perencanaan Partisipatif.** Dilaksanakan mulai dari tingkat dusun, desa dan kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa (FD) untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. FD mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk membahas kebutuhan dan prioritas usulan desa. Dengan difasilitasi FD, masyarakat desa bermusyawarah menentukan jenis kegiatan yang akan diusulkan mewakili desa. Program menyediakan tenaga konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. **Seleksi Proyek di Tingkat Desa dan Kecamatan.** Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan antardesa (kecamatan) untuk memutuskan usulan prioritas dan layak didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antardesa terdiri dari wakil-wakil dari desa. Pilihan proyek adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan.

4. Masyarakat Melaksanakan Proyek. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa-desa yang terdani. Fasilitator Teknis program akan mendampingi TPK dalam mendisain prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja umumnya berasal dari desa penerima manfaat.
5. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan terbuka di desa, yakni sebelum proyek mencairkan dana tahap berikutnya. Pada pertemuan akhir, TPK akan melakukan serah terima proyek kepada masyarakat, desa, dan Tim Pemelihara kegiatan.

Perencanaan pembangunan melalui tahapan-tahapan tersebut sebenarnya mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan yang secara reguler telah diatur dengan peraturan pemerintah, namun selama ini perencanaan sebagaimana dimaksud UU Nomor 25 Tahun 2004 hanya sebatas serimonial atau formalitas belaka. Pada program penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat rohnya Undang-undang tersebut benar-benar diterapkan dari mulai tingkat dusun hingga desa dan kecamatan yang melibatkan peran aktif masyarakat termasuk kaum yang termarjinalkan.

Program – program Pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini termasuk program PNPM Mandiri Perdesaan dinilai paling sukses dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia meskipun ada yang kontra akan hal tersebut, namun dari penyampaian masyarakat diberbagai tempat di Indonesia termasuk masyarakat miskin di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara,

mengharapkan program dimaksud layak untuk ditindaklanjuti sekalipun pemerintahan silih berganti. Hal ini dapat dipahami dengan melihat angka kemiskinan di Kabupaten Bulungan dari 7 (tujuh) tahun terakhir kecenderungannya turun cukup signifikan. Itu berarti program pemberdayaan dapat dikatakan membawa dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan. Bila kita melihat angka kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 11.691 KK atau 49.324 jiwa maka pada tahun 2011 (data PPLS) menjadi 4.184 KK atau 20.289. Data keluarga miskin pada 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Bulungan dari hasil pendataan penduduk miskin pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 mengalami kecenderungan penurunan, yang dapat dilihat pada Tabel 1.2.



Tabel 1.2
Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bulungan
Menurut Kecamatan Tahun 2005-2011

Kecamatan	2005			2008			2011		
	KK Miskin	Jlh Jiwa	%	KK Miskin	Jlh Jiwa	%	KK Miskin	Jlh Jiwa	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	
1. Peso	440	1.934		314	1.520		198	1.006	
2. Peso Hilir	614	2.678		704	3.012		435	2.144	
3. Tanjung Palas	1.428	6.312		1.109	4.801		562	2.855	
4. Tg. Palas Barat	1.165	4.695		681	2.561		262	1.231	
5. Tg. Palas Utara	1.496	5.772		674	2.499		312	1.421	
6. Tg. Palas Timur	1.012	4.323		724	2.936		440	2.056	
7. Tanjung Selor	2.844	12.232		2.091	8.997		897	4.550	
8. Tg. Palas Tengah	920	3.787		753	2.953		421	2.051	
9. Sekatak	1.321	5.617		800	3.384		491	2.180	
10. Bunyu	451	1.974		277	1.028		166	795	
J u m l a h	11.691	49.324		8.127	33.691		4.184	20.289	

Sumber : BPS, Bulungan Dalam Angka 2013

Jika kita setidaknya mengakui akan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah saat ini, ada hal yang perlu mendapat perhatian besar bagi pemerintah tentang keberhasilan program dimaksud. Apa yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan sistem dan aturan yang telah ditetapkan perlu dikaji atau diteliti. Dalam setiap program nasional pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah selalu menyertakan pendampingan program. Namun demikian untuk sekedar diingat bahwa metode pendampingan masyarakat bukanlah hal baru. Pemerintah pernah melaksanakan hal yang sama melalui program Sarjana Masuk Desa diantaranya ada BUTSI, SP3 (Depdikbud), SP2W (Bappenas), TKPMP (Tenaga Kerja Penggerak Masyarakat

Perdesaan-Depnaker), FK (PNPM-Depdagri). Pendamping atau fasilitator tersebut direkrut dan didistribusikan pemerintah ke daerah khusus untuk mengawal program dimaksud. Pendamping masyarakat atau disebut fasilitator adalah mereka tenaga-tenaga profesional yang terdidik dan terlatih untuk mendampingi masyarakat diberikan mulai dari tingkat Desa yang disebut Fasilitator Desa (FD), di tingkat Kecamatan disebut Fasilitator Kecamatan (FK) yang terdiri dari Fasilitator teknik dan Keuangan, ditingkat Kabupaten terdapat Fasilitator Kabupaten (Faskab), terdiri dari Fasilitator Teknik, Keuangan dan Pemberdayaan, ditingkat Provinsi terdapat Tenaga spesialis (Koordinator Provinsi) yang terdiri dari beberapa orang, hingga kelembagaan pada tingkat Pusat.

Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang terakhir yaitu PNPM-Mandiri Perdesaan pada tahun 2014 di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara di sembilan kecamatan dari sepuluh kecamatan lokasi PNPM-Mandiri Perdesaan, keberadaan fasilitator saat itu sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri dari Fasilitator Kabupaten (Faskab) 1 (satu) orang, Fasilitator Teknik Kabupaten 1 (satu) orang, Fasilitator Kecamatan 9 (sembilan) orang, Fasilitator Teknik kecamatan 8 (enam) orang. Berikut tenaga pendamping PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan berdasarkan penempatan, posisi, dan kategori lokasi penempatan sebagaimana pada tabel 1.3

Tabel. 1.3
Daftar Tenaga Pendamping Masyarakat di Kabupaten Bulungan Tahun 2014

No	N a m a	Posisi	Kecamatan	Kategori Lokasi
1	Sjuhaily Kasim, ST	FTK	Tanjung Selor (Kab.)	Sangat sulit
2	Aniros, S.Sos	FKK	Tanjung Selor	Sangat sulit
3	Fauzan Eka Putra, ST	FTK	Peso Hilir	Sangat sulit
4	Esrawati, A.Md	FTK	Tanjung Selor	Sangat sulit
5	Iva Mary Gutriani, SE	FPK	Tanjung Palas Utara	Sangat sulit
6	Muhammad Riduan, SE	FPK	Tanjung Palas Timur	Sangat sulit
7	Hendrik Sonda Turan, S.Pd	FPK	Peso	Ekstrim
8	Deidi Isman, ST	FTK	Tanjung Palas Barat	Ekstrim
9	Suparlan, S.E,M.B.A	FPK	Tanjung Palas Tengah	Sangat sulit
10	Elisabeth Rara Layuk P, ST	FTK	Tanjung Palas	Sangat sulit
11	Yunarto Rombbunga, ST	FTK	Tanjung Palas Timur	Sangat sulit
12	Zahir, SE	FPK	Peso	Ekstrim
13	Pither Sapan Sarimandi, ST	FTK	Tanjung Palas Utara	Sangat sulit
14	Didik Purwanto, A.Md	FPK	Tanjung Palas	Sangat sulit
15	Novel, S.Pd	FPK	Peso Hilir	Sangat sulit
16	Mutanto Eka Saputro, ST	FTK	Tanjung Palas Tengah	Sangat sulit
17	Mursyid, ST	FTK	Sekatak	Ekstrim
18	Halimah, S.Pd	FPK	Tanjung Selor	Sangat sulit

Sumber: data primer yang diolah, 2015

Berakhirnya program PNPM-MP yang didanai melalui K/L bukan berarti program pemberdayaan masyarakat dan pendampingannya berakhir pula. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa justru memberi kewenangan yang semakin luas kepada Pemerintah Desa mengelola pembangunan di desa dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar, termasuk di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, bagaimana pengelolaan keuangan desa. Pemerintahpun berjanji menyiapkan pendamping masyarakat sebagaimana program sebelumnya.

Pada kenyataannya pendamping masyarakat yang sering kita dengar dengan sebutan fasilitator yang akan direkrutpun tidak sesuai dengan waktu telah

ditetapkan, sehingga mekanisme perencanaan dan pelaksanaan menjadi terlambat. Ironisnya, di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dari penyampaian Penjabat yang membidangi Pemerintahan Desa kebanyakan Pemerintah Desa di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dan tidak berani menggunakan Dana Desa jika Pendamping/Fasilitator yang disiapkan pemerintah belum berada di lokasi pendampingan. Mereka tidak mau berurusan dengan hukum akibat ketidaktahuan pemanfaatan alokasi dana yang mengakibatkan penyimpangan dana. Hal ini dapat dipahami karena selama ini meskipun pemerintah sudah menempatkan pendamping, bukan berarti semuanya dapat berjalan lancar. Dari 28 indikator peran pendamping pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) yang harus dicapai ternyata masih banyak capaian yang perlu mendapat perhatian khusus di Kabupaten Bulungan, misalnya banyaknya kegiatan yang sudah ditetapkan di masing-masing kecamatan belum dapat diselesaikan. Banyaknya dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya serta tingkat pengembalian yang tidak memenuhi target menjadi persoalan. Hal lain adalah terdapat masalah yang berkaitan dengan persoalan hukum yaitu sejak 2007 hingga 2014 di Kabupaten Bulungan terdapat 8 permasalahan yang masuk dalam matrik nasional, 95 masalah telah selesai dan hingga Desember 2014 masih ada 4 masalah yang dalam proses penyelesaian. (Sumber : Laporan PNPM Mandiri Perdesaan Prov. Kalimantan Utara, 2015).

Banyaknya kelembagaan yang dibentuk untuk meluncurkan program PNPM Mandiri Perdesaan mulai tingkat pemerintah pusat sampai tingkat

pemerintah desa dan pendampingan yang sangat baik dan terstruktur, menjadikan masyarakat di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara menjadi sangat tergantung dengan pendamping atau fasilitator yang melaksanakan perannya, dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemeliharaan serta pelestarian pembangunan yang dilaksanakan masyarakat itu sendiri. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sampai saat ini adalah melaksanakan pendampingan oleh Fasilitator. Mengingat pendampingan oleh fasilitator memungkinkan masyarakat mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri mereka, maupun mengakses sumber-sumber kemasyarakatan yang berada disekitarnya. Pendamping juga membantu membangun dan memperkuat jaringan dan hubungan antara komunitas setempat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih luas. Para pendamping masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan bagaimana bekerja dengan individu-individu dalam konteks masyarakat lokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi masyarakat dalam lembaga-lembaga sosial yang lebih luas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peran pendamping masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat peran pendamping masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara?

3. Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan peran pendamping masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara deskriptif peran pendamping masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat peran pendamping masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Untuk menganalisis upaya meningkatkan peran pendamping masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan dalam peningkatan peran pendamping terhadap program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah terhadap peran pendamping dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

Konsep *community development* banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Einsiedel (dikutip dalam Suharto, 1997: 98) mendefinisikan pembangunan masyarakat merupakan suatu '*proses*' dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

Community development yang dimaknai sebagai pengembangan masyarakat terdiri dari dua konsep, yaitu 'pengembangan' dan 'masyarakat'. Secara singkat, 'pengembangan atau pembangunan' merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada umumnya. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi berbagai sektor kehidupan, yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Sedangkan pengertian 'masyarakat' menurut pandangan Mayo (1998: 162) dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu :

1. Masyarakat sebagai sebuah 'tempat bersama', yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.

2. Masyarakat sebagai 'kepentingan bersama', yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Pemberdayaan masyarakat yang berbasis masyarakat seringkali diartikan dengan pelayanan sosial gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respons terhadap melebarnya kesenjangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan (*empowerment*) yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruh terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (AMA, 1993: 71).

Pemberdayaan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemberdayaan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam bentuk (a) proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya; atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan

kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab (Payne, 1995: 165).

Melengkapi definisi di atas, Dunham seorang pakar *community development* (dalam Suharto, 1997: 99) merumuskan *community development* adalah usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan dari organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat, akan tetapi biasanya dengan bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela. Rumusan *community development* yang dikemukakan Dunham tersebut jika dicermati secara seksama ternyata lebih berorientasi dengan pembangunan masyarakat desa sebagai basis dari pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah dalam berbagai aspek itu. Lebih lanjut Dunham mengemukakan 4 (empat) unsur-unsur *community development* sebagai berikut :

1. *A plan program with a focus on the total needs of the village community* (suatu program rencana dengan suatu fokus pada total kebutuhan masyarakat desa/kampung).
2. *Technical assistance* (bantuan teknis)
3. *integrating various specialities for the help of the community* (pengintegrasian berbagai kekhususan untuk bantuan masyarakat)
4. *A major emphasis upon self-help and participation by the residents of the community* (suatu penekanan utama atas bantuan diri dan partisipasi masyarakat).

Berdasarkan pandangan-pandangan tentang *community development* yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Community development* merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Artinya kegiatan itu dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi '*follow-up activity and evaluation*'.
2. *Community development* bertujuan memperbaiki '*to improve*' kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
3. *Community development* memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan.
4. *Community development* memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama '*group action*' di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.

Community development secara esensial merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komunitas-komunitas lokal. Artinya perusahaan adalah sebuah elemen dan serangkaian elemen hidup yang berlaku di masyarakat. Sebagai salah satu elemen berarti perusahaan masuk dalam struktur masyarakat sosial setempat dan berfungsi terhadap elemen lainnya. Dengan kesadarannya

perusahaan-perusahaan harus dapat membawa komunitas-komunitas lokal bergerak menuju kemandiriannya tanpa merusak tatanan sosial budaya yang ada. (Rudito, 2003:17). Dengan kata lain masyarakat terdiri dari komunitas lokal, komunitas pendatang dan komunitas perusahaan, yang kesemua komunitas itu saling mempengaruhi, berinteraksi dan beradaptasi sebagai anggota masyarakat.

Implementasi lebih lanjut berarti adanya kesetaraan, saling menghargai dalam sosial budaya yang beragam atau multikultural. Kesetaraan sebagai suatu kesatuan komunitas, saling menghargai dan mengakui adanya perbedaan yang berarti tidak adanya usaha untuk mendominasi antar masing-masing *stakeholder* yang di dalamnya terkandung pengutamaan hak azasi manusia. (Rudito, 2003:23). Secara umum *community development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. (Budimanta, 2003: 27)

Pemberdayaan masyarakat (*community development*) bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan ‘mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri’ atau ‘membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri’. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang

kosmopolitan. Lebih lanjut *United Nations* (1996: 83-92) mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. *Getting to know the local community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

2. *Gathering knowledge about the local community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

3. *Identifying the local leaders*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor '*the local leaders*' harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

4. *Stimulating the community to realize that it has problems*

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

5. *Helping people to discuss their problem*

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

6. *Helping people to identify their most pressing problems*

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

7. *Fostering self-confidence*

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

8. *Deciding on a program action*

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggi yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

9. *Recognition of strengths and resources*

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

10. *Helping people to continue to work on solving their problems*

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

11. *Increasing peoples ability for self-help*

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Mencermati proses-proses pemberdayaan masyarakat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa program *community development* sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat lokal melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, termasuk salah satunya pendidikan keterampilan yang diberikan secara terpadu dan berkesinambungan. Sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat ini, berdasarkan perspektif Twelvetrees (1991: 1) yang membagi perspektif pemberdayaan masyarakat ke dalam dua bingkai yaitu pendekatan profesional dan pendekatan radikal, maka dapat diklasifikasikan enam model pemberdayaan sesuai dengan gugus profesional dan radikal (Mayo, 1998: 169) :

1. Perawatan masyarakat merupakan kegiatan volunteer yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuan utama adalah mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan.
2. Pengorganisasian masyarakat memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial.

3. Pembangunan masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
4. Aksi masyarakat berdasarkan kelas bertujuan untuk membangkitkan kelompok lemah secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung dan konfrontasi.
5. Aksi masyarakat berdasarkan gender bertujuan untuk mengubah relasi-relasi sosial kapitalis-patrikal antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anak-anak.
6. Aksi masyarakat berdasarkan ras (warna kulit) merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi rasial.

Program *community development* dimaknai sebagai konsep pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah untuk memandirikan masyarakat di tengah kegiatan pembangunan.

2. Pengertian Peran

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup 3 (tiga) hal:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Pengertian peranan (dalam KBBI, 1998) adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia terbitan tahun 2002, adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peranan menurut Enslikopedia ilmu-ilmu sosial adalah perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu.

Sedangkan Grass Massan dan A.W Eachern sebagaimana dikutip oleh David Barry mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

3. Pendampingan Masyarakat

Penguatan modal sosial dapat dilakukan melalui pendidikan agama, sosialisasi keluarga, teladan pemimpin, pemeliharaan dan pengembangan institusi sosial, sosialisasi dan internalisasi pentingnya modal sosial, pengembangan komunikasi informasi, dan mengakomodasi informasi melalui proses penyaringan kemanfaatannya. Dalam prakteknya, pengembangan masyarakat membutuhkan pendamping yang berfungsi sebagai seorang yang menganalisa permasalahan, pembimbing kelompok, pelatih, inovator, penggerak, dan penghubung. Prinsip bekerjanya adalah (1) kerja kelompok, (2) keberlanjutan, (3) keswadayaan, (4) kesatuan khalayak sasaran, (5) penumbuhan saling percaya, (6) prinsip pembelajaran bersinambung, dan (7) pertimbangan keragaman potensi khalayak sasaran.

Pada saat melakukan pendampingan sosial ada beberapa peran pekerjaan sosial (pendamping) dalam pembimbingan sosial. Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

1. Fasilitator

Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut sebagai “pemungkin” (*enabler*). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Seperti dinyatakan Barker (1987) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987:49).

Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa “setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien

sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Parsons, 1994).

Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:190-203) memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial, diantaranya; (1) Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan; (2) Mendefinisikan tujuan keterlibatan; (3) Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan; (4) Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem: menemukan kesamaan dan perbedaan; (5) Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan; (6) Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif; (7) Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan; (8) Memfasilitasi penetapan tujuan; (9) Merancang solusi-solusi alternatif; (10) Mendorong pelaksanaan tugas; (11) Memelihara relasi sistem; dan (12) Memecahkan konflik.

2. Pendidik

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

3. Perwakilan masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

4. Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) memberikan contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (win-win solution). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela dimana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri.

Compton dan Galaway (1989: 511) memberikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator anatar lain; (1) Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik; (2) Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain; (3) Membantu

pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama; (4) Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah; (5) Berupaya untuk melokalisasi konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik; (6) Membagi konflik kedalam beberapa isu; (7) Membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik; (8) Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain; dan (9) Gunakan prosedur-prosedur persuasi.

5. Pembela

Dalam praktek PM, seringkali pekerja sosial harus berhadapan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memainkan peranan sebagai pembela (advokat). Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik.

Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (case advocacy) dan advokasi kausal (cause advocacy) (DuBois dan Miley, 1992; Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

Rothblatt (1978) memberikan beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela dalam PM adalah sebagai berikut; (1)

Keterbukaan (membiarkan berbagai pandangan untuk didengar); (2) Perwakilan luas (mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan); (3) Keadilan (memiliki sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan); (4) Pengurangan permusuhan (mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan); (5) Informasi (menyajikan masing-masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen dan analisis); (6) Pendukungan (mendukung partisipasi secara luas); dan (7) Kepekaan (mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain).

6. Pelindung

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung (protector) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (guardian role), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial.

Adapun demikian, prinsip-prinsip peran pelindung meliputi: (1) Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama; (2) Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan; dan (3) Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial. Dalam proses

pendampingan sosial, ada dua pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial:

1. Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat (community needs assessment), yang meliputi: (a) jenis dan tipe kebutuhan, (b) distribusi kebutuhan, (c) kebutuhan akan pelayanan, (d) pola-pola penggunaan pelayanan, dan (e) hambatan-hambatan dalam menjangkau pelayanan (lihat makalah penulis mengenai metode dan teknik pemetaan sosial untuk mengetahui cara-cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat).
2. Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk: (a) memperjelas kebijakan-kebijakan setiap lembaga, (b) mendefinisikan peranan lembaga-lembaga, (c) mendefinisikan potensi dan hambatan setiap lembaga, (d) memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, (e) mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi pelayanan, dan (f) mengembangkan prosedur guna mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial.

Menurut Sumodiningrat (2009:106), pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping memposisikan dirinya sebagai

perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator.

Sumodiningrat (2009:104-106) lebih dalam menjelaskan bahwa bagi para pekerja sosial dilapangan, kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendampingan sosial, terdapat 5 (lima) kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial, yaitu:

a. Motivasi

Masyarakat khususnya keluarga miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok untuk mempermudah dalam hal pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian memotivasi mereka agar dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.

b. Peningkatan Kesadaran dan pelatihan kemampuan

Disini peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, permasyarakatan imunisasi dan sanitasi, sedangkan untuk masalah keterampilan bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang dari luar. Hal-hal seperti ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan sumber penghidupan mereka sendiri dan membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri.

c. Manajemen Diri

Setiap kelompok harus mampu memilih atau memiliki pemimpin yang nantinya dapat mengatur kegiatan mereka sendiri seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan atau melakukan pencatatan dan pelaporan. Disini pada tahap awal, pendamping membantu mereka untuk mengembangkan sebuah sistem. Kemudian memberikan wewenang kepada mereka untuk melaksanakan dan mengatur system tersebut.

d. Mobilisasi Sumber

Merupakan sebuah metode untuk menghimpun setiap sumber-sumber yang dimiliki oleh individu-individu yang dalam masyarakat melalui tabungan dan sumbangan sukarela dengan tujuan untuk menciptakan modal sosial. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa setiap orang memiliki sumberdaya yang dapat diberikan dan jika sumber-sumber ini dihimpun, maka nantinya akan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaansumber-sumber ini perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

e. Pembangunan Dan Pengembangan Jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggota yang membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses

terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Dalam strategi pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat khususnya masyarakat miskin. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat ini disebut juga dengan penguatan kapasitas (*capacity building*). Penguatan kapasitas ini merupakan suatu proses dalam pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan atau merubah pola perilaku individu, organisasi, dan sistem yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Melalui penguatan kapasitas ini, maka masyarakat dapat memahami dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu; kesejahteraan hidup masyarakat. Strategi yang digunakan dalam penguatan kapasitas ini adalah melalui pendampingan. Jadi, strategi pendampingan sangat efektif dan efisien dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya pendampingan maka kapasitas masyarakat dapat dikembangkan atau diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dalam kerangka logik sebagai berikut : (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan

faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996). Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Dalam Konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa (Sumodiningrat, 2009 : 60). Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005 : 60).

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan
- b. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat.
- c. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan (Suriadi, 2005 : 56).

Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan biasanya diidentikkan dengan memberikan bantuan uang. Tetapi banyak proyek-proyek Inpres yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan langsung uang atau bantuan proyek kepada masyarakat tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan. Pada kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan masyarakat, memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya masyarakat untuk membangun diri sendiri. Ciri khas dari suatu kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan (Suriadi, 2005 : 61).

Anonim (2008) menyatakan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri, adalah:

- a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dari pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberkelanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Pembangunan pedesaan harus melakukan empat upaya besar yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan masukan modal, bimbingan teknologi, dan pemasaran untuk memandirikan masyarakat desa.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya penduduk pedesaan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat produktivitas dan daya saing.
- c. Membangun prasarana pendukung pedesaan yang cukup karena lokasi perkampungan terpencil, seperti jalan, jaringan telekomunikasi dan penerangan, yang masih merupakan tanggung jawab pemerintah.

Keikutsertaan masyarakat desa setempat dalam gotong-royong harus diutamakan.

- d. Mengatur kelembagaan pedesaan, yaitu berbagai lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa. Pemerintahan desa harus mampu menampung aspirasi dan menggali aspirasi.

B. Penelitian Terdahulu

Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era sebelum PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan atau Rural PNPM) bukan lahir secara spontan, namun telah banyak kajian-kajian di daerah tentang program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Belajar dari kesuksesan dan kegagalan program terdahulu lahirlah program nasional yang disebut PNPM Mandiri.

Program PNPM Mandiri merupakan program penanggulangan kemiskinan terbesar yang pernah dilaksanakan di Indonesia bahkan di dunia, hal ini mengakibatkan banyak Negara yang datang ke Indonesia untuk melihat dan mempelajari program tersebut. Di Indonesia sendiri, dari berbagai latar belakang

termasuk Perguruan Tinggi (PT) telah banyak melakukan penelitian tentang Program Penanggulangan Kemiskinan termasuk Program Nasional yang disebut PNPM-Mandiri Perdesaan. Beberapa Penelitian PNPM Mandiri Perdesaan yang dianggap oleh peneliti relevan dengan objek penelitian ini diantaranya sebagaimana pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Konsep	Metode Penelitian	Hasil	Peneliti
1.	Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Kota Bangun Ilir Kec.Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim (2012)	Pemberdayaan Masyarakat, PNPM Mandiri Perdesaan	Kualitatif Deskriptif	Menggambarkan tahapan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan, Faktor-Faktor pendukung dan Faktor-Faktor penghambat pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kota Bangun Ilir.	Ayu Fitriana, Tahun
2.	Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kec.Sesayap Ilir Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara (2011)	Pemberdayaan Masyarakat, PNPM Mandiri Perdesaan	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan PNPM Mandiri di desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap di bidang ekonomi sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pihak PNPM Mandiri perdesaan. Hanya saja sebagian program yang dilaksanakan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap karena	Intan Sumiyati

				kurangnya sumber daya manusia Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap.	
3.	Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (studi kasus di LKM Bina Budi Mulia dan LKM Ratu jaya Kecamatan Pancoranmas Kota Depok Prov. Jawa Barat (2010)	Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian tersebut menggambarkan pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Bina Budi Mulia lebih mencerminkan <i>community-based development</i> dibanding LKM Ratu Jaya.	Erwin Permana Tahun
4.	Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Jakarta Utara (2010)	Pekerja Sosial dalam Pendampingan	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menggambarkan Peran Pendamping masyarakat melalui program PKH adalah peran seorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin sekaligus sebagai perwakilan masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota/peserta PKH berdaya dalam membangun hidup mereka secara mandiri. Selain menjadi “agen perubahan” yang mengorganisasi kelompok masyarakat, pendamping harus pula melaksanakan tugas teknis, seperti melaksanakan analisis social, mengelola dinamika kelompok (masyarakat),	Ahmad Rokhoul Alamin

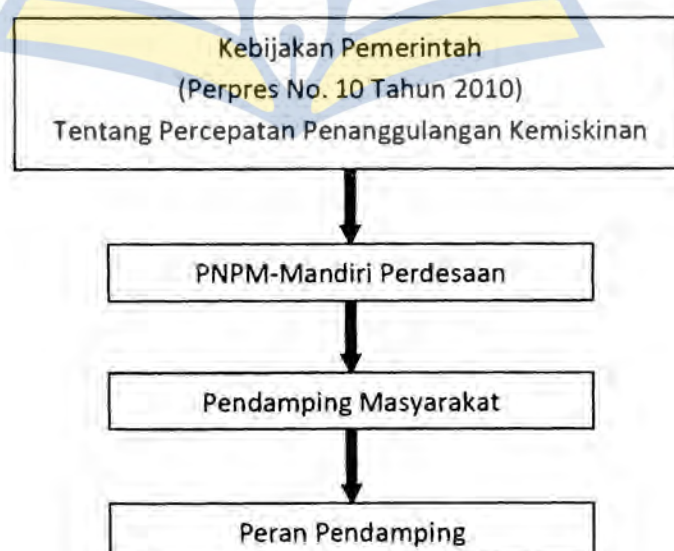
				menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.	
5.	Peranan Camat Dalam Upaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Pada Kecamatan Pancur Batu Tahun 2009.	Konsep Pembangunan	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menggambarkan peranan camat cukup kuat dalam pelaksanaan dan keberhasilan PNPM. Hal ini dapat dilihat dari peranannya untuk mengendalikan dan menggerakkan program-program PNPM. Tingkat percaya diri masyarakat terutama peserta PNPM dalam melaksanakan program-program PNPM semakin tinggi ketika camat dapat mengunjungi kelompok-kelompok peserta PNPM. Untuk itu seharusnya camat perlu mencermati hal ini, agar dapat membagi waktu serta mengunjungi peserta PNPM.	Boy Reonal di Sihombing

Dari berbagai hasil penelitian terdahulu, masih banyak penelitian-penelitian, baik yang dilakukan oleh Mahasiswa lewat Skripsi, Tesis, dan Disertasi, maupun melalui *journal-journal* yang sudah dilaksanakan dan diterbitkan menyangkut program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat terutama meneliti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) termasuk PNPM Mandiri Perdesaan. Namun dalam kesempatan untuk mengambil perbandingan dengan judul samadalam penelitian ini, belum ada yang ditemukan oleh penulis yang meneliti tentang Peran Pendamping Masyarakat yang dilaksanakan oleh fasilitator dalam

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). Hanya saja hampir semua stakeholder PNPM Mandiri Perdesaan sepakat dan paham arti pentingnya pendamping masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam hal peran pendamping masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perdesaan terdapat paling sedikit 28 (dua puluh delapan) peran yang dimainkan oleh fasilitator sebagai bahan pelaksanaan pendampingan sebagaimana ditetapkan aturan dan ketentuan pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan.

C. Kerangka Pikir

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan sekecil mungkin. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan. Terdapat tiga klaster program percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui Program Bantuan Langsung Tunai sebagai klaster I, Program Usaha Kecil dan Menengah melalui Kredit Usaha Rakyat sebagai Klaster III dan Program Pemberdayaan Masyarakat, diantaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) sebagai klaster II. Setiap Program penanggulangan kemiskinan tersebut selalu menyertakan pendamping program atau fasilitator oleh kementerian terkait termasuk Kementerian Dalam Negeri. Indikator capaian peran pendamping masyarakat itupun sudah disusun sedemikian rupa.



Indikator peran pendamping masyarakat pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan sama seperti di daerah lain yang mengacu pada ketentuan yang dibuat Kementerian Dalam Negeri RI sebagaimana terdapat dalam table 2.1

Tabel 2.2. Peran Pendamping Masyarakat

No.	Judul	Unsur Pendampingan	Peranan
1.	Peran Pendamping Masyarakat	Motivasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok SPP yang dinilai matang 2. UPK yang dinilai sehat 3. Supervisi lokasi ekstrim 4. Masyarakat miskin berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan 5. Perempuan berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan :
2.		Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pelatihan masyarakat sesuai SPC 2. Kabupaten yang menampilkan perkembangan pelaksanaan di website kab 3. Laporan program berdasarkan aplikasi oleh provinsi 4. Supervisi dan monitoring oleh BKAD 5. Desa melakukan Tinjauan Ulang Terhadap RPJMDesa dan RKPDesa (Desa Partisipasi)
3.		Manajemen Diri	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP UPK yang melakukan audit minimal 1 tahun sekali, ada laporan 2. Internal Audit Faskab T.A 2013 3. Internal Audit Faskab T.A 2014 4. Kasus Korupsi Yang diselesaikan s/d T.A 2013 5. Penyelesaian Masalah s/d Tahun 2013 6. Tindak lanjut Temuan BPKP s/d Tahun 2012 7. Pengisian Fasilitator 8. SPC tahunan (tahun anggaran 2014) diselesaikan dan sudah MDST
4.		Mobilisasi Sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengembalian SPP 2. Tingkat pengembalian UEP 3. NPL untuk UEP+SPP Maks (Total kolektibilitas 2 s.d 5 2) : 4. Jumlah kecamatan dengan NPL untuk UEP + SPP maks 10% 5. Dana perguliran UEP + SPP mengendap di rekening 6. Jumlah kecamatan dengan dana perguliran UEP + SPP mengendap di rekening maksimal 15%
5.		Pembangunan dan Pengembangan Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa memiliki papan informasi yang isinya selalu diperbaharui 2. Infrastruktur yang dibangun PNPM MPd TA.2013 digunakan oleh masyarakat 3. Infrastruktur yang dibangun PNPM MPd TA.2013 berkualitas bagus 4. Sub proyek yang dibangun PNPM MP dan telah MDST s/d TA. 2012 (yang membutuhkan pemeliharaan) masih berfungsi

Sumber : Diolah Peneliti, 2015

D. Operasionalisasi Variabel

1. Informan adalah pelaku dan pemanfaat program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Peran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pendamping masyarakat untuk mencapai target indikator pada pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pendamping masyarakat (fasilitator) adalah tenaga-tenaga profesional yang direkrut melalui tahapan seleksi pada program PNPM Mandiri Perdesaan dan ditugaskan sesuai kontrak kerja untuk mendampingi masyarakat di perdesaan di Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan bersama-sama dengan penerima manfaat program yang terdiri dari fasilitator Desa, fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten dan Provinsi.
4. Program PNPM Mandiri Perdesaan adalah suatu program kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan di perdesaan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pelestarian, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan, menggali potensi desa, dan menekankan prinsip-prinsip dasar dari program PNPM Mandiri Perdesaan.
5. Kegiatan pendampingan masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan adalah aktifitas yang dilaksanakan melalui tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemeliharaan dan pelestarian dengan cara memberi motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan

kemampuan, manajemen diri, manajemen sumber, pembangunan dan pengembangan jaringan.

6. Motivasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan masyarakat (fasilitator) agar masyarakat diperdesaan termotivasi untuk berpartisipasi aktif terlibat langsung dalam pembangunan desa di Kabupaten Bulungan.
7. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan masyarakat perdesaan adalah serangkai kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perdesaan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, bimbingan teknis sesuai peraturan perundangan-undangan program PNPM Mandiri Perdesaan agar pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan.
8. Manajemen diri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan masyarakat terhadap kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat sehingga mampu memilih pengurus dan memimpin kelembagaan desa yang berkelanjutan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Bulungan.
9. Manajemen sumber adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping terhadap masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan untuk mampu mengetahui dan menggali dan memanfaatkan potensi desa, potensi masyarakat untuk dapat diangkat sebagai modal dasar dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan.

10. Pembangunan dan pengembangan jaringan masyarakat perdesaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan masyarakat terhadap seluruh elemen masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan untuk dapat membangun kerjasama dengan desa sekitarnya dalam satu kecamatan atau lebih sehingga manfaat program/kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dapat dirasakan masyarakat desa secara luas.
11. Prinsip-prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan adalah pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, pro terhadap orang miskin, partisipatif, kesetaraan dan kesamaan gender (pro perempuan), transparan, akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlanjutan dan sederhana yang dilaksanakan bersama-sama bagi seluruh pemangku kepentingan yang bertujuan membangun desa berarti membangun Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bulungan.
12. Penerima manfaat program PNPM Mandiri Perdesaan adalah seluruh komponen masyarakat yang menerima baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan.
13. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan adalah kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemeliharaan, dan pelestarian yang dilaksanakan oleh masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan.
14. Perencanaan adalah seluruh rangkaian usulan kegiatan masyarakat perdesaan melalui musyawarah perencanaan desa mulai tingkat rukun tetangga hingga musyawarah antar desa dan antar kecamatan di Kabupaten

Bulungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

15. Pelaksanaan adalah hasil usulan kegiatan yang disepakati dan disetujui untuk dilaksanakan sesuai ketentuan petunjuk operasional PNPM Mandiri Perdesaan.
16. Penganggaran adalah serangkaian alokasi pendanaan yang diberikan untuk membiayai hasil usulan kegiatan masyarakat perdesaan berdasarkan daftar usulan prioritas masyarakat di Kabupaten Bulungan, yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, dan swadaya masyarakat.
17. Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan untuk menjaga atau memelihara hasil kegiatan masyarakat dari pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan.
18. Pelestarian adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memanfaatkan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat berkesinambungan dan berkelanjutan.
19. Kabupaten Bulungan adalah lokasi penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa data kualitatif deskriptif. Dengan metode deskriptif ini diharapkan dapat mendiskripsikan yang jelas tentang peran pendamping masyarakat (fasilitator) dalam implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan, dengan analisis deskriptif dapat menunjukkan faktor-faktor penghambat dan pendukung dan upaya yang dilakukan dalam pendampingan masyarakat (fasilitator) untuk mencapai indikator target pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai lokus pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Fokus Penelitian

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inquiry. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi - eksklusi atau memasukkan - mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan. (Moleong. 2001:62) Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah kegiatan pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan

PNPM MP di 10 Kecamatan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

B. Informan Penelitian

Penelitian mengenai Peran Pendamping Masyarakat Pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ini memerlukan informasi yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun cara peneliti menentukan informan adalah dengan mengambil satu orang dari setiap stakeholder pelaksana Program PNPM Mandiri Perdesaan pada setiap tingkatan. Hal ini dilakukan karena standar operasional prosedur program secara nasional adalah sama dan kondisi masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan pada umumnya homogen. Berikut daftar informan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Informan Penelitian.

Klasifikasi dan Jumlah Informan		
No	Informan	Jumlah (orang)
1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1
2	Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJO) :	-
	a. Provinsi	1
	b. Kabupaten	1
	c. Kecamatan	1
3	Kepala BPMD Kabupaten Bulungan	1
4	Camat se-Kabupaten Bulungan	1
5	Koordinator Provinsi PNPM MPd Kaltara	1
6	Pendamping/fasilitator	1
7	Masyarakat Pemanfaat	1
Jumlah keseluruhan		9

Sumber : Diolah Peneliti, 2015

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, diantaranya keadaan umum lokasi penelitian (geografis dan demografi penduduk miskin) dan studi kepustakaan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dan interview adalah mewawancarai langsung informan di lokus penelitian. Menurut Moleong, (2000 : 150) menjelaskan wawancara dan interview adalah percakapan terbuka antara pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
2. Dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Didalam melakukan analisis data, peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang dikutip oleh Lexi J. Moleong terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan

- untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti, tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
 3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabulasi data dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
 4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat di uji validitasnya.

Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari para informan yang disajikan dalam tabulasi data dan grafik, kemudian dianalisis, dibahas dan ditarik kesimpulan. Analisis deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk

yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara, mempunyai luas 18.010,50 km². Secara geografis terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara.

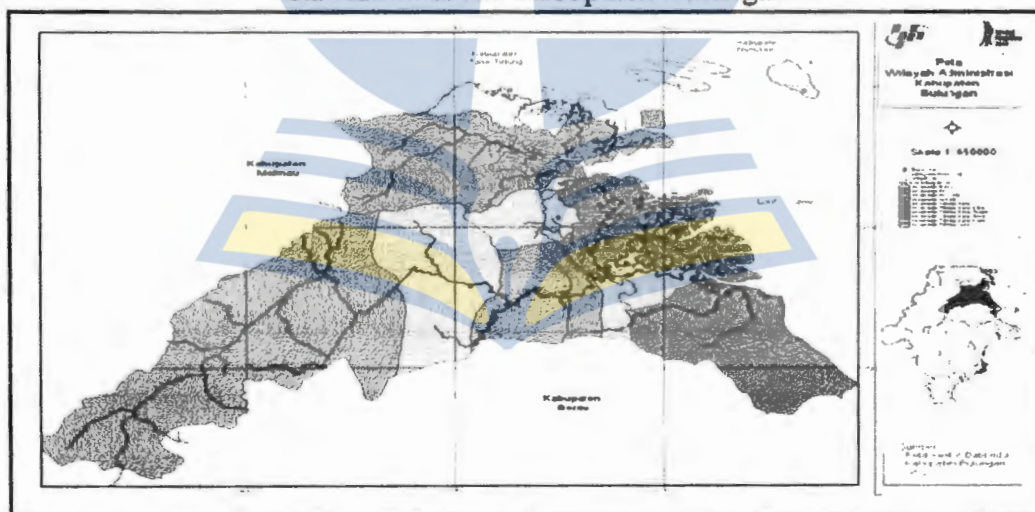
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, maka Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi tersisa 13.181,92 km². Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan; Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, Sebelah Timur dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Berau dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau.

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam. Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km: termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Kundas yang berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m.

Letak wilayah administrasi Kabupaten Bulungan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tarakan dan Laut Sulawesi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

Kabupaten Bulungan terbagi menjadi sepuluh (10) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Selor terdapat 6 Desa dan 3 Kelurahan, Kecamatan Tanjung Palas terdapat 5 Desa dan 4 Kelurahan, Kecamatan Tanjung Palas Utara terdapat 6 Desa, Kecamatan Tanjung Palas Tengah terdapat 3 Desa, Kecamatan Tanjung Palas Timur terdapat 8 Desa, Kecamatan Tanjung Palas Barat terdapat 5 Desa, Kecamatan Peso terdapat 10 Desa, Kecamatan Peso Hilir terdapat 6 Desa, Kecamatan Sekatak terdapat 22 Desa, dan Kecamatan Bunyu terdapat 3 Desa.

Gambar 4.1
Peta Administratif Kabupaten Bulungan



Sumber : BPS Kabupaten Bulungan

Kondisi bentang alam Kabupaten Bulungan adalah daratan yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam. Di samping itu, Kabupaten Bulungan juga memiliki beberapa pulau dan dialiri puluhan sungai besar dan kecil. Pulau terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan

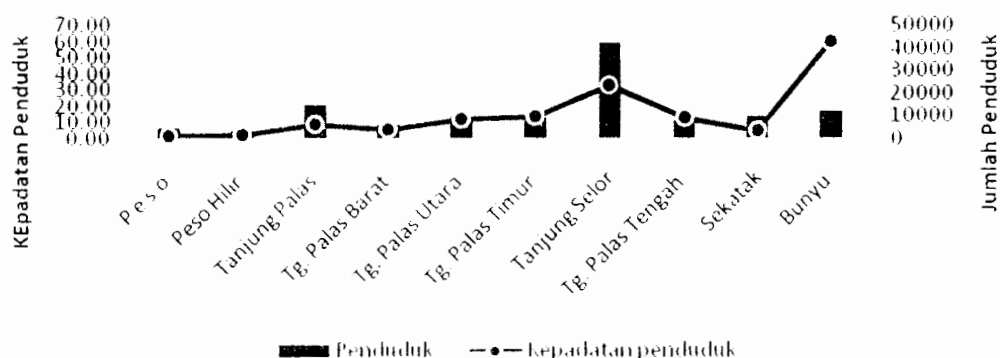
Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung). Sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Kundas yang berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 meter di atas permukaan laut.

2. Kondisi Demografi

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah ymasalah kependudukan yang mencakup antara lain mengenai jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Data kependudukan yang tepat sangat dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. Dalam proses dan kegiatan pembangunan, penduduk merupakan factor yang sangat dominan karena posisi mereka bukan hanya berperan sebagai pelaksana tetapi juga merupakan sasaran pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk yang besar misalnya dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan jika kualitasnya rendah. Oleh karena itu permasalahan penduduk tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2012 jumlah penduduk sebanyak 120.000 jiwa, bertambah menjadi 122.965 jiwa pada tahun 2013 berdasarkan hasil proyeksi penduduk. Berikut komposisi penduduk berdasarkan Jumlah penduduk dan kepadatan pada tahun 2013 dengan Grafik 4.1 :

Grafik 4.1
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Bulungan Tahun 2012



Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2013 (diolah)

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung terhadap lingkungan. Persebaran penduduk di Kabupaten Bulungan secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan yang cukup besar. Pada table 2.2 terlihat bahwa pada tahun 2013 masih seperti tahun – tahun sebelumnya yaitu sebagian besar penduduk tinggal di Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas yaitu lebih dari 36,89 persen dan 11,39 persen, sedangkan penduduk yang menetap di wilayah kecamatan lainnya masing-masing kecamatan proporsinya dibawah 10 persen.

Salah satu indikator pertumbuhan wilayah tercermin pula dari tingginya kepadatan penduduk di suatu wilayah. Seperti halnya persebaran penduduk, kepadatan penduduk juga terlihat timpang. Pada tahun 2013, ada 6 wilayah kecamatan yang kepadatan penduduknya diatas 10 jiwa/km², bahkan di kecamatan Bunyu, kepadatan penduduknya mencapai lebih dari 70 jiwa/km².

Tabel 4.1

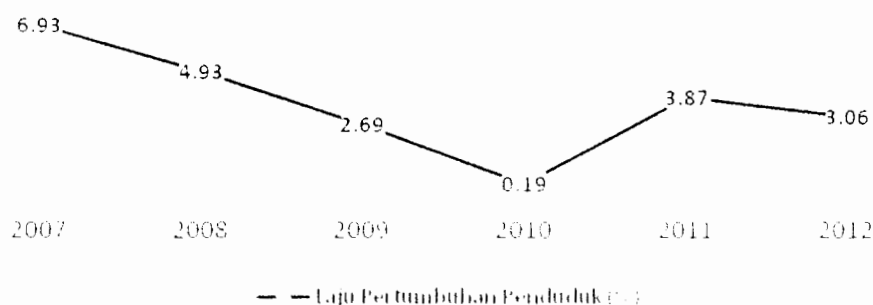
Persebaran dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, 2010 - 2013

Kecamatan	Persebaran (%)				Kepadatan (jiwa/ km ²)			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Peso	4,11	3,84	3,84	3,00	1,47	1,38	1,48	1,48
Peso Hilir	3,19	3,09	3,09	2,89	2,19	2,12	2,27	2,73
Tanjung Palas	13,71	12,46	12,46	11,39	8,78	7,99	8,56	10,04
Tanjung Palas Barat	6,78	5,18	5,18	5,10	7,16	5,48	5,86	7,43
Tanjung Palas Utara	7,95	7,95	7,95	7,63	11,09	11,10	11,89	14,66
Tanjung Palas Timur	6,88	7,68	7,68	9,55	11,41	14,24	13,61	21,82
Tanjung Selor	33,40	35,01	35,01	36,89	29,39	30,86	33,05	44,73
Tanjung Palas Tengah	6,48	6,68	6,68	7,04	11,66	12,04	12,89	17,44
Sekatak	8,32	8,23	8,23	7,48	4,69	4,65	4,89	5,82
Bunyu	9,18	9,89	9,89	9,03	52,04	56,17	60,13	70,55

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulungan cenderung menurun tiap tahunnya. Pada Grafik 4.2 dapat dilihat pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulungan pada tahun tahun 2007 yang mencapai 6,93%, pada tahun 2011/2012 sebesar 3,06 %, menurun menjadi 1,98 % tahun 2012/2013.

Grafik 4.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan 2007-2012

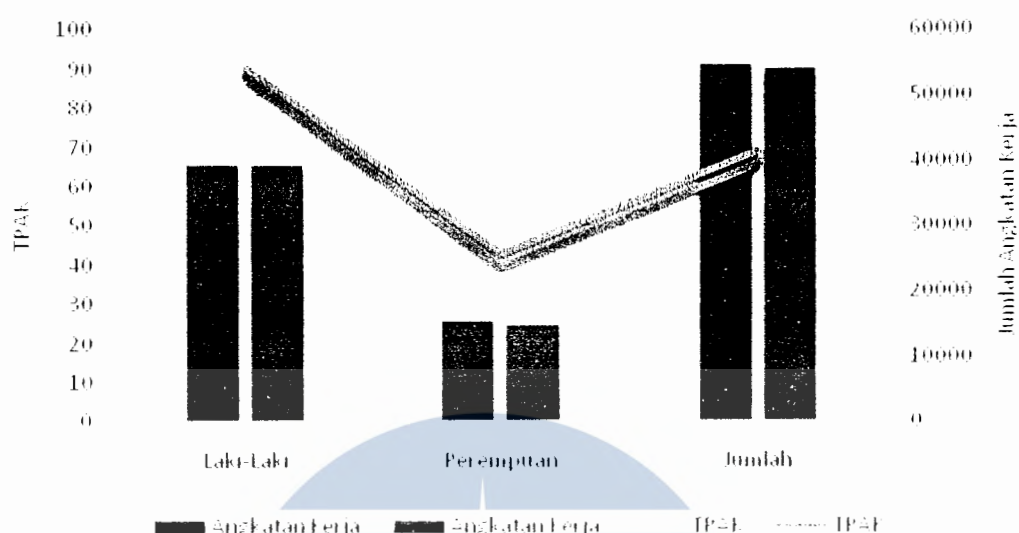


Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2013 (diolah)

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka utamanya yang telah memenuhi usia kerja diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian.

Usia kerja yang digunakan untuk keperluan pengumpulan data ketenagakerjaan adalah 15 tahun keatas. Pada Grafik 4.3 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bulungan tahun 2011-2012. Terlihat bahwa pada tahun 2011 maupun 2012 angkatan kerja di Kabupaten Bulungan tidak banyak berubah. Angkatan kerja yang mencapai sekitar 54.000 orang didominasi oleh tenaga kerja laki-laki yaitu hampir mencapai 4000 orang sedangkan tenaga kerja perempuan sebanyak 1600 orang.

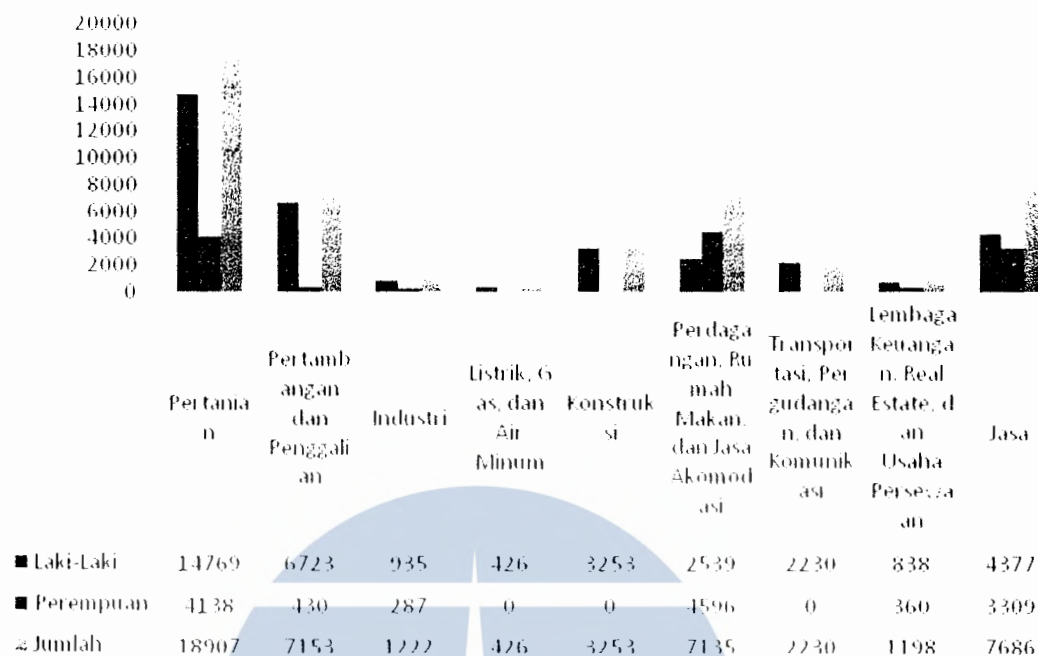
Grafik 4.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bulungan
Tahun 2011-2012



Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2013 (diolah)

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik 4.3, terjadi penurunan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bulungan tahun 2011 ke tahun 2012. Pada tahun 2011, 69 angkatan kerja berpartisipasi untuk setiap 100 tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2012, 65 angkatan kerja Bulungan berpartisipasi untuk setiap 100 tenaga kerja. Hal ini juga terjadi untuk laki-laki maupun perempuan.

Grafik 4.4
Pekerjaan Penduduk Kabupaten Bulungan Tahun 2012



Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2013 (diolah)

Dari tahun ke tahun sektor pertanian masih tetap merupakan sektor paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bulungan. Pada Grafik 4.4 menunjukkan sektor pekerjaan penduduk kabupaten Bulungan Tahun 2012 berdasar jenis kelamin. Sebagaimana data angkatan kerja Kabupaten Bulungan, tenaga kerja lelaki mendominasi lapangan kerja di Bulungan. Hanya di Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi jumlah tenaga kerja perempuan melebihi tenaga kerja laki-laki. Terlihat di Gambar 2.6 bahwa sebagian besar tenaga kerja di Bulungan bekerja di sektor pertanian yang totalnya mencapai 18.907 orang. Di tempat kedua ada sektor jasa (7.686 tenaga kerja) dan di tempat ketiga adalah sektor pertambangan dan pengalihan (7.153 tenaga kerja). Di sektor jasa, jumlah tenaga kerja laki-laki dan wanita relatif seimbang dari pada di sektor lainnya.

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia yang terampil dan produktif sehingga pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan kualitas system pendidikan. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari hasil pendidikan yang telah atau sedang dicapai oleh penduduk. Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun telah meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Pada tahun 2012/2013, di Kabupaten Bulungan terdapat 48 TK, 133 SD, 1 SLBN, 50 SMP, 15 SMA, dan 5 SMK. Jumlah ini sudah termasuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang berada dibawah Kementerian Agama. Untuk rasio guru dan murid, di tingkat SD setiap guru mengajar rata-rata 12 orang murid; di tingkat SMP rata-rata 9 orang, dan tingkat SMU rata-rata 11 orang murid. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sarana pendidikan di kabupaten Bulungan masih cukup untuk menampung murid lebih banyak lagi.

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Bulungan juga terlihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk. Pada Tabel 4.5 menunjukkan jumlah anak sekolah menurut usia. Secara umum terlihat bahwa seiring meningkatnya jenjang sekolah, jumlah peserta didik semakin berkurang. Pada tahun 2011, jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah sebanyak 15612. Angka ini semakin berkurang setiap naik jenjang pendidikan hingga ketika usia SMA (15-18 tahun), hanya 4710 yang bersekolah. Akhirnya pada jenjang perguruan tinggi, terdapat 1406 peserta didik. Pada tahun 2012, jumlah anak usia Sekolah Dasar yang bersekolah

meningkat menjadi 18852 namun pada usia setara jenjang SMA dan Perguruan Tinggi, jumlahnya lebih sedikit dari pada tahun 2011 yaitu 3916 dan 7503 peserta didik berturut-turut. Keterangan ini selanjutnya diperkuat oleh Tabel 2.3 yang berisi angka partisipasi kasar dan murni di Kabupaten Bulungan tahun 2011-2012.

Tabel 4.5
Jumlah Anak Sekolah Menurut Kelompok Usia (tahun)

Kelompok Usia	7 – 12	13 – 15	16 – 18	19 – 24
Tahun 2011				
Tidak/Belum Sekolah	97	-	-	310
Masih Sekolah	15612	5548	4710	1406
Tidak Bersekolah lagi	-	355	1423	8237
Jumlah 2011	15709	5903	6133	9953
Tahun 2012				
Tidak/Belum Sekolah	-	-	-	-
Masih Sekolah	18852	6486	3916	849
Tidak Bersekolah lagi	163	84	1018	7503
Jumlah 2012	19015	6570	4934	8352

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, 2013

Pada Tabel 4.6 secara umum menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka partisipasi murni maupun kasar seiring meningkatnya jenjang pendidikan baik pada tahun 2011 maupun tahun 2012. Partisipasi penduduk usia sekolah dapat menggambarkan tingkat ketersediaan kualitas sumber daya manusia dan aktifitas pendidikan disuatu daerah. Gambaran mengenai angka partisipasi sekolah pada tiap jenjang pendidikan di Kabupaten Bulungan adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah angka partisipasi kasarnya. Dari segi jenis kelamin, rata-rata angka partisipasi kasar maupun murni pada laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.

Tabel 4.6

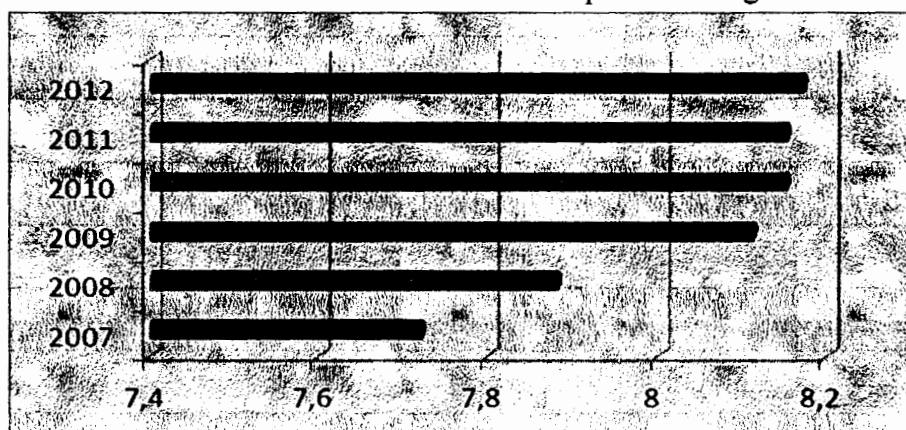
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Berdasar Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2012

Jenis Kelamin/Tingkat Pendidikan	APK		APM	
	2011	2012	2011	2012
Laki-Laki + Perempuan				
SD	114,25	104,52	94,67	92,31
SLTP	87,4	96,48	67,92	65,82
SLTA	82,25	97,37	64,33	72,09
Laki-Laki				
SD	124,22	109,21	96,92	93,05
SLTP	73,97	94,1	63,42	69,17
SLTA	74,45	91,88	60,86	67,58
Perempuan				
SD	104,53	98,95	92,47	91,42
SLTP	101,15	98,66	72,53	75,09
SLTA	90,6	104,39	67,79	77,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, 2013

Grafik 4.5 menunjukkan waktu rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bulungan pada tahun 2007-2012. Terjadi peningkatan waktu sekolah dari sekitar 7,7 tahun pada tahun 2007 menjadi sekitar 8,1 tahun pada tahun 2012.

Grafik 4.5
Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Bulungan



Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2013

4. Kondisi Kesehatan

Kualitas penduduk secara fisik khususnya dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Selama ini, berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun daerah. Upaya pelayanan kesehatan masyarakat perlu terus didorong dan ditingkatkan agar semua lapisan masyarakat dapat memperolehnya secara mudah dan murah. Dengan upaya tersebut diharapkan derajat kesehatan yang lebih baik dapat tercapai.

Ketersediaan data IPM di wilayah adalah penting dalam mengukur tingkat pencapaian kinerja pembangunan. Menurut data IPM Kabupaten Bulungan yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Bulungan, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bulungan adalah 76,31 Tahun. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua di Kalimantan Utara setelah Kota Tarakan. Secara tidak langsung, angka ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Bulungan relatif lebih baik dari pada penduduk kabupaten lain di Kalimantan Utara.

Tabel 4.7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kabupaten/Kota	IPM					Ranking			
	2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Malinau	72,30	72,65	73,26	73,63	74,33	4	4	4	4
Bulungan	74,68	75,11	75,54	76,03	76,31	2	2	2	2
Tana Tidung	71,07	71,42	71,87	72,66	73,20	5	5	5	5
Nunukan	73,48	73,89	74,38	74,84	75,13	3	3	3	3
Tarakan	76,37	77,19	77,19	77,76	78,07	1	1	1	1
KALTARA	-	-	-	-	74,72	-	-	-	10

Catatan: IPM untuk level provinsi dihitung terpisah dari Kalimantan Timur mulai tahun 2013, sebelumnya dihitung gabung dengan Kalimantan Timur

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat adalah dengan membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan. Keberadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sangatlah menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Pada table 4.5 dapat dilihat ketersediaan berbagai sarana kesehatan di Kabupaten Bulungan.

Tabel 4.8
 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bulungan Tahun 2009-2012

Fasilitas Kesehatan	2009	2010	2011	2012
1. Rumah Sakit	1	1	1	1
2. Puskesmas	12	12	12	12
3. Puskesmas Pembantu	36	36	36	37
4. Puskesmas Keliling	10	15	15	15
5. Posyandu	157	159	159	170
6. Balai Pengobatan Swasta	3	3	6	7
7. Tempat Tidur Rumah Sakit	130	120	119	115
8. Tempat Tidur Puskesmas	35	40	40	53
9. Rumah Bersalin	1	1	1	2
10. Tempat Tidur Rumah Bersalin	6	6	6	12
11. Apotek	7	8	13	14
12. Gudang Obat	12	12	12	12
13. Laboratorium Kesehatan RS	1	1	1	1
14. Laboratorium Kesehatan Puskesmas	12	12	12	12
15. Gudang Farmasi Kabupaten	1	1	1	1
16. Toko Obat	13	4	12	5
17. Laboratorium Kabupaten	-	-	1	1

Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2013

Tabel 4.8 menunjukkan fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Bulungan tahun 2009-2012. Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan pada jumlah fasilitas kesehatan dari tahun 2009-2012 di Kabupaten Bulungan. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Bulungan didominasi oleh posyandu yang jumlahnya mencapai 159 pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 170 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli pada kesehatan anak dan bayi. Selanjutnya, terdapat 12 puskesmas dan 37 puskesmas pembantu di Kabupaten Bulungan, rata-rata di setiap kecamatan terdapat 1 puskesmas yang dilengkapi laboratorium kesehatan puskesmas dan 3 puskesmas pembantu. Lebih lanjut, pada tahun 2011, Kabupaten Bulungan telah memiliki laboratorium kesehatan kabupaten yang dapat mendukung kinerja laboratorium rumah sakit.

5. Administrasi Wilayah

Kabupaten Bulungan Terdiri atas 10 kecamatan dan 81 desa/kelurahan. Kecamatan Sekatak memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 22 Desa disusul Kecamatan Peso dengan 10 Desa. Kecamatan Bunyu yang terdiri atas Desa Bunyu Selatan, Bunyu Barat, dan Bunyu Timur menjadi kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit

Tabel 4.9
Daftar Nama dan Kode Wilayah Administrasi di Kabupaten Bulungan

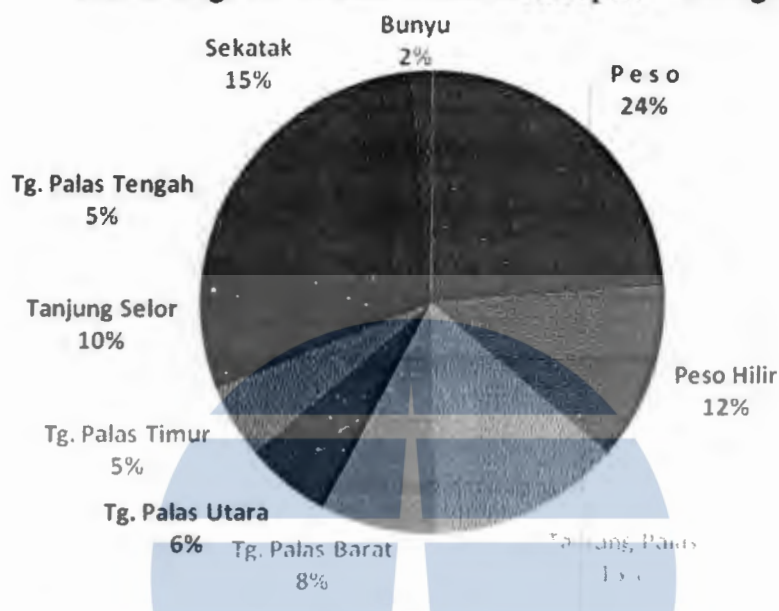
KECAMATAN	DESA	KECAMATAN	DESA
[1]	[2]	[1]	[2]
010 PESO	001 LONG PELEBAN 002 LONG YIIN 003 LONG BUANG 004 LONG LIAN 005 MUARA PENGIAN 006 LONG PESO 007 LONG LEJU 008 LEPAK ARU 009 LONG LASAN 010 LONG BIA	023 TG PALAS TIMUR	005 TANJUNG AGUNG 006 BINAI 007 PURA SAJAU 008 SAJAU HILIR
011 PESO HILIR	001 LONG TELENJAU 002 NAHA AYA 003 LONG BANG 004 LONG TUNGU 005 LONG BANG HULU 006 LONG LEMBU	024 TANJUNG SELOR	001 TG SELOR HILIR 002 TG SELOR HULU 003 JELARAI SELOR 004 GUNUNG SERIANG 005 BUMI RAHAYU 006 GUNUNG SARI 007 APUNG 008 TG SELOR TIMUR 009 TENGGAPAK
020 TANJUNG PALAS	008 ANTUTAN 018 TG PALAS HULU 020 PEJALIN 021 GUNUNG PUTIH 022 KARANG ANYAR 024 TG PALAS HILIR 023 TG PALAS TENGAH 025 TERAS NAWANG 026 TERAS BARU	025 TG PALAS TENGAH	001 SALIM BATU 002 SILVA RAHAYU 003 TANJUNG BUKA
021 TG PALAS BARAT	001 LONG BELUAH 002 LONG SAM 003 MARA SATU 004 MARA HILIR 005 LONG PARI	030 SEKATAK	001 PENTIAN 002 PUNGIT 003 SEKATAK BENGARA 004 TERINDAK 005 ANJAR ARIP 006 KELINCAPAN 007 KERITING 008 AMBALAT 009 KENDARI 010 BUNAU 011 SEKATAK BUJI 012 KELISING 013 UJANG 014 TENGGILING 015 KELEMBUNAN 016 BEKILIU 017 PARU ABANG 018 BAMBANG 019 TURUNG 020 MARITAM 021 PUNAN DULAU 022 LIAGU
022 TG PALAS UTARA	001 KARANG AGUNG 002 PIMPING 003 PANCA AGUNG 004 RUHUI RAHAYU 005 ARDI MULYO 006 KELUBIR	050 BUNYU	001 BUNYU SELATAN 002 BUNYU BARAT 003 BUNYU TIMUR
023 TG PALAS TIMUR	001 TANAH KUNING 002 MANGKU PADI 003 SAJAU 004 WONO MULYO		

Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2013

Sesuai Grafik 4.7 dapat diketahui bahwa kecamatan terluas adalah kecamatan Peso yang menempati 24 persen wilayah Kabupaten Bulungan (3142,79 km persegi) disusul Kecamatan Sekatak yang menempati 15 persen wilayah Kabupaten Bulungan (1993,98 km persegi). Sedangkan Kecamatan

Bunyu yang luasnya 198,32 km persegi menjadi kecamatan tersempit di kabupaten Bulungan dan menempati 2 persen wilayah Kabupaten Bulungan.

Grafik 4.8
Perbandingan Luas Kecamatan di Kabupaten Bulungan

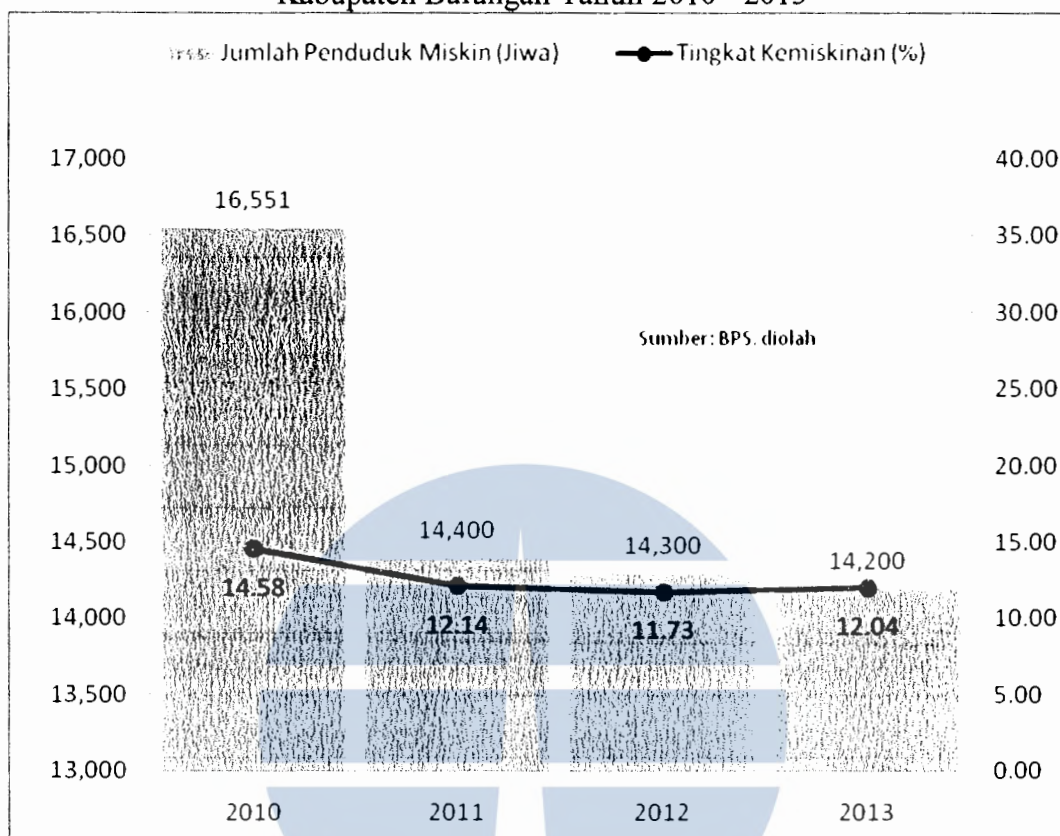


Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2013 (diolah)

6. Penanggulangan Kemiskinan

Grafik 4.8 menunjukkan capaian perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulungan tahun 2010-2014 ada kecenderungan selalu menurun walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebanyak 16.551 jiwa, dan menjelang tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 14.200 jiwa atau mengalami penurunan sebanyak 2.351 jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 14,58%, dan menjelang tahun 2013 tingkat kemiskinan menjadi 12,04%, atau mengalami perbaikan/penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,54%.

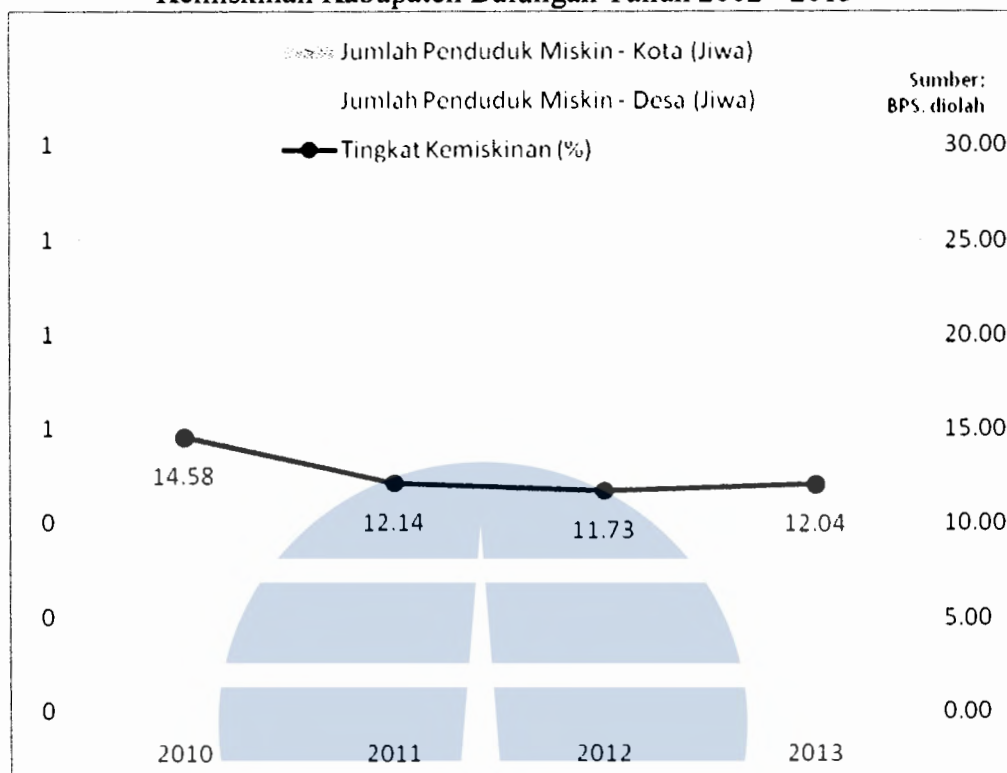
Grafik 4.9
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2013



Sumber: BPS, Bulungan 2014

Grafik 4.10 menunjukkan capaian komposisi penduduk miskin perkotaan dan perdesaan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulungan tahun 2010-2014 ada kecenderungan stabil (tetap). Pada tahun 2010 komposisi penduduk miskin perdesaan dan perkotaan dengan tingkat kemiskinan masing-masing hanya sebesar 14,58%, hingga sampai tahun 2013 hanya mencapai sebesar 12,04% saja atau mengalami penurunan sebesar 2,54%. Hal ini membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bulungan ada kecenderungan stagnan.

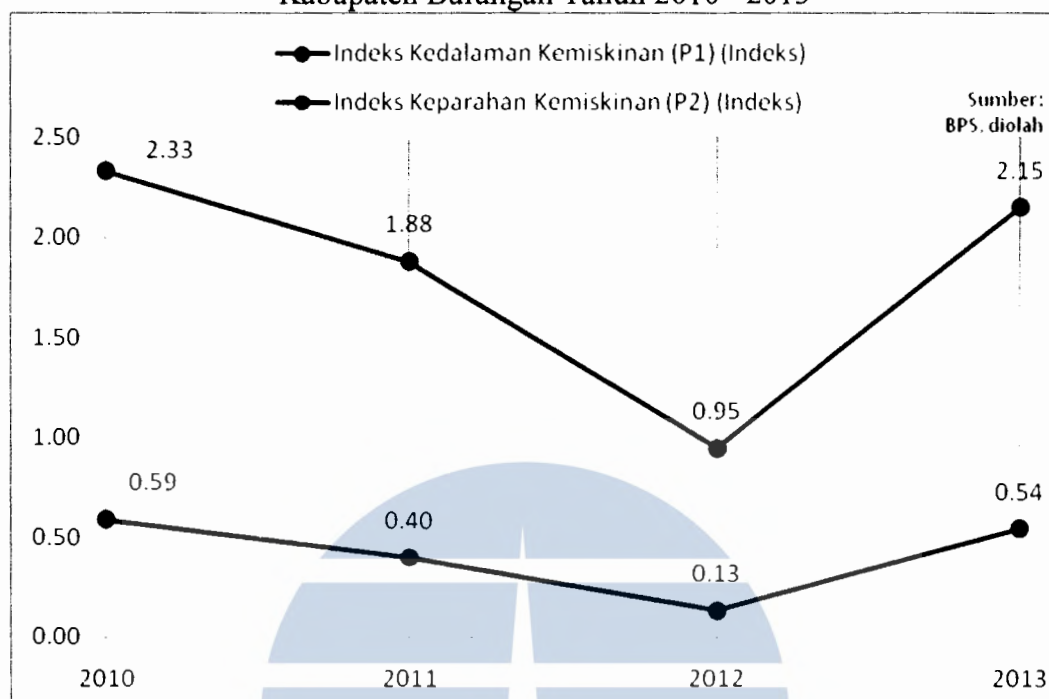
Grafik 4.10
Komposisi Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan dengan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulungan Tahun 2002 - 2013



Sumber: BPS, Bulungan 2014

Grafik 4.11 menunjukkan capaian indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Bulungan tahun 2010-2014 ada berfluktuatif. Pada tahun 2010 P1 sebesar 2,33%, hingga sampai tahun 2013 mencapai 2,15% atau mengalami penurunan sebesar 0,18%. Sedangkan P2 tahun 2010 sebesar 0,59%, hingga sampai tahun 2013 mencapai 0,54% atau mengalami penurunan sebesar 0,05%. Hal ini membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bulungan ada kecenderungan stagnan.

Grafik.4.11
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di
Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2013



7. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Kalimantan Utara

a. Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan

Provinsi Kalimantan Utara yang disingkat dengan Kaltara, merupakan provinsi ke-34 di Indonesia. Provinsi paling bungsu ini lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai provinsi induk, yang meliputi Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Ibukota provinsi ini terletak di Tanjung Selor yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bulungan (lihat Gambar 5. 1).

Pemerintahan Kaltara mulai bergerak sejak dilantiknya Dr.H. Irianto Lambrie sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Utara oleh Dr.H. Bambang

Susilo Yudhoyono Presiden RI yang diwakili Dr.H. Gumawan Fauzi Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2013, barulah roda pemerintahan Provinsi Kaltara mulai berjalan dan berbagai kewenangan yang tadinya masih dibawah kendali Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara perlahan diserahkan kepada Pemerintah Kalimantan Utara meliputi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kaltara, untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2007. Pemerintah Kalimantan Timur telah merealisasikan bantuan PNPM Mandiri dalam bentuk bantuan terhadap usaha-usaha yang berdiri di provinsi tersebut termasuk di Kaltara yang dulunya bagian dari Kalimantan Timur. Sejak Desember 2013 Pemerintah Kalimantan Timur menyerahkan pengelolaan PNPM Mandiri ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan sambil menunggu leading sektor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau nama lainnya terbentuk.

Terdapat tiga paket PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Kalimantan Utara yaitu PNPM Mandiri Perdesaan reguler, PNPM-Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif-Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) dan PNPM Mandiri Perdesaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Total alokasi Bantuan Langsung Mandiri (BLM) kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dari seluruh

program tersebut di Provinsi Kalimantan Utara adalah Rp.57.362.630.000,-.

Rincian untuk masing-masing program disampaikan sebagaimana uraian berikut:

Total alokasi BLM (setelah pemotongan BLM APBN 11,8%) PNPM Mandiri PerdesaanReguler Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp.43.711.360.000,- bersumber dari APBN Rp.31.169.880.000,- , APBD sebesar Rp.7.710.000.000,-, APBD Tambahan Rp.1.950.000.000,-, APBD Pengganti pemotongan DUB Rp.2.881.480.000,-.

Total alokasi BLM awal PNPM Mandiri PerdesaanIntegrasi SPP-SPPN Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp.4.500.000.000,- yang bersumber dari APBN Rp.3.000.000.000,- , APBD sebesar Rp.1.000.000.000,-, dan APBD Tambahan Rp.500.000.000,-.

Total alokasi BLM awal (setelah pemotongan BLM APBN 11,8%) PNPM Mandiri Perdesaan MP3KI Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp.9.151.270.000,- bersumber dari APBN Rp.8.772.372.000 dan dari APBD Pengganti Pemotongan DUB Rp.378.898.000.

Status pencarian dana BLM tersebut per 31 Desember 2014 telah cair 100% ke rekening UPK masing-masing kecamatan sedangkan penyaluran ke Desa untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan reguler sebesar Rp.35.496.549.200,- atau 81,2% dari total alokasi. Untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN penyaluran ke Desa sebesar Rp.2.870.899.200 atau 63,8% dan PNPM Mandiri Perdesaan MP3KI penyaluran ke Desa sebesar Rp.7.457.635.000,- atau 81,5%.

Sehingga total BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2014 di Provinsi Kalimantan Utara dari total alokasi BLM Rp. 57.362.630.000,- telah cair

100%, telah disalurkan ke Desa Rp.45.825.083.400,- atau 79,89% sehingga dana yang belum tersalurkan sebesar Rp. 11.537.566.600,-.

b. Pendamping Masyarakat

Untuk melaksanakan program PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Kalimantan Utara, maka direkrut tenaga professional yang dikenal dengan istilah fasilitator (pendamping masyarakat).

Jumlah kuota tenaga pendamping masyarakat untuk Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 110 orang, sedangkan jumlah tenaga pendamping masyarakat yang masih aktif sejak dilimpahkan ke Satker PNPM Mandiri Perdesaan Bappeda Provinsi Kalimantan Utara dari Satker PNPM Mandiri Perdesaan BPMD Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 69 orang. Seiring berjalannya waktu, proses rekrutmen untuk memenuhi kuota tersebut dilakukan oleh Satker bekerjasama dengan Tim Seleksi yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Proses rekrutmen selama perodesasi tersebut telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, namun kuota tersebut sulit terpenuhi. Hal ini disebabkan persyaratan administrasi untuk menjadi calon pendamping masyarakat terlalu sulit terpenuhi, dan biasanya calon pendamping masyarakat juga tidak mau jika dinyatakan lulus administrasi dan test tertulis dan wawancara enggan ditempatkan di lokasi yang jauh dan sangat sulit terjangkau melalui transportasi jalan darat selalu mengundurkan diri, ditambah lagi biasanya lokasi penempatan tersebut tidak sesuai dengan budaya keseharian calon pendamping masyarakat.

Melalui Tabel 4.10 ini menjelaskan proses rekrutmen pendampingan masyarakat (fasilitator) pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Data Posisi, Kuota, Realisasi dan Proses Rekrutmen Pendamping Masyarakat
PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Kalimantan Utara

No	Posisi/Jabatan	Kuota	Terisi	Kosong
1.	Fasilitator Kabupaten (Faskab)	2	1	1
2.	Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab)	4	4	0
3.	Fasilitator Kabupaten Keuangan (Faskab Keu)	4	3	1
4.	Fasilitator Kabupaten Integrasi (Faskab-Integ)	1	1	0
5.	Fasilitator Kabupaten Perguliran dan Pengembangan Usaha (Faskab PPU)	3	0	4
6.	Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (FK-P)	36	33	3
7.	Fasilitator Kecamatan Teknik (FK-T)	39	22	17
8.	Asisten FK – Pemberdayaan	7	0	0
9.	Asisten FK – Teknik	7	0	0
10.	Asisten MIS	3	3	0
11.	Operator Komputer Kabupaten	4	2	2
Jumlah (orang)		110	69	41

Sumber: data primer yang diolah, 2015.

8. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan

a. Alokasi BLM dan UPK

Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun 2014 mendapatkan total alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp.15.658.360.000,- yang terdiri dari Bantuan Langsung Mandiri PNPM Mandiri Perdesaan Reguler sebesar Rp.10.500.000.000,- Bantuan Langsung Mandiri PNPM Integrasi sebesar

Rp.4.500.000.000,- dan Bantuan Langsung Mandiri Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp.1.108.360.000,-. Dari tiga jenis BLM, hanya Kecamatan Bunyu yang tidak mendapatkan BLM PNPM Mandiri Perdesaan regular, disebabkan tiga desa di Kecamatan Bunyu identik dengan perkotaan.

Dana BLM dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar perdesaan, biaya pemeliharaan infrastruktur dasar perdesaan, dan non infrastruktur, termasuk usaha ekonomi produktif (UEP) dan simpan pinjam perempuan (SPP).

DOK digunakan untuk mendukung dan menunjang operasional dana BLM tersebut, misalnya untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku program PNPM Mandiri Perdesaan, pengadaan sarana dan prasarana untuk RBM, memfasilitasi pengelolaan UPK, UEP dan SPP, termasuk untuk menggaji para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang di-SK kan langsung oleh Pejabat Berwenang di seluruh perdesaan di Kabupaten Bulungan. Ada empat jenis DOK PNPM Mandiri Perdesaan yaitu DOK PNPM Integrasi, DOK PNPM RBM (Ruang Belajar Masyarakat), DOK PNPM Regular, DOK PNPM PL UPK (Pendamping Lokal Unit Pengelola Kegiatan).

BLM dan DOK dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada tingkat kecamatan di Kabupaten Bulungan. Kelembagaan UPK di kecamatan menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan bersamaan dengan kelembagaan lainnya. Tiap UPK memiliki susunan kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Mereka representasi warga masyarakat desa yang direkrut melalui musyawarah mulai tingkat desa

sampai tingkat kecamatan. Mereka dianggap cakap dan mampu untuk mengelolah BLM untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka mitra perangkat desa dan kecamatan bersama lembaga desa lainnya berkomitmen untuk membangun dan memajukan desa serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan perdesaan yang ada di Kabupaten Bulungan.

Tabel. 4.11
Data Pengurus UPK dan Alokasi BLM PNM Mandiri Perdesaan Tahun
Anggaran 2014 menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan

No	UPK	Pengurus UPK		Alokasi (Rp.) BLM Kegiatan		
				APBN	APBD	Jumlah
A	BLM PNPMM Pd Reguler			8,260,000,000	1,790,000,000	10,050,000,000
1	Lanjung Selor	Ketua Sekretaris Bendahara	Herman Eka Lestari Iari	740,000,000	160,000,000	900,000,000
2	Lanjung Pala	Ketua Sekretaris Bendahara	Mahmud Hasnah Rukmini	780,000,000	170,000,000	950,000,000
3	Lanjung Palas Barat	Ketua Sekretaris Bendahara	Sonni Albert K Anggoro M.W Juari Ijan	700,000,000	150,000,000	850,000,000
4	Lanjung Palas Timur	Ketua Sekretaris Bendahara	Poninten Adrianus AB Sumartini	780,000,000	170,000,000	950,000,000
5	Lanjung Palas Utara	Ketua Sekretaris Bendahara	Sriani Listiyani Emilia Dewi	580,000,000	120,000,000	700,000,000
6	Lanjung Palas Tengah	Ketua Sekretaris Bendahara	Mulyansyah Miki Adriani Dina	1,500,000,000	350,000,000	1,850,000,000
7	Peso	Ketua Sekretaris Bendahara	Surtati Oktavia Yurita Judyriana	800,000,000	150,000,000	950,000,000
8	Peso Hilir	Ketua Sekretaris Bendahara	Sudirman Kesnia Martin Laura Elesia	1,500,000,000	350,000,000	1,850,000,000
9	Sekatak	Ketua Sekretaris Bendahara	Enni Mahmud Jailani Siti Khasanah	880,000,000	170,000,000	1,050,000,000
10	Bunyu	Ketua Sekretaris Bendahara	Ardiansyah Ardi Diah Sulistyawati	-	-	-
B	BLM PNPMM Integrasi			3,000,000,000	1,500,000,000	4,500,000,000
C	BLM DOK PNPMM Pd			1,108,360,000	-	1,108,360,000
12	DOK PNPMM Integrasi			200,000,000	-	200,000,000
13	DOK PNPMM Pd RBM			150,000,000	-	150,000,000
14	DOK PNPMM Pd			746,360,000	-	746,360,000
15	DOK PNPMM Pd PL UPK			12,000,000	-	12,000,000
Jumlah A+B+C				12,368,360,000	3,290,000,000	15,658,360,000

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2015

b. Lokasi dan Usulan Kegiatan BLM PNPM Mandiri Perdesaan

Setelah mendapatkan penetapan alokasi anggaran BLM dari Bupati Bulungan, maka masyarakat perdesaan dilokus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Bulungan melaksanakan musyawarah desa untuk membuat usulan kegiatan.

Di dalam musyawarah desa, maka telah tersusun usulan kegiatan di lokasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan. Penetapan kegiatan melalui musyawarah masyarakat desa yang difasilitasi oleh pendampingan masyarakat.

Setelah melalui proses yang panjang dalam musyawarah desa, usulan tersebut disesuaikan dengan pagu alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan masing-masing lokus kegiatan yang sudah menjadi prioritas masing-masing desa se-Kabupaten Bulungan. Selain dana kegiatan berasal dari BLM PNPM Mandiri Perdesaan, dana kegiatan juga berasal dari dana swadaya masyarakat perdesaan. Pada tabel 4.12 menginformasikan lokasi, usulan kegiatan, jumlah usulan kegiatan, volume, sumber dana kegiatan, dan pemanfaat dari program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan pada tahun anggaran 2014.

Tabel. 4.12
Lokasi, Usulan Kegiatan, Alokasi Dana dan Pemanfaatan BLM PNPM Mandiri
Perdesaan Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Bulungan

Nama Lokasi dan Usulan Kegiatan	Jml Usul	Panjang (meter)	Luas m ²	Unit	Dana		Pemanfaat		
					BLM	Swadaya	L	P	A
1 Provinsi Kalimantan Utara									
1 Kabupaten Bulungan	59				10 050 000 000	495 868 175			
1 Perbaikan Jembatan Kayu untuk Roda 4	1	18	0	1	121 148 500	1 670 000	391	316	561
2 Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Telford	1	164	0	0	300 373 600	5 240 000	86	125	134
3 Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Sirtu	1	234	0	0	173 394 700	3 350 000	984	1006	1145
4 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Beton	3	704	0	0	736 200 600	23 135 500	1169	966	1904
5 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Telford	2	627	0	0	640 086 800	8 422 600	1220	1055	1463
6 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Sirtu	2	570	0	0	482 949 100	2 307 600	277	254	326
7 Pembukaan Lahan atau Penimbunan Jalan	1	3000	0	0	347 331 000	3 700 000	712	636	1024
8 Pembuatan Pasar Umum berbentuk Los/ Lapa	1	0	250	1	349 715 900	25 000 000	1420	1349	1656
9 Pembuatan Tambatan Tepi Sungai	1	15	0	0	143 984 200	2 450 000	809	760	1033
10 Pembuatan Saluran Drainase	6	1764	0	0	1 101 115 300	16 847 500	2243	1872	3152
11 Instalasi Genset	2	0	0	2	639 740 200	189 568 375	1327	1100	1754
12 Instalasi PLTS	2	0	0	0	516 004 300	8 596 000	597	551	1138
13 Perbaikan Gedung SD/ Ibtidaiyah	1	0	48	1	162 728 100	0	138	118	215
14 Pembuatan Gedung Taman Kanak-kanak	1	0	192	1	346 699 200	41 864 200	24	29	25
15 Pembuatan Gedung SD/ Ibtidaiyah	1	0	162	2	324 859 000	3 070 000	253	292	491
16 Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group	5	0	437	5	1 240 543 300	14 585 000	429	449	615
17 Pembuatan Taman Bermain	1	0	0	1	72 780 000	3 569 000	36	23	59
18 Pembuatan WC/ MCK/ Toilet di Sekolah	1	0	27	1	104 174 600	0	476	679	431
19 Pembuatan Perpustakaan	1	0	96	1	249 650 300	4 101 900	257	129	386
20 Pembuatan Prasarana Pendidikan	1	8	104	1	231 706 300	3 265 000	324	307	494
21 Sarana Sekolah/ Pendidikan Lainnya	1	0	0	1	31 579 000	1 500 000	45	35	66
22 Perbaikan Perpipaan	1	1800	0	0	349 950 200	118 966 400	822	805	1627
23 Pembuatan Gedung Posyandu	2	0	176	2	520 726 200	11 654 100	856	992	1615
24 Perlengkapan Tempat Kesehatan	1	0	0	1	24 383 000	0	115	88	54
25 PMT Lainnya	2	0	0	180	85 797 300	0	281	358	208
26 Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	12	0	0	15	452 573 000	0	0	342	324
27 Peningkatan Kapasitas Kelompok	5	0	0	5	299 806 300	2 995 000	204	207	368

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

c. Realisasi BLM

BLM PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2014 menurut kecamatan di Kabupaten Bulungan. Total alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan setelah pemotongan 11,8% sebesar Rp.10.050.000.000,-. Pemotongan dilakukan karena pemerintah pada tahun 2014 mengalami defisit anggaran. Namun dilain sisi, Pemerintah Kabupaten Bulungan menambah alokasi anggaran melalui P-APBD.

Dari total anggaran Kecamatan Peso Hilir dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah yang mendapatkan anggaran terbesar masing-masing sebesar Rp.1.850.000.000,-, sedangkan Kecamatan Tanjung Palas Utara yang terkecilnya sebesar Rp.700.000.000,-.

Tabel 4.13
Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Reguler TA. 2014 Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Alokasi BLM (Rp) sebelum pemotongan 11,8%			
	APBD	TTL APBD	APBN	Total BLM
Jumlah	1,790,000,000	2,764,680,000	7,285,320,000	10,050,000,000
Peso	150,000,000	244,400,000	705,600,000	950,000,000
Peso Ilir	350,000,000	527,000,000	1,323,000,000	1,850,000,000
Tanjung Palas	170,000,000	262,040,000	687,960,000	950,000,000
Tanjung Palas Barat	150,000,000	232,600,000	617,400,000	850,000,000
Tanjung Palas Utara	120,000,000	188,440,000	511,560,000	700,000,000
Tanjung Palas Timur	170,000,000	262,040,000	687,960,000	950,000,000
Tanjung Selor	160,000,000	247,320,000	652,680,000	900,000,000
Tanjung Palas Tengah	350,000,000	527,000,000	1,323,000,000	1,850,000,000
Sekatak	170,000,000	273,840,000	776,160,000	1,050,000,000

Sumber: data primer yang diolah, 2015

Tabel 4.14 menunjukkan realisasi penyaluran BLM PNPM Mandiri Perdesaan TA 2014 menurut kecamatan di Kabupaten Bulungan. Realisasi dari total anggaran sebesar Rp.10.050.000.000,- ke TPK adalah sebesar Rp.6.846.180.000,-. Dari Sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Palas Tengah terbesar realisasinya yaitu sebesar Rp.1.337.895.800,- ke TKP, sedangkan yang terkecil realisasinya adalah Kecamatan Tanjung Palas Barat sebesar Rp.150.000.000,-.

Tabel 4.14
Realisasi Penyaluran BLM PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2014 Menurut
Kecamatan di Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Realisasi Pencairan BLM (Rp) setelah pemotongan 11,8%				Realisasi Penyaluran ke TPK
	APBD	TTL APBD	APBN	TOTAL BLM	
Jumlah	1,790,000,000	2,764,680,000	7,285,320,000	10,050,000,000	6,846,180,000
Peso	150,000,000	244,400,000	705,600,000	950,000,000	702,631,600
Peso Ilir	350,000,000	527,000,000	1,323,000,000	1,850,000,000	1,077,927,300
Tanjung Palas	170,000,000	262,040,000	687,960,000	950,000,000	847,100,100
Tanjung Palas Barat	150,000,000	232,600,000	617,400,000	850,000,000	150,000,000
Tanjung Palas Utara	120,000,000	188,440,000	511,560,000	700,000,000	611,125,300
Tanjung Palas Timur	170,000,000	262,040,000	687,960,000	950,000,000	465,288,400
Tanjung Selor	160,000,000	247,320,000	652,680,000	900,000,000	604,211,500
Tanjung Palas Tengah	350,000,000	527,000,000	1,323,000,000	1,850,000,000	1,337,895,800
Sekatak	170,000,000	273,840,000	776,160,000	1,050,000,000	1,050,000,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

d. Realisasi DOK BLM PNPM Mandiri Perdesaan

Di Kabupaten Bulungan terdapat empat jenis DOK BLM PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun anggaran 2014 yaitu, DOK Reguler, DOK Integrasi, DOK PL, dan DOK RBM.

Tabel 4.15 menunjukkan realisasi pencairan dan penyaluran DOK Reguler BLM PNPM Mandiri Perdesaan TA 2014 menurut kecamatan di Kabupaten Bulungan. Total realisasi DOK Reguler PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp.746.360.000,- . DOK reguler diperuntukkan untuk menunjang operasional kegiatan pelaksanaan BLM PNPM Mandiri Perdesaan Reguler ke lokus kegiatan sebanyak 78 desa untuk sembilan kecamatan se-Kabupaten Bulungan (selain Kecamatan Bunyu). Untuk Kecamatan Sekatak yang paling banyak mendapatkan DOK Reguler yaitu sebanyak 22 lokus kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.146.793.000 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.146.793.000,- (100%). Kecamatan Tanjung Palas Tengah yang paling sedikit mendapatkan DOK regular hanya sebanyak 3 lokus kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.790.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.56.790.000,- (100%). Dilihat dari sisi penggunaan DOK regular tersebut, maka untuk menunjang pelaksanaan pada kegiatan pendampingan masyarakat terhadap pelaksanaan BLM PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan untuk sub kegiatan perencanaan, sub kegiatan pelatihan, sub kegiatan transportasi, dan lainnya capaian realisasi keuangannya hanya bisa mencapai Rp.454.309.500,- (60,87%) dari total anggaran.

Tabel 4.15
Realisasi Pencairan dan Penyaluran DOK Regular PNPM Mandiri Perdesaan
TA. 2014
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Jumlah Lokasi	Alokasi (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
Jumlah	78	746,360,000	746,360,000	100%
Peso	10	148,873,000	148,873,000	100%
Peso Ilir	6	63,170,000	63,170,000	100%
Tanjung Palas	9	69,549,000	69,549,000	100%
Tanjung Palas Barat	5	61,043,000	61,043,000	100%
Tanjung Palas Utara	6	63,170,000	63,170,000	100%
Tanjung Palas Timur	8	67,423,000	67,423,000	100%
Tanjung Selor	9	69,549,000	69,549,000	100%
Tanjung Palas Tengah	3	56,790,000	56,790,000	100%
Sekatak	22	146,793,000	146,793,000	100%

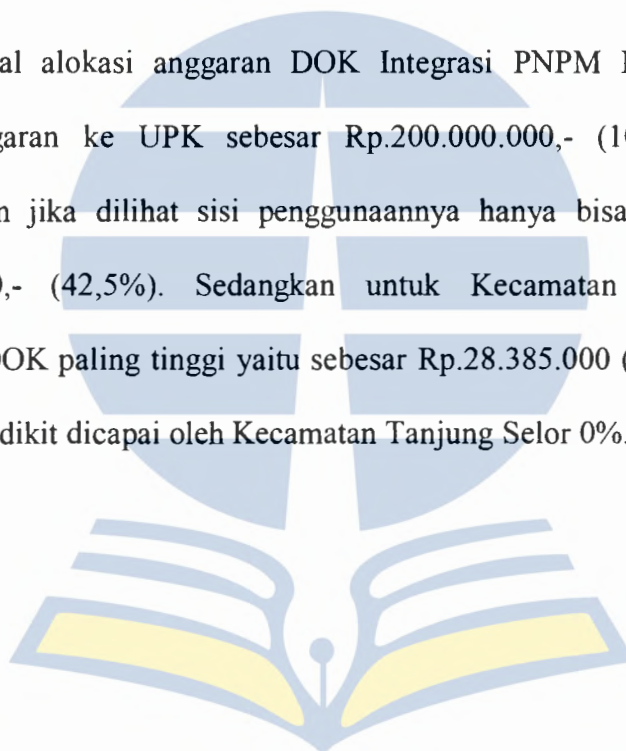
Lanjutan Tabel 4.15

PENGUNAAN (Rp)				TOTAL (Rp)	
Perencanaan	Pelatihan	Kegiatan Lain	Transportasi	Rp.	%
34,835,000	226,358,000	46,918,500	146,198,000	454,309,500	60.87%
11,850,000	42,048,000	2,700,000	27,900,000	84,498,000	56.8%
4,200,000	19,604,000	4,570,500	14,498,000	42,872,500	67.9%
4,900,000	25,925,000	3,097,000	20,030,000	53,952,000	77.6%
1,960,000	13,575,500	889,000	2,840,000	19,264,500	31.6%
5,025,000	23,288,000	2,358,000	11,790,000	42,461,000	67.2%
2,000,000	17,373,000	2,641,000	14,000,000	36,014,000	53.4%
1,800,000	23,989,500	1,450,000	16,100,000	43,339,500	62.3%
900,000	16,359,000	-	10,000,000	27,259,000	48.0%
2,200,000	44,196,000	29,213,000	29,040,000	104,649,000	71.3%

Sumber: data primer yang diolah, 2015

Tabel 4.16 menginformasikan realisasi pencairan dan penyaluran DOK Integrasi PNPM Mandiri Perdesaan menurut kecamatan di Kabupaten Bulungan untuk tahun anggaran 2014. Total anggaran DOK Integrasi sebesar Rp.200.000.000,- mencakup 81 desa, 10 kecamatan se-Kabupaten Bulungan. Dari 10 kecamatan tersebut, hanya di Kecamatan Sekatak yang paling besar mendapatkan alokasi anggaran yaitu sebesar Rp.29.800.000,- yang dilaksanakan untuk di 22 desa, sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Tanjung Palas yang dilaksanakan untuk di 9 desa.

Dari total alokasi anggaran DOK Integrasi PNPM Mandiri Perdesaan, realisasi anggaran ke UPK sebesar Rp.200.000.000,- (100%) dari alokasi anggaran. Dan jika dilihat sisi penggunaannya hanya bisa mencapai sebesar Rp.84.914.000,- (42,5%). Sedangkan untuk Kecamatan Sekatak realisasi penggunaan DOK paling tinggi yaitu sebesar Rp.28.385.000 (95%), dan realisasi yang paling sedikit dicapai oleh Kecamatan Tanjung Selor 0%.



Tabel 4.16
Realisasi Pencairan dan Penyaluran Dana Operasional Kegiatan (DOK) Integrasi
PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 Menurut Kecamatan di
Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Jml Desa	Alokasi	PENCAIRAN		PENGUNAAN	
			Rp.	%	Rp.	%
Jumlah	81	200,000,000	200,000,000	100%	84,914,000	42.5%
Peso	10	14,800,000	14,800,000	100%	3,500,000	23.6%
Peso Hilir	6	19,050,000	19,050,000	100%	12,827,000	67.3%
Tanjung Palas	9	13,425,000	13,425,000	100%	7,978,000	59.4%
Tanjung Palas Barat	5	15,825,000	15,825,000	100%	7,238,000	45.7%
Tanjung Palas Utara	6	18,450,000	18,450,000	100%	5,200,000	28.2%
Tanjung Palas Timur	8	18,580,000	18,580,000	100%	10,811,000	58.2%
Tanjung Selor	9	40,820,000	40,820,000	100%	-	0.0%
Tanjung Palas Tengah	3	10,575,000	10,575,000	100%	4,225,000	40.0%
Sekatak	22	29,800,000	29,800,000	100%	28,385,000	95.3%
Bunyu	3	18,675,000	18,675,000	100%	4,750,000	25.4%

Sumber: data primer yang diolah, 2015

Untuk DOK PL di Kabupaten Bulungan hanya terdapat di Kecamatan Tanjung Palas. DOK PL bertujuan untuk memperkuat dan mempertegaskan komitmen pelaku PNPM Mandiri Perdesaan khususnya untuk mendampingi kinerja peran UPK di Kecamatan Tanjung Palas yang dikenal pengelolaan UEP dan SPP berkinerja baik sebagai hasil kerja keras pelaku PNPM terutama peran pendamping masyarakat.

Total alokasi anggaran DOK PL UPK sebesar Rp.12.000.000,- yang diperuntukkan bagi 9 desa di Kecamatan Tanjung Palas, dengan realisasi pencairan dana dari Kas Daerah ke UPK sebesar Rp.12.000.000 (100%), kemudian disalurkan untuk membiayai operasional PK UPK hanya bisa mencapai Rp.7.165.000 (59,70%), saldo di UPK sebesar Rp.4.835.000 (40,29%).

Realisasi pencairan dan penyaluran DOK RBM (Ruang Belajar Masyarakat) PNPM Mandiri Perdesaan mencakup 10 kecamatan di Kabupaten dari kas daerah ke UPK Rp.150.000.000 (100%) dari total anggaran Rp.150.000.000. Akan tetapi realisasi penggunaannya DOK RBM hanya mencapai Rp.92.021.000 (61,30%), sehingga yang masih bersaldo di UPK sebesar Rp.57.979.000 (38,65%).

Dari empat jenis DOK PNPM Mandiri tersebut, capaian realisasi pencairan dana dari kas daerah ke UPK sebesar Rp.7240.000.000 (100%) dari pagu Rp.720.000.000, akan tetapi capaian realisasi penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan hanya bisa mencapai Rp.368.200.000 (50,86%), sehingga 49,14% masih berada di UPK.

Realisasi triwulanan BLM dan DOK PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan untuk tahun anggaran 2014 hanya peran pendampingan masyarakat terhadap suksesnya pelaksanaan PNPM Mandiri di Kabupaten Bulungan, terlihat pada Tabel 4.17 sebagai berikut: triwulan I (Januari s/d Maret 2014) realisasi 0%, triwulan II (Maret s/d Juni 2014) realisasi antara 0% s/d 100%, realisasi triwulan III (Juli s/d September 2014) antara 0% s/d 100%, dan triwulan IV (Oktober s/d Desember) realisasi telah mencapai 100% dari kas daerah ke UPK se-Kabupaten Bulungan.

Tabel 4.17
Realisasi Triwulanan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Bulungan

No	JENIS DANA BANSOS	TARGET TH 2014	SATUAN
I	BLM KEGIATAN APBN		
	BLM PNPM Mandiri Perdesaan Reguler	100%	Nilai
	BLM PNPM Mandiri Perdesaan Pilot Integrasi	100%	Nilai
II	BLM DOK APBN		
	DOK PNPM Mandiri Perdesaan Reguler	100%	Nilai
	DOK PNPM Mandiri Perdesaan Pilot Integrasi	100%	Nilai
	DOK PNPM Mandiri Perdesaan – RBM	100%	Nilai
	DOK PNPM Mandiri Perdesaan - PL UPK	100%	Nilai
III	DDUB		
	DDUB BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Reguler	100%	Nilai
	DDUB TAMBAHAN BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Reguler	100%	Nilai
	DDUB BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan INTEGRASI SPP-SPPN	100%	Nilai
	DDUB TAMBAHAN BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN	100%	Nilai

Lanjutan Tabel 4.17

Realisasi Per triwulan (%)							
TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4 (%)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
10%	0%	50%	43.00%	80%	67%	100%	100%
0%	0%	60%	55.00%	95%	74%	100%	100%
40%	0%	60%	40.00%	80%	73%	100%	100%
40%	0%	100%	60.00%	100%	100%	100%	100%
40%	0%	60%	0%	80%	100%	100%	100%
100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10%	0%	40%	0.00%	80%	0%	100%	100%
10%		40%		80%		100%	100%
10%	0%	40%	0%	80%	0%	100%	100%
10%		40%		80%		100%	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2015

e. Realisasi SPP dan UEP

Dari modal awal SPP hanya sebesar Rp.14.346.800.000 sekarang aset produktifnya bisa mencapai Rp.19.742.011.472 atau mengalami pertumbuhan aset sebesar 37,61%. Sedangkan modal awal UEP hanya sebesar Rp.31.000.000, sekarang aset produktifnya bisa mencapai Rp.82.266.255 atau mengalami pertumbuhan aset sebesar 165,38%. Kedua usaha bisnis ini paling besar kontribusinyamenyumbang kemandirian perekonomian bagi masyarakat

perdesaan di Kabupaten Bulungan dibanding usaha sejenis untuk tiga kabupaten lainnya di Kalimantan Utara. Keberhasilan ini, telah membuktikan bahwa peran pendampingan masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten untuk kegiatan UEP dan SPP sangat berperan, terutama memaksimalkan peran perempuan di desa sebagai pilar utama pembangunan dalam sektor usaha produktif perempuan sehingga bisa menjadi penopang ekonomi keluarga bagi masyarakat perdesaan dan sekaligus membantu para suami untuk mengurangi pengeluaran bagi keluarga miskin di perdesaan yang selama ini peran perempuan desa hanya dibayar dengan upah yang tidak memadai bahkan hanya dianggap beban keluarga.

Total keseluruhan modal awal SPP dan UEP di Kaltara sebesar masing-masing hanya sebesar Rp.30.078.442.224 dan Rp.167.500.000 sekarang telah menjadi aset produktif untuk SPP sebesar Rp.39.930.040.368 dan UEP sebesar Rp.281.690.440 atau dengan kata lain SPP 32,75% dan UEP 68,17% (Tabel 4.18).

Tabel 4.18
Realisasi Pertumbuhan SPP dan UEP PNPM Mandiri Perdesaan
Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Bulungan

No	Kabupaten	MODAL AWAL (Rp)		ASSET PRODUKTIF (Rp)		% PERTUMBUHAN	
		SPP	UEP	SPP	UEP	SPP	UEP
1	Bulungan	14,346,800,000	31,000,000	19,742,011,472	82,266,255	37.61%	165.38%
2	Nunukan	8,000,110,324	136,500,000	10,392,259,879	199,424,185	29.90%	46.10%
3	Malinau	5,440,200,000		6,499,449,746		19.47%	
4	Tana Tidung	2,291,331,900		3,296,319,271		43.86%	
TOTAL		30,078,442,224	167,500,000	39,930,040,368	281,690,440	32.75%	68.17%

Sumber: data primer yang diolah, 2015

f. UPK

UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan. UPK bekerja sesuai operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada program PNPM Mandiri Perdesaan. UPK

merupakan salah satu mitra kerja bagi pendampingan masyarakat untuk melaksanakan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan, baik untuk melaksanakan BLM untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan maupun DOK BLM kegiatan sebagai biaya operasional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BLM di Kabupaten Bulungan. UPK dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat perdesaan yang berkedudukan di tingkat kecamatan. Melalui UPK kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan sampai dengan evaluasi, agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan direalisasikan sesuai target pelaksanaan kegiatan. Alokasi dana BLM baik BLM untuk kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perekonomian perdesaan maupun DOK BLM untuk menunjang operasional kegiatan fisik, dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bulungan disalurkan.

g. Pendamping Masyarakat di Kabupaten Bulungan

Pendamping masyarakat (fasilitator) pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan pada tahun anggaran 2014 dibiaya melalui dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Bappeda Provinsi Kalimantan Utara.

Pendamping masyarakat ditempatkan dilokasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari ibukota Kabupaten di Tanjung Selor hingga sampai di lokus kegiatan.

Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Bappeda Provinsi Kalimantan Utara telah menempatkan 24 orang tenaga pendamping masyarakat untuk melaksanakan

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan, namun pada awal bulan Agustus hanya tinggal 18 orang pendamping masyarakat saja, 6 orang mengundurkan diri, 1 orang mengundurkan diri karena promosi menjadi koordinator provinsi yang digaji langsung oleh konsultan pusat, 1 orang mengundurkan diri karena mengurus orang tua yang sedang sakit keras di kampung, dan 4 orang diberhentikan karena tidak disiplin.

Tabel 4.19 yang menjelaskan tenaga pendamping masyarakat (fasilitator) di Kabupaten Bulungan yang terdiri dari fasilitator teknik kabupaten (FTK), fasilitator keuangan kabupaten (FKK), fasilitator teknik kecamatan (FTK) dan fasilitator pemberdayaan kecamatan (FPK) yang ditempatkan untuk 9 kecamatan kecuali Kecamatan Bunyu.

Tabel. 4.19
Data Pendampingan Masyarakat di Kabupaten Bulungan

No	N a m a	Posisi	Lokasi Penempatan	Kategori Lokasi
1	Sjuhaily Kasim, ST	FTK	Tanjung Selor	Sangat sulit
2	Aniros, S.Sos	FKK	Tanjung Selor	Sangat sulit
3	Fauzan Eka Putra, ST	FTK	Peso Hilir	Sangat sulit
4	Esrawati, A.Md	FTK	Tanjung Selor	Sangat sulit
5	Iva Mary Gutriani, SE	FPK	Tanjung Palas Utara	Sangat sulit
6	Muhammad Riduan, SE	FPK	Tanjung Palas Timur	Sangat sulit
7	Hendrik Sonda Turan, S.Pd	FPK	Peso	Ekstrim
8	Deidi Isman, ST	FTK	Tanjung Palas Barat	Ekstrim
9	Suparlan, S.E,M.B.A	FPK	Tanjung Palas Tengah	Sangat sulit
10	Elisabeth Rara Layuk P, ST	FTK	Tanjung Palas	Sangat sulit
11	Yunarto Rombbunga, ST	FTK	Tanjung Palas Timur	Sangat sulit
12	Zahir, SE	FPK	Peso	Ekstrim
13	Pither Sapan Sarimandi, ST	FTK	Tanjung Palas Utara	Sangat sulit
14	Didik Purwanto, A.Md	FPK	Tanjung Palas	Sangat sulit
15	Novel, S.Pd	FPK	Peso Hilir	Sangat sulit
16	Mutanto Eka Saputro, ST	FTK	Tanjung Palas Tengah	Sangat sulit
17	Mursyid, ST	FTK	Sekatak	Ekstrim
18	Halimah, S.Pd	FPK	Tanjung Selor	Sangat sulit

Sumber: data primer yang diolah, 2015

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pentingnya Peran Pendampingan Pada Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan

Berdasarkan hasil wawancara dan interview yang dilakukan oleh peneliti dilapangan secara mendalam dan mendetail terhadap informan, maka untuk menginterpretasi peran pendamping masyarakat pada program PNPM MP di Kabupaten Bulungan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan pendekatan rasio antara prosentase realisasi dengan prosentase target dari peran yang telah dilakukan oleh pendamping masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan.

Pedoman pendamping dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan, terdapat 28 (dua puluh delapan) item indikator capaian pendamping masyarakat pada program pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Indikator sebagaimana dimaksud dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan pelestarian. Indikator-indikator peran pendamping masyarakat tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (2009:104-106), lebih dalam menjelaskan bahwa bagi para pekerja sosial dilapangan, kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendamping sosial, terdapat 5 (lima) kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial, yaitu: motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri, mobilisasi sumber, pembangunan dan pengembangan jaringan.

Dari 28 item indikator tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator pendamping masyarakat terhadap pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten ada yang dengan kriteria kinerja plus, sesuai target, dan perhatian khusus. Berikut ini dijelaskan kelima unsur peran pendamping masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan.

a. Motivasi

Pada unsur motivasi, peran yang dilakukan oleh pendamping masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan, dari 28 item indikator terdapat lima indikator peran yang masuk dalam unsur motivasi diantaranya yaitu pembentukan kelompok SPP (simpanpinjamperempuan), pembentukan kelompok Unit Pengelola Kecamatan (UPK), Perempuan berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan Keputusan, Masyarakat miskin berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan, Melakukan Supervisi lokasi ekstrem.

Pada indikator pembentukan kelompok simpan pinjam perempuan ternyata peran pendamping belum sepenuhnya dapat menyakinkan atau memotivasi kaum perempuan untuk meningkatkan kesejateraan dengan memanfaatkan modal yang telah disediakan dalam program PNPM Mandiri Perdesaan, dengan membentuk kelompok dan sistem dana bergulir sebagaimana yang ditentukan dalam pedoman umum pemanfaatan dana alokasi SPP. Alasannya adalah kebiasaan masyarakat selama ini menggunakan dana bergulir secara individu, sedangkan faktor lainnya adalah system SPP berkelompok akan dikenakan sanksi tanggung renteng jika ada anggota yang tidak taat membayar

sesuai ketentuan. Hal ini sesuai dengan disampaikan oleh Informan (Titus Bassa, September 2015) sebagai berikut:

“Tingkat keberhasilan program SPP selain dilihat dari tingkat presentasi pembayaran juga persentasi tingkat kemacetan dan usaha yang didanai oleh program SPP. Oleh karena itu target kita adalah nol persen tunggakan itu merupakan tugas berat bagi pengguna kelompok dan Pendamping dalam mengelola dana SPP. Demikian pula administrasi, lebih perlu dibuatkan surat pernyataan apabila menunggak ditempuh melalui proses hukum, karena dana SPP dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebelum ke proses hukum langkah yang dapat ditempuh untuk menagih kredit macet yaitu menyertakan pemuka adat dan tokoh agama maupun perangkat desa, kita tidak mengharapkan kredit ini menjadi masalah bagi keluarga penerima, melainkan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Rumah Tangga Miskin (RTM)”.

Perjalanan SPP program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan memang sedikit agak unik disebabkan karena adanya yang pro dan kontra tentang pelaksanaannya sebagaimana disampaikan oleh salah satu pengurus UPK Kecamatan Sekatak (ERNI, September 2015) ketika diwawancara sebagai berikut :

“Masyarakat masih ada yang pro dan kontra terhadap SPP, banyak masyarakat yang masih tertutup dengan program dan juga banyak masyarakat yang harus diberikan pemahaman terhadap program. Belum lagi dengan masalah administrasi di kantor UPK yang semakin menumpuk dikarenakan banyaknya administrasi dari desa ke kantor UPK yang harus terus dipantau dan juga masalah SPP dimana masyarakat belum sepenuhnya memahami pengelolaan dana bergulir yang mengakibatkan masyarakat tak mampu mengembalikan pinjaman SPP tersebut. Dengan adanya harapan yang besar dari para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan khususnya UPK yang dibantu oleh FK/FT (fasilitator kecamatan/fasilitator Teknik, untuk mendongkakan citra PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sekatak kami meyakini perubahan tersebut tinggal masalah waktu”.

Melihat pernyataan kedua informan tersebut diatas, masih perlu kerja keras untuk memberikan pemahaman maksud dari program kepada masyarakat

terkait dengan pelaksanaan SPP di lokasi Kecamatan Sekatak. Lebih lanjut Camat Tanjung Selor (Erwin, September 2015) mengatakan:

“Masyarakat pada umumnya tidak paham tentang Pedoman Umum kegiatan, mereka maunya tidak terlalu banyak berurusan dengan administrasi, apalagi pertanggungjawaban, hal ini mengakibatkan banyak celah dalam kegiatan SPP dan UEP, peran pendamping sebaiknya dimaksimalkan untuk mengatasi persoalan tersebut”.

Pada indikator pembentukan Unit Pengelola Kecamatan (UPK) peran pendamping masih belum dapat sesuai dengan target karena sulitnya memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam pembentukan UPK, terutama masalah tingkat pendidikan pengurus UPK. Personil UPK yang memenuhi persyaratan pun rawan meninggalkan tugasnya karena lebih memilih pekerjaan yang memberikan penghasilan lebih tinggi dibandingkan sebagai pengurus UPK pada program PNPM Mandiri Perdesaan. Artinya duduk sebagai pengurus dalam kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan hanya sebagai batu loncatan dalam mencari lowongan pekerjaan yang lebih menjanjikan. Akibatnya banyak kelembagaan UPK yang sering berganti-ganti kepengurusannya akibat personil UPK yang mengundurkan diri sehingga dinyatakan sebagai UPK yang tidak sehat. Hal ini dibenarkan oleh PJOK Kabupaten Bulungan (Hanafiah, September 2015) sebagai berikut:

“UPK ini sebenarnya sangat strategis dan vital fungsinya dalam program, makanya banyak persyaratan untuk menjadi pengurus UPK. Permasalahannya adalah tidak gampang mencari sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam pedoman umum. Jadi pergantian UPK yang sering ditinggalkan pengurusnya, operasional UPK yang cukup tinggi karena factor geografis dan karena berbagai alasan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Artinya pengurus yang mengganti juga perlu belajar lagi dan menyesuaikan. Tugas teman-teman pendamping semakin bertambah sementara waktunya tetap berjalan. Para pendamping sebenarnya menginginkan bagaimana mereka bisa bertahan minimal dalam 1 tahun pelaksanaan kegiatan”.

Sedang indikator Perempuan berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan Keputusan peran pendampingan belum dapat sepenuhnya meyakinkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada musrenbang sangat menentukan. Sebagaimana disampaikan Korprov (Agus Nugroho, September 2015) sebagai berikut:

“PNPM ingin mengajak perempuan untuk masuk ke ranah publik. Pengambilan keputusan membutuhkan kapasitas tertentu. Kadang-kadang kita sudah tahu apa yang kita mau tapi untuk menyuarakannya kita masih harus memperjuangkannya, misalnya dengan mencari argumentasinya. Untuk itu kita harus mempunyai kapasitas. Nah, PNPM ini melatih perempuan supaya punya kapasitas untuk ikut dalam pengambilan keputusan di wilayahnya dalam hal ini desa, bahkan di tingkat kecamatan. Mengenai permasalahan kelompok SPP yang dinilai matang, memang ada aturannya karena memang disebut matang jika sudah memenuhi persyaratan, misalnya pengurus, aturan kelompok dan iuran anggota” jelas Agus.

Rasa pesimis bagi kaum perempuan terjadi akibat selama ini proses musrenbang dianggap hanya sebagai formalitas belaka yang tak pernah terwujud dalam bentuk kegiatan dan penentu keputusan biasanya hanyalah elit-elit desa sajayang tidak pernah berpihak terhadap kepentingan kaum perempuan. Tetapi jika program ini berlanjut serta ada yang menggerakkan akan ada kemungkinan perubahan mendasar keterlibatan perempuan dalam tahapan pembangunan semakin besar.

Peran pendampingan dengan kriteria sesuai target adalah banyaknya jumlah masyarakat miskin yang berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan PNPM MP dan melakukan supervisi ke kecamatan lokasi ekstrim yaitu di Kecamatan Peso dan Kecamatan Sekatak.

Capaian peran pendamping masyarakat tersebut diatas sangat membanggakan karena keberhasilan program PNPM Mandiri Perdesaan adalah jika semakin banyaknya masyarakat miskin yang terlibat langsung dari proses perencanaan dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Peran Pendampingan dalam hal ini dapat meyakinkan bahwa masyarakat saat ini bukan lagi sebagai objek pembangunan tetapi juga sudah menjadi subyek atau pelaku pembangunan itu sendiri dengan mereka terlibat langsung dari proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemeliharaan dan pelestarian. Masyarakat miskin kini merasa dihargai dengan potensi dan sumber daya yang mereka memiliki apa adanya. Hal ini didukung oleh Kepala Desa Jelarai Tengah (Timotius, September 2015):

“Pola kegiatan seperti ini sebenarnya yang diinginkan masyarakat, karena disamping mereka dapat uang, mereka juga yang memakai apa yang mereka buat, tentu hasilnya akan maksimallah karena setiap saat mereka gunakan dan lihat sendiri pekerjaannya kalau tidak bagus”.

Indikator lainnya adalah bagaimana peran pendampingan masyarakat dapat memberi motivasi bagi seluruh masyarakat untuk membangun tanpa dibatasi waktu dan ruang serta letak geografis yang ekstrem atau sangat sulit. Kabupaten Bulungan memiliki 2 kecamatan extreme yaitu Kecamatan Peso dan Kecamatan Sekatak, namun program PNPM Mandiri Perdesaan dapat terlaksana dengan baik. Komitmen pendamping tentang itu masih tergolong cukup tinggi sebagaimana pernyataan pendamping (Agus Nugroho, September 2015) sebagai berikut:

“Untuk Kabupaten Bulungan terdapat 2 (dua) lokasi ekstrim yaitu Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Peso, tetapi supervisi tetap kita laksanakan secara berkala di wilayah tersebut, tidak ada alasan untuk tidak mampu melakukannya karena kita juga disana sangat diharap oleh masyarakat untuk membantu mereka dan itu juga modal besar bagi kami untuk tidak meninggalkan lokasi ekstrim meski membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra”. Dan mereka juga berhak untuk dapat menikmati hasil kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan. Berikut Tabel 4.2 Peran Pendampingan Masyarakat dengan Indikator Motivasi.

Tabel 4.22
Peran Pendamping Masyarakat Untuk Unsur Motivasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah	Target	Realisasi	Keterangan
1	Kelompok SPP yang dinilai matang	Kelompok	826	83	16	Perhatian khusus
2	UPK yang dinilai sehat	Kec	8	6	4	Perhatian khusus
3	Supervisi lokasi ekstrem	Kec Ekstrem	2	2	2	Sesuai target
4	Masyarakat miskin berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan	Jumlah Kehadiran (Org)	24.222	24.222	24.222	Sesuai target
	- Total Kehadiran	orang	17.617	17.617	17.617	
	- Total Masyarakat Miskin	orang	6.605	6.605	6.605	
5	Perempuan berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan Keputusan	Jumlah Kehadiran (Org)	38.745	28.413	25.830	Perhatian khusus
	- Total Kehadiran	orang	26.426	19.379	17.617	
	- Total partisipasi perempuan	orang	12.320	9.034	8.213	

Sumber : data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut diatas, sesuai dengan aplikasi Kementerian Dalam Negeri, peran pendampingan masyarakat pada program PNPM Mandiri Perdesaan dengan indikator Motivasi terdapat 3 indikator yang perlu mendapat perhatian khusus karena tidak sesuai dengan realisasi dilapangan, dan 2 indikator dengan kategori sesuai target karena memang tercapai realisasi sesuai dengan yang diharapkan.

b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat bukan lagi merupakan program baru termasuk di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Telah banyak program pusat dan daerah yang mengadopsi program tersebut. Namun demikian, bukan berarti peningkatan kapasitas bukan sesuatu yang gampang. Namun sebaliknya, peningkatan kapasitas serta pemahaman program perlu bagi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

ditingkatkan. Dalam rangka pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan, maka rangkaian pelatihan untuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengacu pada arah dan kebijakan kegiatan peningkatan kapasitas yang fokus pada upaya untuk mempersiapkan pelaku-pelaku ditingkat masyarakat memberikan penyadaran kritis terhadap peran dan fungsi pelaku untuk menjamin keberlanjutan pembangunan partisipatif dengan pola yang dilembagakan di PNPM Mandiri Perdesaan. Sifat dari pelatihan adalah meningkatkan kapasitas sehingga terjadi kemandirian yang ditandai dengan perubahan sikap, penambahan wawasan/pengetahuan dan ketrampilan, meskipun sulit untuk mewujudkannya.

Pada indikator Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan, peran pendampingan masyarakat terhadap pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan dari 28 item indikator kinerja kegiatan peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan terdapat lima indikator yaitu terlaksananya berbagai pelatihan masyarakat dengan kategori perhatian khusus. Peran Pendampingan Masyarakat pada kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah ditetapkan oleh camat tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan karena disebabkan banyak hal diantaranya adalah terganggunya aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari untuk mencari nafkah, timbulnya kejenuhan di kalangan masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang berulang-ulang serta dari segi jumlah pendampingan yang kurang memadai kuantitasnya, dan sulitnya mengatur waktu yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini mendapat respon dari Kepala BPMD Kabupaten Bulungan (H. Mansyur, September) sebagai berikut:

“Kita selama ini menyadari bahwa permasalahan utama dalam pembangunan ini karena terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di

perdesaan, oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut kita buatlah program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dipedesaan termasuk dalam program PNPM Mandiri Perdesaan. Anggaran yang cukup kita sediakan untuk program tersebut. Pemerintah selama ini berpikir bahwa sebesar apapun dana yang diluncurkan ke desa tidak akan membawa dampak yang cukup berarti jika kapasitas SDM perdesaan meningkat. Pelatihan-pelatihan yang diberikan termasuk oleh pendamping dan kader di desa sebenarnya untuk merubah pola pikir dan wawasan masyarakat. Memang banyak kendala yang dihadapi termasuk masalah waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan waktunya masyarakat, misalnya kebanyakan masyarakat itu ada bukan hari kerjanya pegawai, adanya masyarakat di kampung pada hari minggu juga merasa terganggu waktu mereka untuk mencari nafkah sehari-hari, inilah tantangan teman pendamping dilapangan”.

Pada indikator peran pendampingan dalam pembuatan laporan berdasarkan aplikasi oleh provinsi belum dapat terlaksana disebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk dan melaksanakan operasional pemerintahan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada Bulan Juli tahun 2013, dimana sebelumnya aplikasi tersebut melekat pada Provinsi Kalimantan Timur. Serah terima satuan kerja PNPM Mandiri Perdesaan dari satuan kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2013. Permasalahan lainnya adalah satuan kerja sebagai leading sektor PNPM Mandiri Perdesaan belum terbentuk sebagaimana pada provinsi lainnya yang berada pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Untuk Provinsi Kalimantan Utara, satuan kerja sebagai leading sektor PNPM Mandiri Perdesaan untuk sementara waktu berada pada satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Hal tersebut mengakibatkan peran pendamping masyarakat dalam laporan program berdasarkan aplikasi provinsi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibenarkan Informan Sdr. Syamsaimun sebagai berikut:

“Hal itu benar pak...kan Kalimantan Utara ini baru terbentuk kurang lebih 6 bulan, sejak serah terima Satker dari Kaltim, jadi kami masih tahap belajar juga pada waktu itu, namun kami prioritaskan bagaimana PNPM Mandiri Perdesaan itu jalan dulu sebagaimana adanya, para teman-teman dilapangan dapat gaji tiap bulan, BLMnya dapat lancar, persoalan aplikasi nanti dulu, kita memakai manual saja, karena keterbatasan fasilitas kantor, satker juga belum memiliki ruangan representatif, personil masih tidak ada, yang jelas banyaklah hambatan tentang itu, termasuk masalah mutasi yang relative singkat di Satker Bappeda selaku Saktker yang ditunjuk, tadinya bukan saya yang jadi PJOK-nya, ditengah tahun baru kita sama-sama laksanakan dengan tim yang lain. Intinya dapat berjalan meskipun tertatih-tatih. Kita sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman pendamping masyarakat (fasilitator) ini untuk membantu di sekretariat Provinsi bahkan kita tarik dari Kabupaten mereka yang berpengalaman tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini. Jadi, tenaga dan pikiran pendamping masyarakat yang kita miliki tersebut, bersama dengan rekan-rekan konsultan pada Satker PNPM Mandiri Perdesaan Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, dimanfaatkan keberadaannya semaksimal mungkin untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada waktu itu”.

Berbeda dengan pembuatan website kabupaten Bulungan yang sesuai dengan kategori sesuai target. Hal ini karena memang program Kabupaten yang menampilkan perkembangan pelaksanaan di website kabupaten telah dilaksanakan sejak program PNPM Mandiri Perdesaan berjalan yaitu pada tahun 2007 ketika dicanangkannya program PNPM Mandiri.

Pada indikator peran pendampingan dalam Supervisi dan Monitoring oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dapat melebihi target disebabkan kecamatan sebagai lokus program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan pada 9 kecamatan dapat terjangkau, kelembagaan BKAD yang lebih lengkap meskipun pendanaan yang relatif terbatas tetapi dapat dimaksimalkan. Hal ini dibenarkan oleh Informan (Hanafiah, PJOK Bulungan, September 2015) yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa sejak mereka di SK-kan oleh Bupati Bulungan, maka mereka terpenggil hati nuraninya untuk membangun desa mereka masing-masing. Salah satu upaya untuk mengatasi hambatan dan kesulitan dalam

melaksanakan program PNPM Mandiri Perdesaa didesa mereka masing-masing adalah melalui kegiatan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut. BKAD berupaya maksimal mensinergikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan terhadap semua pelaku, termasuk bagaimana untuk mempercepat dan mengeksekusi kegiatan. Jika dalam proses tersebut juga terkendala, maka kendala tersebut didiskusikan kepada pihak terkait yang lebih berpengalaman termasuk dalam hal ini pendamping masyarakat. Karena pendamping masyarakat merupakan jembatan informasi bagi masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan. Mereka dapat dikatakan sebagai corong informasi bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan. Dan apabila juga masih belum bisa diputuskan untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, maka BKAD melalui pendampingan masyarakat akan membawa permasalahan tersebut ke tingkat rapat koordinasi, baik tingkat kecamatan, kabupaten hingga ke provinsi termasuk pusat. Selain itu juga, tim koordinasi akan melakukan supervise dan monitoring ke lapangan sebagai umpan balik dari hasil koordinasi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua pihak terlibat langsung dan sangat peduli terhadap pelaksanaan pembangunan di lokus PNPM Mandiri Perdesaan tersebut. Sehingga semua program/kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan dapat berjalan dengan lancar, aman dan tepat waktu sesuai perencanaan yang telah disusun/disepakati”.

Sedangkan peran pendampingan masyarakat pada indikator Desa melakukan tinjauan ulang terhadap RPJMDesa dan RKPDes dapat melebihi target disebabkan adanya ketentuan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk melakukan revisi RPJMDesa yang tidak sesuai sebagai langkah awal memulai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Persoalan lainnya adalah pada umumnya desa-desa di Kabupaten Bulungan belum memiliki RPJMDes. Dengan memanfaatkan peran pendamping masyarakat melalui program PNPM Mandiri Perdesaan, hampir seluruh desa di Kabupaten Bulungan memiliki RPJMDes. Maka merupakan suatu prestasi bagi pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bulungan dengan masuknya Program PNPM Mandiri Perdesaan yang mengharuskan mereka dilatih dalam penyusunan RPJMDes serta RKPDes. Hal ini

didukung dan dibenarkan oleh Informan (Agus Nugroho, September 2015) yang mengatakan sebagai berikut:

“Di Kabupaten Bulungan seluruh desa sudah mempunyai RPJMDesa yang di-support dengan dana Operasional kegiatan (DOK) Program pengembangan system pembangunan partisipatif (P2SPP) yang di tahun 2011 menjadi PNPM Integrasi. PNPM Integrasi ini dalam upaya menguatkan proses pembangunan regular (musrenbang), dengan slogan “satu perencanaan untuk semua” diharapkan kedepan pada saat musrenbang sudah dapat diputuskan kegiatan apa saja yang akan didanai oleh PNPM, ADD, Swadaya, CSR, atau kegiatan yang akan didanai oleh APBD sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta efektifitas perencanaan dari bawah (*Bottom Up Planning*) yang tertuang di dalam RPJMDesa”.

Proses perencanaan pembangunan sebenarnya telah diatur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan desa, namun harus diakui bahwa pada tatanan lapangan masih banyak kekurangan dan kelemahan undang-undang tersebut sehingga perencanaan partisipatif selama ini dianggap sebagai formalitas belaka. Lahirnya Program PNPM Mandiri Perdesaan mewujudkan sistem pelaksanaan undang – undang tersebut dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Pada hakikatnya yang mengerti kebutuhan sangat prioritas dan urgent adalah pemanfaat program itu sendiri yaitu masyarakat miskin yang ada diperdesaan. Mereka miskin karena kebijakan belum berpihak terhadap mereka sebelumnya, dan mereka berharap tahun mendatang kelemahan dalam perencanaan yang telah mereka eksekusi bisa lebih baik lagi dengan belajar dari tahun berjalan ini. Akan tetapi melalui pogram PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan yang mengaktifkan peran pendamping masyarakat, telah membuktikan, bahwa program/kegiatan yang selama ini sulit

direalisasikan oleh pemerintah yang sebelumnya tanpa menggunakan program PNPM Mandiri Perdesaan, mereka bisa merealisasikannya. Bahkan mereka terlibat proaktif dalam gerakan membangun desa, mulai dari perencanaan hingga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Proses pembelajaran untuk masyarakat melalui program PNPM Mandiri Perdesaan patut diapresiasi, selain memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan telah diawali dengan peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat melalui transfer ilmu dari para tenaga pendamping.

Tabel 4.23
Peran Pendampingan Masyarakat Indikator Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah	Target	Realisasi	Keterangan
1	Terlaksana Pelatihan Masyarakat sesuai SPC	Jenis Pelatihan	118	118	97	Perhatian khusus
2	Kabupaten yang menampilkan perkembangan pelaksanaan di website Kab	Kab	1	1	1	Sesuai target
3	Laporan Program berdasarkan Aplikasi Oleh Provinsi	Jumlah Aplikasi	1	1	0	Perhatian khusus
4	Supervisi dan monitoring oleh BKAD	Kec	9	6	7	Kinerja plus
5	Desa melakukan Tinjauan ulang terhadap RPJMDesa dan RKPDes (Desa Partisipasi)	Desa	71	54	57	Kinerja plus

Sumber : data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel tersebut diatas, peran pendamping masyarakat pada lima indikator yang merupakan bagian dari unsur peran pendamping masyarakat untuk indikator kesadaran dan pelatihan kemampuan terhadap program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan belum secara keseluruhan sesuai target sebagaimana yang diharapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, namun banyak

hal yang perlu diapresiasi terhadap capaian indikator tersebut yang realisasinya melebihi target yang ditentukan dilapangan.

c. ManajemenDiri

Otoritas mencakup wewenang melakukan fungsi pembentukan kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi termasuk melaksanakan audit merupakan satu bentuk penguatan kelembagaan yang memberi kesempatan yang sama bagi semua pelaku untuk mengerjakan aktifitas, menghasilkan variasi dan kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan dianggap berhasil karena antusias masyarakat yang tinggi.

Berfungsinya kelembagaan yang terbentuk pada program PNPM Mandiri Perdesaan bilamana tugas pokok dan fungsi tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan. Pada capaian indikator manajemen diri dapat dilihat bagaimana peran pendampingan masyarakat pada kelembagaan Badan Pengawas (BP) UPK melaksanakan fungsi Audit yang menghasilkan laporan audit terhadap UPK. Artinya BP-UPK minimal dalam 1 kali dalam setahun melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan, disamping ketaatan kelembagaan tersebut pada aturan-aturan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan ternyata belum semua BP UPK mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara totalitas karena masih terdapat 3 (tiga) kecamatan yang tidak melaksanakan fungsi audit internal minimal 1 kali dalam setahun, oleh karena itu capaian indikator menjadi perhatian khusus di Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat terjadi

karena BP UPK belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi sebagai bagian dari BP UPK. Persoalan lainnya adalah keengganan BP UPK untuk melaksanakan audit disebabkan adanya hubungan kekeluargaan antar lembaga yang ada sehingga mekanisme pelaksanaan audit dan pengawasan diberbagai tempat menjadi seremonial belaka. Dampaknya adalah terdapatnya kekeliruan yang terjadi pada proses administrasi yang menimbulkan berbagai peluang curang. Hal ini dibenarkan oleh informan Syamsaimun (September, 2015) yang menyatakan sebagai berikut:

“Memang benar, ada kecenderungan dalam merekrut BP-UPK makna kekeluargaan dan gotong royong disalah artikan oleh sebagian masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan terutama oknum pemerintahan. Oleh sebab itu, fungsi audit internal belum berjalan maksimal. Sebenarnya bisa saja anggota keluarga terdekat yang terlibat yang direkrut dalam BP-UPK, namun profesionalisme dan integrasi BP-UPK harus diutamakan. Jika hal ini bisa dilakukan, dapat dipastikan ladang bisnis masyarakat di perdesaan Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh UPK bisa menjadi katalisator penerimaan PAD di desa. Mengingat potensi desa di Kabupaten Bulungan sangat melimpah ruah, namun belum optimal dikelolah oleh aparatur melalui UPK dan BP-UPK yang mengaudit UPK terkesan belum sesuai dengan harapan bersama. Ke depan pola seperti ini perlu kita sikapi dengan saksama dan bijaksana. Sikap perubahan positif BK UPK terlihat jika mereka mau berubah dari sikap, tindakan dan upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan UPK di Kabupaten Bulungan. Jika tidak, maka penggantian anggota BK UPK harus segera dilakukan tanpa harus menunggu bertambahnya permasalahan baru, agar UPK sebagai lading bisnis di desa dapat bekerja optimal untuk melayani bisnis masyarakat di seluruh perdesaan Kabupaten Bulungan ini “.

Untuk melaksanakan audit, BP-UPK telah dibekali pengetahuan teknis baik melalui pelatihan dan bimtek yang dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan, baik di tingkat kecamatan, kabupaten termasuk provinsi di Kalimantan Utara. Kegiatan ini bertujuan agar proses alih pengetahuan dan keberpihakan masyarakat perdesaan secara massif bisa menggerakan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bulungan, termasuk pembangunan sector

ekonomi produktif bagi masyarakat. BP UPK sebagai pengawas bisnis usaha tingkat perdesaan yang ada di Kabupaten Bulungan, berupaya memaksimalkan perannya, untuk mendorong dan mendukung setiap rencana kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah bersama-sama masyarakat perdesaan. Oleh sebab itu, BP UPK yang ada di Kabupaten Bulungan melakukan kegiatan ini berproses belajar dan terus belajar untuk memperbaiki setiap kesalahan didalam mengawasi UPK yang ada. Akibatnya, dalam proses tersebut, BP UPK dinilai perlu perhatian khusus oleh pendamping masyarakat. Dalam hal ini pendamping masyarakat telah melakukan perannya secara optimal, namun dalam penentuan dan pengambil keputusan untuk ditetapkan oleh Bupati Bulungan sebagai pengurus BP UPK unsur kekeluargaan dan kekerabatan masih terlihat nyata di perdesaan. Hal ini didukung dan dibenarkan oleh informan Kepala Desa (Timotius, September 2015) yang menyatakan bahwa :

“Di alam demokrasi, terutama di tingkat perdesaan, masing-masing calon kepala desa sangat rentan terhadap janji politiknya sebelum terpilih menjadi kepala desa. Salah satunya adalah memberikan peluang dan kesempatan kepada keluarga atau sahabat terdekat calon kepala desa dan atau konstituennya. Misal, menjadi pengurus BP UPK. Ada indikasi kecenderungan kepala desa untuk memilih pengurus BP UPK rekan-rekan yang bisa diajak kerjasama, namun pengertian kerjasama disalah artikan oleh penerima mandat, walaupun dalam praktiknya, proses pemilihan pengurus BP UPK melalui musyawarah di tingkat desa untuk dimusyawarahkan kembali ke tingkat kecamatan. Sehingga kesalahan dan khilafan untuk mengelola pemerintahan desa ada saja kekurangannya”.

Pada indikator melaksanakan audit internal fasilitator kabupaten kategorisesuai target dan Kinerja plus, hal ini menyiratkan bahwa di Kabupaten Bulungan pengendalian internal secara berjenjang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan hasil pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh Fasilitator diharapkan tersusun rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan untuk

perbaikan program selanjutnya. Dapat dilihat bahwa dari 9 kecamatan yang ada sebagai lokus PNPM Mandiri Perdesaan telah secara keseluruhan dilakukan audit internal oleh Fasilitator baik pada tahun sebelum dan pada tahun berjalan.

Audit internal yang dilakukan oleh fasilitator kabupaten (pendampingan masyarakat tingkat Kabupaten Bulungan) ini berjalan sesuai harapan semua pihak. Melalui kegiatan ini, program PNPM Mandiri Perdesaan bisa dipantau dan dievaluasi, untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaannya, kendala apa saja yang harus segera diupayakan, dan langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mempercepat pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di lokus-lokus kegiatan yang ada di Kabupaten Bulungan ini, baik pelaksanaan pada tahun anggaran 2013 maupun tahun anggaran 2014.

Pada tahun 2013, fasilitator kabupaten telah melaksanakan audit internal pada 9 kecamatan di lokus PNPM Mandiri Perdesaan, dari target audit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebanyak 9 kecamatan. Tujuan audit ini merupakan sebagai tindak lanjut dari hasil karya pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2013 di Kabupaten Bulungan yang belum terlaksanan pada tahun 2013 yang lalu oleh pendamping masyarakat. Kemudian, hasil audit tersebut akan disinergikan dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Program/kegiatan tahun 2013 yang baik dan belum selesai dilaksanakan akan direkomendasikan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014, sedangkan program/kegiatan yang dinilai tidak layak/tidak bermanfaat akan direkomendasikan untuk tidak ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2014. Dan apabila ada hasil karya PNPM Mandiri Perdesaan yang perlu biaya perawatan

(pemeliharaan) akan direkomendasikan untuk mendapatkan perhatian dalam pembiayaan pada tahun selanjutnya.

Fasilitator kabupaten juga telah melakukan audit internal pada tahun 2014. Bahkan audit yang dilakukan berkinerja plus. Hal ini membuktikan bahwa peran yang dilakukan pendamping masyarakat untuk melahirkan program/kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan adalah program/kegiatan yang urgen dan mendesak serta manfaatnya sangat besar dirasakan masyarakat. Melalui audit tersebut, maka tersusunlah rencana kerja yang bersumber dari spirit masyarakat perdesaan untuk membangun desa di Kabupaten Bulungan, walaupun dalam proses perencanaannya sangat melelahkan, baik waktu, tenaga, dan pikiran, akan tetapi perencanaan yang dihasilkan bisa menghasilkan peningkatan pembangunan yang pro terhadap eksistensi mereka di desa. Perencanaan mereka representasi spirit pembangunan yang ada dalam masyarakat perdesaan itu sendiri. Hal ini tidak terlepas dari seberapa besar peran yang telah pendamping masyarakat lakukan terhadap mereka, yaitu bisa mengajak dan mempengaruhi mereka untuk bersama-sama membangun desa, perubahan sikap mental dan spirit masyarakat perdesaan selalu meningkat dan mengelora disetiap langkah dan tindakan mereka, karena melalui aksi nyata untuk membangun perdesaan kearah perubahan yang lebih baik lagi telah terlaksana dengan baik dan berkualitas jauh lebih baik dari yang diharapkan bersama. Untuk melihat aksi nyata (hasil pembangunan dari program PNPM Mandiri Perdesaan) bisa dapat dilihat dari program/kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama. Misal, pada kegiatan untuk melatih dan mendidik masyarakat perdesaan agar mengetahui kegiatan pembangunan mulai dari kegiatan membuat

perencanaan sampai mengevaluasi kegiatan dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Alih pengetahuan ini dari pendamping masyarakat ke masyarakat perdesaan perlu proses waktu yang cukup panjang, namun melalui kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan, proses tersebut sangat mudah dilaksanakan.

Mereka menyadari bahwa untuk membangun perdesaan harus transparan atau terbuka, oleh sebab itu proses audit adalah salah satu langkah tepat untuk menghasilkan karya pembangunan desa yang bermanfaat dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini didukung dan dibenarkan oleh Informan (Hanafiah, 2015) yang menyatakan sebagai berikut:

“Melalui audit yang telah dilakukan oleh pendamping masyarakat pada tingkat kabupaten (faskab), masyarakat perdesaan yang ada di Kabupaten Bulungan terutama pada lokus kegiatan program/kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan merasa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan ini. Dan mereka bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dan yang tidak kalah pentingnya adalah program/kegiatan yang telah mereka rencanakan/susun bersama-sama melalui musyawarah adalah merupakan kegiatan yang sangat prioritas yang tidak terakomodir melalui anggaran yang telah disusun oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Oleh sebab itu, kemanfaatan kegiatan ini harus terlebih dahulu diaudit oleh rekan-rekan faskab, dan wajib dilaporkan secara berjenjang baik secara tertulis maupun lisan, misalnya melalui rapat koordinasi baik, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat”.

Pencapaian pada indikator penyelesaiankasuskorupsikategorisesuai target.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan secara garis besar dapat dikatakan berhasil dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat kecil, meskipun demikian bukan berarti kasus penyelewengan terhadap dana yang dikucurkan untuk masyarakat tersebut tidak ada kasus. Kasus korupsi rentan terjadi pada program PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan oleh pengurus UPK sebagaimana terjadi di Kabupaten Bulungan dan harus berhadapan dengan

pihak Kejaksaan yang mengurus waktu dan energi para pelaku pendamping masyarakat. Pernah terjadi di Kabupaten Bulungan sekalipun sudah dilimpahkan kepada pihak yang berwenang. Unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Kepolisian Resort (Polres) Bulungan melakukan penyidikan dugaan korupsi dana PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2013 di Kecamatan Tanjung Selor. Kapolres Bulungan AKBP Turmudi, melalui Kasatreskris Polres Bulungan AKP Zamhuri didampingi Kanit Tipikor IPTU Darwis mengatakan, Dana PNPM bersumber dari dana sharing Pemerintah Pusat sekira Rp.820 juta dan Pemkab Bulungan Rp. 120 juta, dengan total 1 miliar. Dana itu telah dikorupsi ketua UPK PNPM kecamatan Tanjung Selor, wanita berinisial “JUM” (Sumber: Download Koran Kaltim 18 Juni 2014).

Hal ini dibenarkan oleh informan (Agus Nugroho, September 2015) yang mengatakan sebagai berikut:

“Jadi begini, mengenai kasus korupsi sudah kita tempuh penanganannya melalui jalur non litigasi, tetapi tidak ada reaksi dari pelaku tersebut. Bila kita biarkan dan tidak ditindaklanjuti maka akibatnya lebih besar, contohnya kecamatan yang bersangkutan masuk dalam kategori kecamatan “bermasalah”, jika masuk dalam kategori kecamatan bermasalah maka BLM untuk kecamatan tersebut tidak dapat dicairkan. Dalam hal ini tidak mungkin gara-gara oknum tersebut semua dikorbankan. Keputusan diambil untuk ditempuh melalui jalur Litigas atau jalur hukum”.

Peran Pendamping masyarakat pada indikator penyelesaian masalah kategori sesuai target. Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab penanganan masalah tetap ada pada masyarakat setempat, namun demikian program masih memiliki tanggung jawab dalam pendamping. Penanganan masalah melalui mediasi adalah penangan masalah dengan menengahi yang merupakan tugas dalam pendamping masyarakat yang melibatkan mediator. Hal ini terjadi di

Kabupaten Bulungan dan proses penyelesaian masalah biasanya dapat berjalan sesuai kategori dengan intervensi yang dilaksanakan.

Mediasi yang dilakukan oleh pendampingan masyarakat penuh rasa tanggung jawab dan bisa dapat menghargai seluruh pendapat yang dikemukakan komponen masyarakat. Terjadi kesalahan dalam melaksanakan program kerja dalam suatu kegiatan tidak bisa terhindari walaupun perencanaan telah disusun sebaik mungkin. Jika hal itu terjadi, maka pendamping masyarakat segera mencari akar masalahnya, dengan melibatkan komponen pemanfaat program. Kemudian didiskusikan dan dicarikan solusi terbaik dan diputuskan melalui musyawarah dengan tepat dan segera. Agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan bobot permasalahan menjadi meningkat. Misal, ada kegiatan membangun jalan lingkungan, jika salah satu komponen tidak ada sesuai RAB, maka segera dicarikan solusinya dan segera diubah untuk dikondisikan sesuai bahan yang ada dilapangan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas pekerjaan itu.

Capaian indikator peran pendampingan terhadap Tindaklanjut temuan adalah kategori sesuai target, Pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan bekerja sesuai prosedur standar dalam menindaklanjuti setiap permasalahan yang muncul dilaksanakan melalui non litigasi, namun tidak semua permasalahan dapat diselesaikan, karena tidak jarang masalah yang muncul mengandung unsur perbuatan melawan hukum, sehingga penanganannya pun dapat dilakukan melalui proses hukum formal. Pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat didampingi para fasilitator secara periodik. Pemantauan berupa monitor langsung proses yang terjadi maupun berupa jalinan komunikasi yang intensif kepada instansi yang sedang menindaklanjuti masalah tersebut.

Demikian juga pada indikator peran pendampingan masyarakat pada tindak lanjut temuan oleh BPKP dengan kategori sesuai target. Di Kabupaten Bulungan terdapat temuan dari audit BPKP yang terjadi di beberapa kecamatan dan pengisian fasilitator kategoris sesuai target.

Peran Pendamping pada indikator pengisian fasilitator di Kabupaten Bulungan kategori sesuai target. Hal ini menggambarkan bahwa sesuai kebutuhan pendamping masyarakat di Kabupaten Bulungan dengan total kuota 24 orang, sejak bulan Mei terealisasi 24 orang akan tetapi realisasi pada bulan Juli-Desember 2014 hanya tinggal 18 orang. Dari 24 orang tersebut, 1 orang promosi diangkat menjadi koordinator provinsi sejak bulan Agustus 2014 dan 5 orang lainnya mengundurkan diri. Dari 5 orang yang mengundurkan diri hanya 1 orang saja mengundurkan diri karena alasan yang bisa ditolerir yaitu ingin mengurus orang tuanya yang sakit stroke dikampung halaman, sedangkan 4 orang lainnya karena tidak betah dilapangan dan berkelakuan tidak sesuai yang diharapkan.

Hal ini dibenarkan oleh Drs. Asep Maruf selaku konsultan Pengembangan SDM pada program PNPM Mandiri di Provinsi Kalimantan Utara yang menyatakan bahwa:

“Empat orang diantaranya berkelakuan tidak sesuai yang diharapkan, hal ini bertanda buruk jika tidak segera diusul untuk diberhentikan dalam program. Dikhawatirkan mereka bisa menjadi virus bagi rekan-rekannya dikemudian hari terutama bagi masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan yang saat ini bangga untuk membangun desanya menjadi desa yang lebih maju, mandiri dan kuat”.

Melihat kenyataan tersebut, dengan sangat terpaksa dan sambil menunggu calon pendamping masyarakat yang baru akan masuk dalam program ini, maka program tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disisi lain, ada kebanggaan

bagi penyelenggara program ini, dengan dipromosikannya 1 orang pendamping masyarakat pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan berarti hal ini menjadi barometer keberhasilan peran pendamping masyarakat pada pelaksanaan program untuk tingkat nasional khususnya bagi Kabupaten Bulungan, dipromosikan menjadi Koordinator Provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya sebagai pendamping masyarakat pada tingkat Kabupaten Bulungan. Dengan meningkatnya jenjang karier tenaga pendamping masyarakat, maka akan berpengaruh terhadap peran yang akan diberikannya kepada masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan. Karena dia bisa berbicara pada tingkat nasional dengan membawa visi, misi dan program yang pro terhadap penduduk miskin di Kabupaten Bulungan, bahkan bisa menjadi seorang narasumber yang kapabilitasnya tidak dapat diragukan lagi. Di satu sisi, rekan sejawatnya yang dulu hanya pendamping masyarakat tingkat kecamatan bisa menjadi tingkat kabupaten dan seterusnya, hal ini membuktikan pengembangan karier pendamping masyarakat sangat ideal dan membanggakan, bukan semata-mata besarnya gaji yang akan mereka terima.

Informan Syamsaimun (September 2015) menyatakan bahwa:

“Tenaga pendamping masyarakat kuotanya harus ditambah lagi agar lebih mendekati ideal. Agar bisa mengakomodir satu desa satu pendamping masyarakat terumata desa-desa yang belum mendapatkan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, selama ini hanya mengakomodir di ibukota kecamatan saja, dan sewaktu-waktu baru mereka bekerja di desa-desa. Tidak mungkin aparaturnya pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan perangkat desa bisa bersama-sama masyarakat perdesaan bisa memenuhi kebutuhan dasar, tanpa didukung peran tenaga pendamping masyarakat tersebut, bisa dipastikan program ini belum tentu sukses dan bermanfaat, mari segera kita peduli dan ambil bagian dalam kegiatan ini”.

Artinya dari segi jumlah para tenaga pendamping masyarakat di Kabupaten Bulungan sudah sesuai dengan beban kerja yang berikan kepada masing-masing pendamping sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pada indikator SPC (Surat Penetapan Camat) yang terdani kategori perlu perhatian khusus disebabkan, adanya perbedaan sumber alokasi pendanaan yang ditetapkan oleh camat melalui program PNPM Mandiri Perdesaan, APBD dan sumber pembiayaan lainnya. Hal ini terjadi karena dalam penentuan penetapan prioritas pendanaan tidak mencukupi sehingga seluruh kegiatan SPC tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu SPC seharusnya dapat terdani melalui pembiayaan dari kecamatan atau SKPD di Kabupaten maupun Provinsi. Hal ini dilakukan untuk menghargai proses perencanaan yang sudah dilaksanakan secara bertahap yang sudah mengeluarkan banyak waktu, energy dan uang. Proses musrenbang regular yang dilaksanakan oleh pemerintah juga harus disinkronkan dengan musyawarah perencanaan program PNPM Mandiri Perdesaan, tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu perlu koordinasi lintas sector dan pelaku dalam pelaksanaan kegiatan di perdesaan untuk mendapat hasil yang maksimal. Kemampuan masyarakat juga harus ditingkatkan dalam menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan secara tertib sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan MDST. Sebagaimana disampaikan oleh Camat Tanjung Selor (September, 2015) sebagai berikut:

“ada mekanisme yang perlu mendapat perhatian kita semua, terutama mengenai sisten perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya terintegrasi atau terpadu dengan program PNPM Mandiri Perdesaan, misalnya hasil musyawarah desa yang telah menetapkan daftar prioritas pembangunan di desa yang terdani melalui program dan melalui SKPD tidak jelas, terutama kegiatan dari SKPD di desa yang tidak jelas lokusnya.

Hal tersebut membuat SPC tidak semua dapat dilaksanakan oleh masyarakat”.

Berikut dapat dilihat peran pendampingan masyarakat dengan indikator Menejemen diri.

Tabel 4.24
Peran Pendampingan Masyarakat Untuk Unsur Manajemen Diri

No	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah	Target	Realisasi	Keterangan
1	BP UPK yang melakukan audit minimal 1 TH sekali, ada laporan hasil audit	Kec	9	7	6	Perhatian khusus
2	Internal audit Faskab T.A 2013	Kec	9	9	9	Sesuai target
3	Internal Audit Faskab T.A 2014	Kec	9	7	9	Kinerja plus
4	Kasus korupsi yang diselesaikan s/d T.A 2013	Juml Kasus	1	1	1	Sesuai target
5	Penyelesaian masalah s/d T.A 2013	Juml Masalah	1	1	1	Sesuai target
6	Tindak lanjut temuan BPKP S/d TH 2012	Juml temuan	7	5	5	Sesuai target
7	Pengisian Fasilitator	Orang	24	18	18	Sesuai target
8	SPC tahunan (tahun anggaran 2014) diselesaikan dan sudah MDST	Jumlah desa didanai	43	39	7	Perhatian khusus

Sumber : data primer yang diolah, 2015

Dari tabel tersebut dapat kita lihat capaian indikator peranan pendamping masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Pedesaan, yang dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

d. Mobilisasi Sumber

Pembelajaran dalam menggali persoalan, potensi dan kebutuhan untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia serta belajar untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya menjadi prinsip PNPM-MP. Tabel 5.4. menunjukkan capaian peran pendamping masyarakat yang terhadap pelaksanaan Program PNPM

Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan. Dari 28 item indikator kinerja kegiatan Mobilisasi Sumber terdapat enam indikator yang termasuk unsur ini yaitu kegiatan Pengembalian SPP kategori perhatian khusus, Pengembalian UEP kategori kinerja plus, Perguliran Dana kategori perhatian khusus dan perguliran dana yang mengendap direkening kategori perhatian khusus.

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan dalam bentuk dana simpan pinjam di Kabupaten Bulungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pinjaman dana SPP di Kabupaten Bulungan tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh Kementerian dalam Negeri sehingga masuk dalam kategori perhatian khusus. Hal tersebut kemungkinan disebabkan klasifikasi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang tidak efektif yaitu jenis usaha pertanian yang kadang kala tidak memberi hasil yang diharapkan, selanjutnya bergerak pada usaha pertanian tidak dapat memberi hasil keuntungan yang lebih cepat, penggunaan dana SPP untuk kebutuhan sehari – hari (konsumtif). Dana SPP digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan proposal yang diberikan hanya untuk mendapatkan dana segar tanpa ber”usaha” melalui kegiatan yang produktif, lainnya adalah tidak memiliki pengalaman usaha, kurangnya semangat untuk bekerja, bisa juga karena tidak adanya dukungan suami atau masalah administrasi. Hal ini dibenarkan oleh salah satu Informan (Tri Setyo) yang mengatakan sebagai berikut :

“Keterlambatan pelaksanaan program PNPM Integrasi di Bumi Tenguyun (sebutan Kabupaten Bulungan) disebabkan beberapa faktor diantaranya lambatnya proses pengajuan proposal kegiatan dari masing-masing desa, pada hal proposal pengajuan kegiatan dari desa itulah yang menjadi dasar kegiatan. Saat proses pengumpulan proposal kegiatan itu dari desa-desa di 10 kecamatan beberapa waktu

lalu, banyak dari desa yang mengumpulkan proposal kegiatan di Bulan Juli bahkan ada yang baru menyelesaikan perbaikan proposal akhir Agustus lalu. Kita beri batas waktu,, jika tetap tidak dilakukan perbaikan maka usulan itu tidak akan diakomodir”

Jika menilik pernyataan tersebut, banyak masyarakat yang masih mengabaikan maslah administrasi termasuk didalamnya tertib waktu sesuai jadual atau ketentuan. Tetapi ironisnya pendamping tidak dapat berbuat sesuatu karena harus berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Mestinya peluang-peluang tersebut harus dimanfaatkan, tetapi harus disikapi sesuai proses administrasi yang semestinya.

Jika hal ini kita hubungkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti, terutama yang dilakukan Intan Sumiyatidi desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap Kabupaten Tana Tidung di bidang ekonomi menyebutkan :

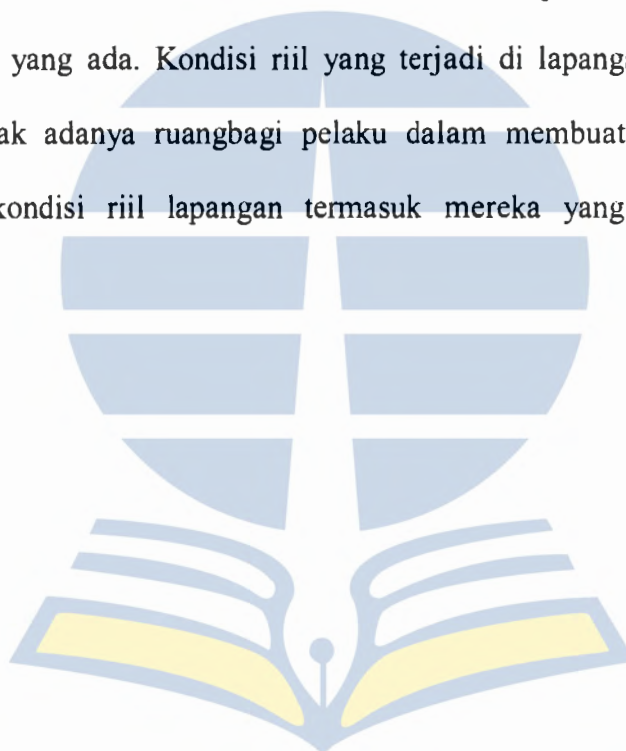
“Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pihak pelaku PNPM Mandiri perdesaan. Hanya saja sebagian program yang dilaksanakan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap karena kurangnya sumber daya manusia Desa Sepala Dalung dan Desa Sesayap.”

Permasalahan tersebut diatas, mirip dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Bulungan, bahwa adanya dana yang tidak berproses sebagaimana mestinya disebabkan berbagai faktor, termasuk didalamnya masalah sumber daya manusia. Oleh karena itu peran pendamping harus melakukan tinjauan proses pendampingan terhadap pengajuan pinjaman dana SPP maupun UEP, sebab tujuan dari program SPP dan UEP adalah untuk mempermudah akses permodalan bagi usaha mikro di perdesaan.

Sementara peran pendamping terhadap tingkat pengembalian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat melebihi target yang telah ditetapkan sehingga

masuk dalam kategori kinerja plus. Sementara untuk untuk dana bergulir pinjaman UEP selama ini sebesar Rp. 410.305.600.- dengan target pengembalian kumulatif sebesar Rp. 348.759.760.- dan realisasi pengembalian sebesar Rp. 393.371.363.- atau prosentase pengembalian sebesar 113 % yang dikelola unit pengelola kegiatan (UPK) di Kabupaten Bulungan. Melihat tumbuh kembang program ekonomi mikro ini- khususnya prosentase pengembalian dana bergulir untuk UEP sebesar 113 % tersirat satu optimisme, bahwa apabila kelompok masyarakat di pedesaan diberikan kesempatan untuk melakukan akses kreativitas dan kewenangan berinovasi dengan potensi yang dimiliki- niscaya melahirkan sebuah maha karya yang dapat dirasakan manfaatnya oleh publik perdesaan secara bersama. Sekalipun tingkat pengembalian UEP diatas target termasuk pengembalian SPP yang tidak jelek walaupun realisasi tidak tercapai, ternyata banyak memendam permasalahan yaitu banyaknya dana yang tidak terpakai atau diparkir (NPL-Non Performa Lound) di rekening UPK. Hal ini sangat disayangkan terdapat banyak dana yang mengendap yang harusnya dapat digunakan masyarakat sehingga mempunyai daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bulungan. Tak termanfaatkan untuk masyarakat, karena terkendala aturan main atau implementasi SOP di lapangan yang terkesan baku. Secara substansi sebenarnya pelaku langsung PNPM Mandiri Perdesaan sangat mengetahui bahwa dana UPK tersebut adalah hak masyarakat, yang idealnya harus segera dicairkan. BLM tidak untuk dibungkakan atau malah dibiarkan nangkring di bank. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulus yang sesegera mungkin harus dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Adalah sebuah kekeliruan jika dana BLM termasuk dana bergulir

UPK dibiarkan mengendap di rekening. Dari temuan lapangan dan masukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta UPK-nya, ternyata hal ini lebih disebabkan oleh ketakutan dari lembaga bentukan di desa. Disamping itu penerapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dari UPK yang terkesan monoton, baku terhadap aturan dan apa adanya. Mengingat tingkat Sumberdaya Manusia perdesaan yang relative masih rendahnya, alangkah bijaknya jika proses administrasi dapat dipermudah agar mudah dipahami masyarakat. Jika tidak, hal ini menjadikan tidak ada keberanian berinovasi dan improvisasi dalam menelaah sebuah aturan yang ada. Kondisi riil yang terjadi di lapangan sekarang adalah buah dari tidak adanya ruangbagi pelaku dalam membuat sebuah keputusan berdasarkan kondisi riil lapangan termasuk mereka yang melakukan peran pendamping.



Tabel 4.25
Peran Pendamping Masyarakat Untuk Unsur Manajemen Sumber

No	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah	Target	Realisasi	Keterangan
1	Tingkat pengembalian SPP	Rp	54.765.700.501	52.027.415.476	49.231.413.196	Perhatian khusus
2	Tingkat pengembalian UEP	Rp	410.305.600	348.759.760	393.371.363	Kinerja plus
3	NPL untuk UEP + SPP Maks (Tingkat kolektibilitas 2-5)	Rp	0	0	18.824.773.320	Perhatian khusus
	- Total Kolek 2 s.d 5		0	0	7.065.232.168	
	- Total Saldo Pinjaman		0	0	11.759.541.152	
4	Jumlah Kec dengan NPL untuk UEP + SPP maks 10%	Kec	9	8	0	Perhatian khusus
5	Dana Perguliran UEP + SPP mengendap di rekening	Rp	0	0	27.902.110.268	Perhatian khusus
	- Total Kas + Bank		0	0	8.071.284.558	
	- Total Kas + Bank+ Saldo Pinjaman		0	0	19.830.825.710	
6	Jumlah Kec dgn dn perguliran UEP + SPP mengendap di rekening maks 15%	Kec	9	5	1	Perhatian khusus

Sumber: data primer yang diolah, 2015

Dari tabel tersebut diatas, dapat kita lihat besaran dana pengembalian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dapat memenuhi target namun pengembalian dana tersebut tidak dapat digulirkan kembali, yang mengakibatkan mengendapkannya dana-dana PNPM Mandiri Perdesaan khususnya UEP dan SPP tidak dimanfaatkan. Hal ini menjadi pekerjaan besar bagi mereka yang melakukan pendampingan agar bagaimana memaksimalkan sumber dana tersebut digunakan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat yang dilakukan kaum perempuan.

Dengan fasilitasi dana perguliran UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) terbukti banyak usaha masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Sistem berkelompok memberi keunggulan dari segi perencanaan usaha, pengendalian keuangan, pengembangan usaha, pembinaan kapasitas kelompok yang intensif dilakukan oleh UPK ataupun kelembagaan lainnya. Disamping selalu menjalin komunikasi dengan pemerintah desa, selaku pengurus UPK juga harus berasal dari mereka-mereka yang memang fokus bekerja di UPK, bukan kerja di UPK hanya sebagai pekerjaan sampingan saja.

Kalau bicara peningkatan kapasitas anggota UPK, sudah barang tentu harus didukung oleh faktor pendukung yang lain, bagaimana efektifitas Badan Pengawas, Seberapa jauh keseriusan badan Kerjasama Antar Desa sebagai majikan UPK di dalam mengendalikan UPK itu sendiri.

e. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Pembangunan dan pengembangan jaringan sebagai bagian dari pelaksanaan pendampingan sosial merupakan refleksi hasil yang harus diwujudkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inti dari pendampingan sosial tersebut bagaimana masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang mereka laksanakan dan bagaimana mereka dapat mengembangkan serta melestarikan untuk mendapatkan manfaat yang berkelanjutan. Dalam hal capaian pembangunan dan pengembangan jaringan terdapat indikator peranan pendampingan didalamnya yaitu kegiatan pembuatan papan informasi yang selalu diperbaharui dengan kategori perhatian khusus, infrastruktur yang dibangun, dimanfaatkan berkualitas bagus dengan kinerja plus,

dan Hasil PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah diserahkan dipelihara dan masih berfungsi dengan kategori kinerja plus.

Infrastruktur dasar perdesaan yang dibangun oleh warga desa di Kabupaten Bulungan selain menggunakan BLM yang diberikan oleh pemerintah, mereka juga berkontribusi dengan menambah anggaran melalui swadaya baik berbentuk uang, tenaga, pikiran maupun makanan untuk para pekerja infrastruktur dasar itu sendiri. Hal ini menunjukkan semangat jiwa gotong royong dan kekeluargaan di tengah masyarakat perdesaan masih terpeliharaan dengan baik. Mereka sadar bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur dasar di perdesaan mereka harus dimulai dari mereka sendiri sebagai komponen warga desa, termasuk bagaimana melestarikan hasil pembangunan infrastruktur itu sendiri. Infrastruktur dasar yang dibangun diantaranya jalan desa, jaringan skunder dan tersier, pembangunan gedung PAUD/TK, pembangunan gedung RBM, tambatan perahu, jembatan penghubung antar desa, dan lain sebagainya. Hasil pembangunan yang mereka kerjakan kuantitas dan kualitas cenderung lebih baik dibanding pembangunan yang dikerjakan oleh SKPD, bahkan tenaga perencana dan pengawas kegiatan hanya dibayar seikhlasnya saja. Hal ini dibenarkan oleh informan (Agus Nugroho dan Syamsaimun) yang menyatakan bahwa:

“Untuk menjamin kualitas pembangunan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan, hampir seluruh komponen masyarakat mengawasinya, jika tidak sesuai, maka yang terkait langsung menegur pelaksana pembangunan tersebut, bahkan jika tidak diindahkan maka langsung diganti pekerjaanya”.

Pembuatan papan informasi yang merupakan media penyebarluasan informasi berbagai kegiatan desa dan pembangunan di desa. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa mengetahui semua kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang

berlangsung di masing-masing desa, termasuk kemajuan kegiatan atau masalah, hingga laporan penggunaan dana. Selain itu, juga merupakan media pembelajaran 'keterbukaan' dan pertanggung-jawaban dalam proses kegiatan pembangunan pada masyarakat bahkan bisa difungsikan sebagai media pencerahan bagi masyarakat. Idealnya setiap desa minimal harus memiliki sebuah papan informasi. Namun di Kabupaten Bulungan dari 74 desa yang menjadi lokasi PNPM Mandiri Perdesaan hanya terdapat sebanyak 66 papan informasi dan ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga masuk dalam kategori perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dibenarkan Informan (Agus Nugroho, 2015) sebagai berikut:

“sebenarnya 74 desa di Kabupaten Bulungan sudah memiliki papan informasi dan ini selalu kita tekankan kepada masyarakat, untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang program PNPM Mandiri Perdesaan, hanya saja papan informasi tersebut rata-rata tidak pernah diperbaharui alasannya desa tersebut memiliki penduduk yang kecil dan mereka lebih mudah dan efektif mengumpulkan secara langsung warganya”.

Papan informasi sebaiknya harus dibuat lebih banyak agar dapat dilihat oleh sebanyak-banyaknya warga desa, dan ditempatkan tempat strategis. Terkait dengan hal itu pengadaan Papan Informasi harus direncanakan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat juga.

Selain papan informasi, informasi juga biasanya dilakukan melalui sms atau telepon bahkan email dan sosial media lainnya. Cara ini mereka lakukan terutama kepada pendamping masyarakat serta perangkat yang terkait. Begitu pula, jika terjadi hal-hal yang mencurigakan (ada indikasi tidak baik). Keikutsertaan mereka dalam menyampaikan informasi tersebut menjadi barometer kepedulian mereka terhadap program. Hal ini berkat peran yang diadopsi dari

tenaga pendamping masyarakat yang mengajarkan secara langsung, mudah dan cepat dimengerti oleh masyarakat desa. Tujuannya agar kendala atau hambatan yang dihadapi segera dapat diatasi melalui upaya-upaya yang saling menguntungkan.

Peran Pendamping Masyarakat dengan indikator Infrastruktur yang dibangun, dimanfaatkan berkualitas bagus dengan kinerja plus, dan Hasil PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah diserahkan dipelihara dan masih berfungsi dengan kategori kinerja plus. PNPM Mandiri Perdesaan membantu meningkatkan infrastruktur perdesaan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Penentuan infrastruktur yang akan dibangun murni merupakan aspirasi masyarakat desa sendiri, bukan keinginan pimpinan daerah, pimpinan ormas, pimpinan LSM atau pimpinan lainnya. Semuanya hasil musyawarah bersama, atau dengan kata lain semua usulan masyarakat dimusyawarahkan untuk kemudian dibangun secara bersama-sama. Dalam konteks ini, PNPM Mandiri telah mengajarkan masyarakat desa berdemokrasi secara sehat dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Semua warga masyarakat memiliki kedudukan dan posisi yang sama atau sederajat, sama memiliki hak untuk bersuara. Berbagai pembangunan infrastruktur oleh PNPM Mandiri telah mengubah wajah desa yang sebelumnya didominasi jalan tanah, kini banyak yang sudah jalan beton, sehingga lebih bersih, lebih nyaman, lebih kuat dan lebih memperlancar lalu lintas masyarakat. Jalan desa yang sebelumnya hanya bisa dilewati pejalan kaki dan sepeda ontel, kini bisa dilewati sepeda motor dan sebagian mobil, sehingga sangat membantu masyarakat desa mengangkut hasil komoditas pertaniannya baik padi, jagung, kedelai maupun hasil pertanian lainnya yang menjadi komoditas unggulan masyarakat Kabupaten

Bulungan. Hingga sampai saat ini berdasarkan informasi data lapangan hasil fisik infrastruktur yang terbangun, dimanfaatkan dan yang sekaligus dijaga masyarakat masih utuh dan perlu pelestariaannya sehingga manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang. Faktor pendukung hal tersebut adalah keterbukaan pemerintah desa, tim pengurus kegiatan yang menggunakan prinsip keterbukaan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 4.26
Peran Pendamping Masyarakat dengan
Indikator Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Desa memiliki Papan informasi yang isinya selalu diperbarui	Desa	71	71	66	Perhatian khusus
2.	Infrastruktur yang dibangun PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2013 berkualitas bagus	Kegiatan	45	36	43	Kinerja plus
3.	Infrastruktur yang dibangun PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2013 digunakan oleh Masyarakat	Kegiatan	45	41	45	Kinerja plus
4.	Sub Proyek yang dibangun PNPM Mandiri Perdesaan dan telah MDST s/d T.A 2012 (yang membutuhkan pemeliharaan) masih berfungsi	Sub proyek	55	47	55	Kinerja plus

Sumber : data primer yang diolah, 2015

Dalam analisis peran pendamping masyarakat tersebut diatas, dapat dilihat secara keseluruhan tentang arti pentingnya pendamping masyarakat dalam setiap program pemerintah di perdesaan. Secara gamblang analisis tersebut dilaksanakan dengan 28 indikator Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan para pendamping masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Peneliti juga melakukan analisis persentase yaitu suatu pendekatan analisis deskriptif yang membandingkan nilai realisasi dan nilai target dari indikator peran pendampingan masyarakat pada program PNPM Mandiri

Perdesaan di Kabupaten Bulungan. Hal dilakukan untuk menyandingkan capaian indikator Kementerian Dalam Negeri dengan analisis target prosentasi yang dilaksanakan pendamping di Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

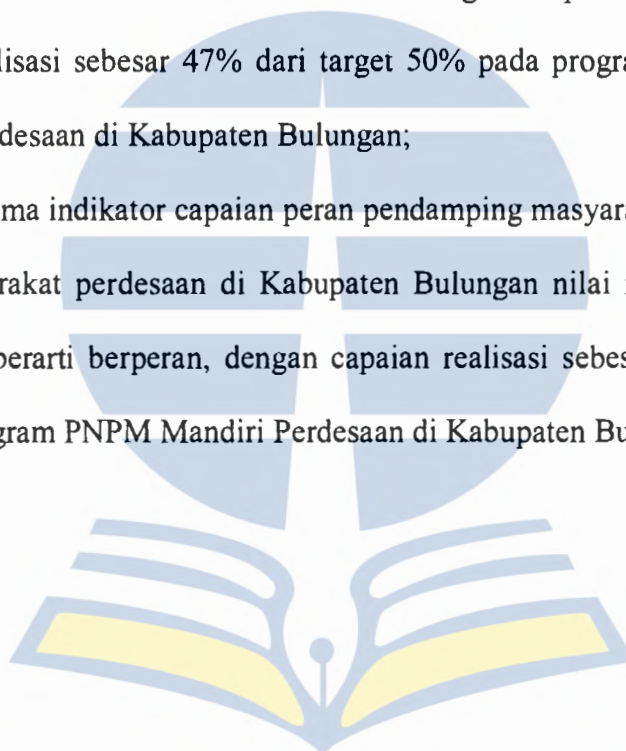
a. Motivasi

Tabel 4.26 menginformasikan bahwa peran pendamping masyarakat untuk motivasi kepada masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

- 1) Indikator capaian kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang dinilai matang mempunyai persentase sebesar 19% berarti sangat tidak berperan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pendamping masyarakat belum optimal dilakukan. Dari target nasional sebanyak 83 kelompok (10%), terealisasi hanya 16 kelompok (2%) saja, padahal jumlah kelompok SPP di Kabupaten Bulungan sebanyak 826 kelompok.
- 2) Indikator capaian UPK yang dinilai sehat, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 71% berarti cukup berperan, dengan capaian realisasi peran sebesar 50% (4 kecamatan) dari target 70% (6 kecamatan) sedangkan jumlah UPK yang sehat di Kabupaten Bulungan sebanyak 8 kecamatan.
- 3) Indikator supervise lokasi ekstrim, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 71% berarti cukup berperan, dengan capaian realisasi peran sebesar 50% (4 kecamatan) dari target 70% (6 kecamatan) sedangkan jumlah UPK yang sehat di Kabupaten Bulungan sebanyak 8 kecamatan.

- 4) Indikator miskin berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 83% berarti berperan, dengan capaian realisasi sebesar 37% dari target 60% pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan;
- 5) Indikator perempuan berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 93% berarti sangat berperan, dengan capaian realisasi sebesar 47% dari target 50% pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan;

Dari kelima indikator capaian peran pendamping masyarakat untuk motivasi kepada masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan nilai rata-rata persentase sebesar 87% berarti berperan, dengan capaian realisasi sebesar 47% dari target 47% pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan.



Tabel 4.27
Peran Pendampingan Masyarakat Untuk Unsur Motivasi

No	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Nilai %	Kriteria
1	Kelompok SPP yang dinilai matang	10%	2%	19%	sangat tidak berperan
2	UPK yang dinilai sehat	70%	50%	71%	cukup berperan
3	Supervisi lokasi ekstrem	60%	100%	167%	Berperan plus
4	Masyarakat miskin berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan	45%	37%	83%	berperan
	- Total Kehadiran				
	- Total Masyarakat Miskin				
5	Perempuan berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan Keputusan	50%	47%	93%	sangat berperan
	- Total Kehadiran				
	- Total partisipasi perempuan				
Rata-rata		47%	47%	87%	berperan

Sumber : data primer yang diolah, 2015

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Tabel 4.27 menginformasikan bahwa peran pendamping masyarakat untuk peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan kepada masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

- 1) Indikator capaian pelaksanaan pelatihan masyarakat sesuai SPC (surat penetapan camat) mempunyai persentase sebesar 82% berarti sangat berperan, dengan realisasi sebesar 82% dari target sebesar 100%.
- 2) Indikator capaian kabupaten yang menampilkan perkembangan pelaksanaan di website kabupaten, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 167% berarti berperan plus, dengan capaian realisasi peran sebesar 100% dari target 60%.
- 3) Indikator laporan program berdasarkan aplikasi oleh provinsi, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 0% berarti

sangat tidak berperan, dengan capaian realisasi peran sebesar 0% dari target 100%.

- 4) Indikator supervisi dan monitoring oleh BKAD, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 130% berarti berperan plus, dengan capaian realisasi sebesar 78% dari target 60% pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan;
- 5) Indikator desa melakukan tinjauan ulang terhadap RPJMDesa dan RKPDesa (Desa Parisipatif), peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 107% berarti berperan plus, dengan capaian realisasi sebesar 80% dari target 75% pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan;

Dari kelima indikator capaian peran pendamping masyarakat untuk peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan kepada masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan nilai rata-rata persentase sebesar 97% berarti sangat berperan, dengan capaian realisasi sebesar 68% dari target 79% pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan.

Tabel 4.28
Peran Pendamping Masyarakat Untuk Unsur Peningkatan Kesadarandan Pelatihan Kemampuan

No	Indikator capaian	Target	Realisasi	Nilai %	Kriteria
1	Terlaksana Pelatihan Masyarakat sesuai SPC	100%	82%	82%	Berperan
2	Kabupaten yang menampilkan perkembangan pelaksanaan di website Kab	60%	100%	167%	sangat berperan
3	Laporan Program berdasarkan Aplikasi Oleh Provinsi	100%	0%	0%	sangat tidak berperan
4	Supervisi dan monitoring oleh BKAD	60%	78%	130%	sangat berperan sekali
5	Desa melakukan Tinjauan ulang terhadap RPJMDesa dan RKPDes (Desa Partisipasi)	75%	80%	107%	sangat berperan sekali
Rata-rata		79%	68%	97%	sangat berperan

Sumber: data primer yang diolah, 2015

c. Manajemen diri

Tabel 4.28 menginformasikan bahwa peran pendamping masyarakat untuk manajemen diri kepada masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

- 1) Indikator capaian BP UPK (badan pengawas unit pengelola kegiatan) yang melakukan audit minimal 1 tahun sekali, ada laporan hasil audit, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 95% berarti sangat berperan, dengan realisasi sebesar 67% dari target sebesar 70%.
- 2) Indikator capaian internal audit fasilitator kabupaten (pendamping masyarakat tingkat kabupaten) tahun anggaran 2013, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 100% berarti berperan, dengan capaian realisasi peran sebesar 100% dari target 100%.

- 3) Indikator capaian internal audit fasilitator kabupaten (pendamping masyarakat tingkat kabupaten) tahun anggaran 2014, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 143% berarti sangat berperan sekali, dengan capaian realisasi peran sebesar 100% dari target 70%.
- 4) Indikator capaian kasus korupsi yang diselesaikan s/d tahun anggaran 2013, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 200% berarti sangat berperan sekali, dengan capaian realisasi sebesar 100% dari target 50%.
- 5) Indikator capaian penyelesaian masalah sampai dengan tahun anggaran 2013, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 167% berarti sangat berperan sekali, dengan capaian realisasi sebesar 100% dari target 60%.
- 6) Indikator capaian tindak lanjut temuan BPKP sampai dengan tahun 2012, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 102% berarti sangat berperan sekali, dengan capaian realisasi sebesar 71% dari target 70%.
- 7) Indikator capaian pengisian fasilitator (pendamping masyarakat) sebanyak 23 orang, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 100% berarti berperan, dengan capaian realisasi sebesar 100% dari target 100%;
- 8) Indikator capaian SPC tahunan (tahun anggaran 2014) diselesaikan dan sudah MDST, peran pendamping masyarakat mempunyai

persentase sebesar 18% berarti sangat tidak berperan, dengan capaian realisasi sebesar 16% dari target 90%.

Dari kedelapan indikator capaian peran pendamping masyarakat untuk unsur manajemen diri kepada masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan nilai rata-rata persentase sebesar 116% berarti sangat berperan sekali, dengan capaian realisasi sebesar 81% dari target 76% pada pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan.

Tabel 4.29
Peran Pendamping Masyarakat Untuk Unsur Manajemen Diri

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai %	Kriteria
1	BP UPK yang melakukan audit minimal 1 tahun sekali, ada laporan hasil audit	70%	67%	95%	Berperan
2	Internal audit Faskab T.A 2013	100%	100%	100%	Berperan
3	Internal Audit Faskab T.A 2014	70%	100%	143%	berperan plus
4	Kasus korupsi yang diselesaikan s/d T.A 2013	50%	100%	200%	berperan plus
5	Penyelesaian masalah s/d T.A 2013	60%	100%	167%	berperan plus
6	Tindak lanjut temuan BPKP s/d tahun 2012	70%	71%	102%	berperan lus
7	Pengisian Fasilitator	95%	95%	100%	Berperan
8	SPC tahunan (tahun anggaran 2014) diselesaikan dan sudah MDST	90%	16%	18%	sangat tidak berperan
Rata-rata		76%	81%	116%	berperan plus

Sumber: data primer yang diolah, 2015

d. Manajemen sumber

Tabel 4.29 menginformasikan bahwa peran pendamping masyarakat untuk manajemen sumber kepada masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

- 1) Indikator capaian tingkat pengembalian SPP (simpan pinjam perempuan), peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 95% berarti sangat berperan, dengan realisasi sebesar 90% dari target sebesar 95%.
- 2) Indikator capaian tingkat pengembalian UEP (usaha ekonomi produktif), peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 113% berarti sangat berperan plus, dengan realisasi sebesar 96% dari target 85%.
- 3) Indikator capaian NPL untuk UEP+SPP maksimal tingkat kolektibilitasnya 2-5, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 601% berarti sangat berperan plus, dengan realisasi sebesar 60% dari target 10%.
- 4) Indikator capaian jumlah kecamatan dengan NPL untuk UEP+SPP maksimal 10%, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 0% berarti sangat tidak berperan, dengan realisasi sebesar 0% dari target 80%.
- 5) Indikator capaian dana perguliran UEP+SPP mengendap direkening, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 271% berarti sangat tidak berperan, dengan realisasi sebesar 41% dari target 15%.

- 6) Indikator capaian jumlah kecamatan dengan dana perguliran UEP+SPP mengendap di rekening maksimal 15%, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 22% berarti sangat tidak berperan, dengan realisasi sebesar 11% dari target 50%.

Dari keenam indikator kinerja peran pendamping masyarakat untuk unsur manajemen sumber kepada masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan nilai rata-rata persentase sebesar 89% berarti sangat berperan, dengan realisasi sebesar 68% dari target 79% pada pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan untuk tahun anggaran 2014.

Tabel 4.30
Peran Pendamping Masyarakat Untuk Unsur Manajemen Sumber

No	Indikator capaian	Target	Realisasi	Nilai %	Kriteria
1	Tingkat pengembalian SPP	95%	90%	95%	sangat berperan
2	Tingkat pengembalian UEP	85%	96%	113%	berperan plus
3	NPL untuk UEP + SPP Maks (Tingkat kolektibilitas 2-5)	10%	60%	601%	berperan plus
	- Total Kolek 2 s.d 5				
	- Total Saldo Pinjaman				
4	Jumlah Kec dengan NPL untuk UEP + SPP maks 10%	80%	0%	0%	sangat tidak berperan
5	Dana Perguliran UEP + SPP mengendap di rekening	15%	41%	271%	berperan plus
	- Total Kas + Bank				
	- Total Kas + Bank+ Saldo Pinjaman				
D	Jumlah Kec dgn dn perguliran UEP + SPP mengendap di rekening maks 15%	50%	11%	22%	sangat tidak berperan
Rata-rata		56%	50%	89%	sangat berperan

Sumber: data primer yang diolah, 2015

e. Pembangunan dan pengembangan jaringan

Tabel 4.30 menginformasikan bahwa peran pendamping masyarakat untuk pembangunan dan pengembangan jaringan kepada masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

- 1) Indikator capaian tingkat pengembalian SPP (simpan pinjam perempuan), peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 95% berarti sangat berperan, dengan realisasi sebesar 90% dari target sebesar 95%.
- 2) Indikator capaian tingkat pengembalian UEP (usaha ekonomi produktif), peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 113% berarti sangat berperan sekali, dengan realisasi sebesar 96% dari target 85%.
- 3) Indikator capaian NPL untuk UEP+SPP maksimal tingkat kolektibilitasnya 2-5, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 601% berarti sangat berperan sekali, dengan realisasi sebesar 60% dari target 10%.
- 4) Indikator capaian jumlah kecamatan dengan NPL untuk UEP+SPP maksimal 10%, peran pendamping masyarakat mempunyai persentase sebesar 0% berarti sangat tidak berperan, dengan realisasi sebesar 0% dari target 80%.

Dari keenam indikator capaian peran pendamping masyarakat untuk unsur manajemen sumber kepada masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan nilai rata-rata persentase sebesar 89% berarti sangat berperan, dengan capaian realisasi

sebesar 68% dari target 79% pada pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan untuk tahun anggaran 2014.

Tabel 4.31
Peran Pendamping Masyarakat Untuk Unsur Pembangunan dan Pengembangan Jaringan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai %	Kriteria
1	Desa memiliki Papan informasi yang isinya selalu diperbarui	90%	85%	94%	sangat berperan
2	Infrastruktur yang dibangun PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2013 berkualitas bagus	80%	96%	119%	peran plus
3	Infrastruktur yang dibangun PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2013 digunakan oleh Masyarakat	90%	100%	111%	peran plus
4	Sub Proyek yang dibangun PNPM Mandiri Perdesaan dan telah MDST s/d T.A 2012 (yang membutuhkan pemeliharaan) masih berfungsi	85%	100%	118%	peran plus
Rata-rata		86%	95%	110%	peran plus

Berdasarkan hasil analisis dari kelima unsur peran pendamping masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Bulungan, maka peran pendamping masyarakat memiliki persenta sebesar 99 % berarti sangat berperan, dengan nilai rata-rata realisasi sebesar 68 % dari nilai rata-rata target sebesar 69 %, sebagaimana terdapat dalam table berikut ini:

Tabel 4.32
Analisis Peran Pendamping Masyarakat

No	Peran	Jumlah rata-rata			Kriteria
		Target	Realisasi	Nilai %	
1	Motivasi	47%	47%	100%	berperan
2	Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan	79%	68%	86%	sangat berperan
3	Manajemen diri	76%	81%	106%	berperan plus
4	Mobilisasi sumber	56%	50%	89%	berperan plus
5	Pembangunan dan pengembangan jaringan	86%	95%	110%	berperan plus
Rata-rata keseluruhan peran		69%	68%	99%	berperan plus

Sumber: data primer yang diolah, 2015

2. Permasalahan dan Hambatan

a. Peran Pendampingan Dalam Menangani Masalah PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan

Sebagaimana diketahui bahwa pendamping masyarakat untuk program PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan secara terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat desa. Konsultan dan fasilitator pendamping sangat besar peranannya di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dalam memfasilitasi masyarakat untuk melakukan penanganan masalah, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses penanganannya. Adapun peran dan tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1). Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM-D)

Salah satu tugas penting KPM-D, yaitu memfasilitasi masyarakat dalam penanganan permasalahan yang terjadi di desanya. Dalam memfasilitasi suatu penanganan masalah perlu ditumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk selalu memantau atau melakukan kontrol terhadap setiap langkah penanganannya. Untuk lebih memastikan penanganan masalah tetap mengacu pada prinsip dan prosedur, maka setiap ada permasalahan dan tindak lanjut penanganan yang telah dilakukan oleh KPM-D agar dilaporkan kepada fasilitator kecamatan.

2). Pendamping Lokal

Tugas penting pendamping lokal dalam setiap penanganan permasalahan, yaitu membantu dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, proses klarifikasi, uji silang, investigasi dan menyiapkan agenda pertemuan musyawarah desa sebagai salah satu media pemecahan masalah.

3). Fasilitator Kecamatan (Fasilitator Kecamatan)

- a) Melakukan analisis pemecahan masalah sampai strategi tindakan yang harus dilakukan.
- b) Berkoordinasi dengan Faskab, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat seperti: lembaga advokasi hukum, LSM yang bergerak di bidang korupsi atau bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah yang tidak terselesaikan di tingkat desa.
- c) Membuat rekomendasi dan rencana strategi penanganan yang terukur dan dapat dilakukan oleh KPM-D atau pendamping lokal.
- d) Memfasilitasi pertemuan masyarakat di tingkat desa maupun antar desa dalam proses penanganan permasalahan, serta mengundang elemen-elemen masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.
- e) Bertanggung jawab penuh dalam proses penanganan permasalahan sampai di nyatakan selesai.
- f) Melaporkan setiap permasalahan yang muncul dan tindak lanjut penanganannya kepada jenjang di atasnya.

4. Fasilitator Kabupaten (Faskab)

- a) Membantu Fasilitator Kecamatan dan jajaran di bawahnya dalam membuat analisis sampai strategi tindakan penanganan, serta membantu merencanakan tindakan penyelesaian masalah secara tepat, cepat, dan terukur.
- b) Melakukan koordinasi dengan TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan menjalin hubungan dengan pihak Kejaksaan, Lembaga Advokasi Hukum, ataupun LSM-LSM yang mempunyai kepedulian terhadap pemberantasan

korupsi atau pemberdayaan masyarakat sebagai langkah antisipasi jika permasalahan harus melibatkan lembaga-lembaga tersebut.

- c) Melakukan pemantauan terhadap langkah penanganan masalah yang telah dilakukan oleh jenjang di bawahnya.
- d) Melakukan klarifikasi, uji silang dan investigasi kelapangan jika masalah tidak terselesaikan di tingkat kecamatan atau berlarut-larut dalam penyelesaiannya.
- e) Memberikan laporan secara periodik kepada jenjang yang lebih tinggi.
- f) Bertanggung jawab penuh dalam penanganan masalah sampai dinyatakan selesai.

5. KM Provinsi

- a) Bertanggung jawab penuh terhadap tindak lanjut penanganan masalah sampai selesai.
- b) Memberikan teguran kepada jajaran di bawahnya, bilamana yang bersangkutan kurang memberikan dukungan dalam penyelesaian masalah.
- c) Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang kompeten dan dapat di akses oleh jenjang di bawahnya dalam rangka penyelesaian masalah.
- d) Berkoordinasi dengan Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di kantor Propinsi dan Pusat berkenaan dengan permasalahan yang krusial atau berdampak luas.

6. Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah (SP2M) di Tingkat Provinsi

- a) Membantu Faskab dan jajaran di bawahnya dalam membuat analisis sampai strategi tindakan penanganan, serta membantu merencanakan tindakan penyelesaian masalah secara tepat, cepat, dan terukur.
- b) Proaktif dalam memberikan informasi permasalahan dan dukungan percepatan penyelesaian masalah di wilayah kerjanya.
- c) Berkoordinasi dan memberikan informasi atau laporan secara berkala kepada KM Provinsi dan Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di tingkat pusat.
- d) Menjalin hubungan dengan lembaga Kejaksaan, Kepolisian, Advokasi hukum, LSM yang kompeten pada kasus Korupsi dan lembaga-lembaga lainnya.
- e) Mengagendakan pertemuan rutin bulanan dengan Faskab dan Fasilitator Kecamatan pada wilayah kerjanya, serta berkoordinasi secara aktif dengan KM Propinsi dan konsultan provinsi lainnya dalam rangka percepatan penyelesaian masalah.
- f) Melakukan investigasi secara langsung terhadap permasalahan yang bersifat krusial pada wilayah kerjanya.
- g) Mendorong dan memfasilitasi Faskab dan Fasilitator Kecamatan melakukan koordinasi dengan lembaga hukum/lembaga yang kompeten, terutama permasalahan yang krusial atau penyimpangan dana program.
- h) Membuat rekomendasi guna penyelesaian masalah pada wilayah kerjanya.

- i) Bertanggung jawab penuh sampai permasalahan di anggap selesai pada wilyah kerjanya.
- j) Memberikan masukan kepada KM Provinsi terhadap penilaian kinerja konsultan.

7. Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalahdi Tingkat Pusat

- a) Mengembangkan panduan praktis penanganan masalah.
- b) Memantau dan melakukan supervisi penanganan masalah maupun keluhan dari lapangan dan khususnya berkoordinasi dengan Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di setiap provinsi.
- c) Mengembangkan jaringan kerjasama dan komunikasi dengan LSM untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat bersama-sama dengan Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di setiap provinsi.
- d) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan reguler penanganan masalah di tingkat pusat dan provinsi.
- e) Melakukan uji silang dan uji petik atau investigasi khusus secara langsung terhadap pengaduan atau masalah yang serius/menonjol.
- f) Menghimpun informasi, analisis.
- g) Data/informasi, serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah yang serius/menonjol.
- h) Menyiapkan laporan insidentil dan laporan bulanan penanganan masalah berdasarkan laporan bulanan dari provinsi ataupun lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.

- i) Memantau tindak lanjut penyelesaian masalah dan memfasilitasi upaya/proses hukum kasus penyimpangan dana PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pihak-pihak terkait.

Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan dari perencanaan hingga pelaksanaan selalu dibayangi oleh sejumlah masalah. Beberapa masalah yang terjadi juga berkaitan pula dengan masalah hukum terutama tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi umumnya merupakan tindak pidana penyalahgunaan dana.

Upaya pendamping yang maksimal berhadapan dengan rendahnya komitmen dan kualitas SDM pelaku dan masyarakat pada umumnya. Sungguh merupakan tantangan berat bagi para pendamping terutama dalam hal manage SDM pelaku di tingkat terbawah, implikasinya tentu berujung pada banyaknya celah dan kelemahan dalam segala sisi.

Tercatat sejak awal tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2014 di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara terdapat 8 permasalahan yang masuk matrik masalah nasional, dimana 94 permasalahan telah selesai, dan 4 masih dalam proses. Ada 4 permasalahan di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara yg masih dalam proses penyelesaian. Permasalahan tersebut diakibatkan antara lain sebagai berikut:

- a. Belum dipahaminya mekanisme dan aturan main yang ada oleh pelaku pada tingkat desa disetiap lembaga yang sudah terbentuk.
- b. Peraturan yang dibuat hanya dipahami sebagai kelengkapan administrasi dan belum dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan berorganisasi.
- c. Belum dipahaminya fungsi dan perannya didalam organisasi secara baik dan benar.

- d. Kelembagaan yang terbentuk secara administrasi belum memenuhi syarat sebagaimana organisasi yang memenuhi syarat dalam peraturan.
- e. Hubungan antar organisasi kelembagaan yang belum berjalan dengan baik, mengakibatkan terganggunya system yang berjalan.

Hal-hal tersebut diatas membawa dampak yang serius yang harus segera ditindaklanjuti. Peran pendampingan sangat dibutuhkan untuk menjembatani setiap permasalahan yang ada. Akan tetapi, tidak semuanya yang ditangani diselesaikan secara hukum. Pengalaman menunjukkan bahwa dari proses hukum yang dilakukan selama ini ternyata membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sebanding dengan hasil yang dicapai.

Permasalahan lainnya adalah jumlah dan spesialisasi pendamping tidak sesuai dengan aturan normatifnya. Tidak terpenuhinya kuota sebagaimana diharapkan mengakibatkan dampak yang serius dalam pelaksanaan dilapangan karena harus merubah tahapan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sulitnya mengisi fasilitator karena tidak memenuhi spesifikasi pendidikan, karena mengundurkan diri, tidak mau ditempatkan di perdesaan yang letak geografis yang sulit menjadi alasan para pendamping masyarakat tidak bersedia melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk Kabupaten Bulungan jumlah Pendamping Masyarakat pada program PNPM Masyarakat idealnya 1 (satu) untuk tiap desa karena letak geografisnya yang sulit. Kekurangan tenaga pendamping masyarakat inilah yang mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadual yang telah ditentukan. Persoalan lainnya adalah termasuk kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ini masih kurang. Hal ini disebabkan, pada umumnya masyarakat telah

menyerahkan sepenuhnya kepada para pendamping untuk melaksanakan persoalan pengadministrasian kegiatan sesuai dengan tahapannya. Tingkat ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi mengakibatkan persoalan baru, karena intervensi para pendamping cukup tinggi dalam menentukan prioritas kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan. Hal lainnya yang menjadi permasalahan dan hambatan adalah masih kurangnya profesionalitas pengurus kelembagaan pada PNPM Mandiri Perdesaan, misal UPK, BKAD, dan lembaga lainnya.

3. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN MENGATASI PERMASALAHAN PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN BULUNGAN

Keberadaan pendamping masyarakat pada awalnya lahir karena sebuah kebutuhan masyarakat untuk menghantarkan pelbagai kepentingan dan masalah yang dihadapi masyarakat dari berbagai keterbatasan masyarakat itu sendiri. Hadirnya seorang pendamping masyarakat di harapkan mampu menjembatani hambatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara permasalahan-permasalahan yang terjadi diatasi sesuai dengan koridor. Terkait dengan permasalahan penyimpangan Bantuan Langsung Tunai (BLM) atau Dana Operasional kegiatan (DOK) dapat diselesaikan diluar ketentuan dan diupayakan penanganan di luar jalur hukum (non litigasi). Hal tersebut tidak menyalahi aturan karena memang dalam konsep Program PNPM Mandiri Perdesaan diatur tentang penanganan masalah dengan menggunakan Konsep *Restorative Justice* (pemulihan rasa keadilan).

Konsep *Restorative Justice* (pemulihan rasa keadilan) *Restorative Justice* adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada

pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. Bila melihat definisi yang disampaikan maka jelas bahwa *Restorative Justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum sebagaimana dengan target penanganan masalah yang berlaku di PNPM Mandiri Perdesaan saat ini. Dalam pelaksanaanya, *Restorative Justice* akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan.
- b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait (stake holder).
- c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Bila dibandingkan dengan prinsip-prinsip penanganan masalah yang ada di PNPM Mandiri Perdesaan, terdapat beberapa kesamaan yaitu prinsip partisipatif dan prinsip proporsional. Prinsip-prinsip Dasar Restorative Justice

Pelaksanaan Restorative Justice memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan target penanganan PNPM Mandiri Perdesaan yang menuntut adanya pemulihan baik prosedur maupun dana.
- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, terdapat empat nilai utama, yaitu:

- a. Encounter (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
- b. Amends (perbaikan), dimana sangat diharapkan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
- c. Reintegration (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.
- d. Inclusion (terbuka), dimana memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.

Akan tetapi, tidak semua masalah PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ditangani sesuai dengan Restorative Justice. Upaya hukum secara formal juga dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penanganan masalah di PNPM Mandiri Perdesaan di beberapa lokasi. Proses Restorative Justice dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain. Adapun beberapa mekanisme yang umum diterapkan dalam Restorative Justice adalah sebagai berikut:

- a. victim offender mediation (mediasi antara korban dan pelaku);
- b. conferencing (pertemuan atau diskusi);
- c. circles (bernegosiasi);
- d. victim assistance (pendampingan korban);
- e. ex-offender assistance (pendampingan mantan pelaku);

- f. restitution (ganti rugi);
- g. community service (layanan masyarakat).

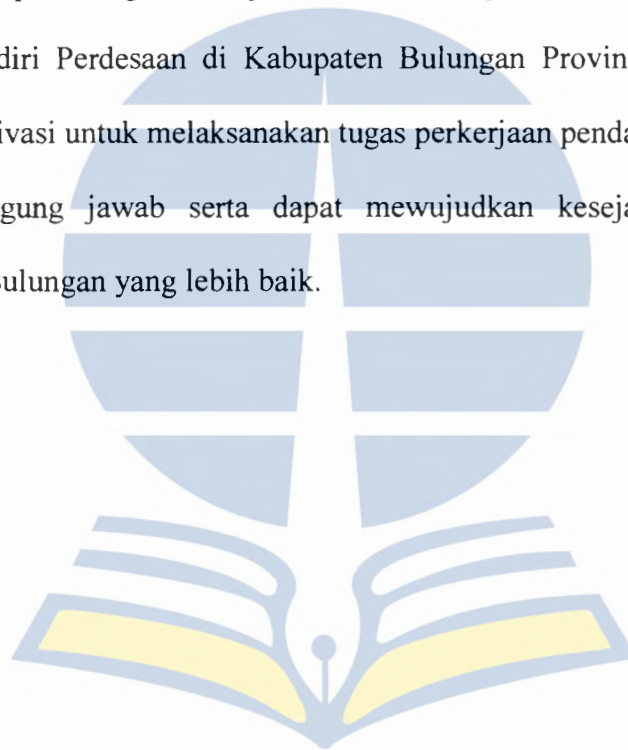
Selain pendampingan korban dan mantan pelaku, semua mekanisme yang ada di Restorative Justice sudah diterapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dimana dengan adanya prinsip DOUM dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang menuntut adanya partisipasi aktif dalam penanganan masalah. Sementara itu mekanisme penanganan masalah yang dilakukan selama ini di PNPM Mandiri Perdesaan juga serupa secara teknis misalnya dengan melakukan pertemuan informal maupun formal guna menangani masalah.

Sedangkan menyangkut permasalahan teknis dilaksanakan berbagai strategi mengatasi permasalahan dan hambatan diantaranya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa sosialisasi ke seluruh stakeholder PNPM Mandiri Perdesaan, Peningkatan Kapasitas pelaku dan bahkan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar dapat berkontribusi meningkatkan perannya tidak saja menggelontorkan dana, tetapi juga melakukan pembinaan berkala yang dapat memotivasi masyarakat juga para pendamping dilapangan diantaranya :

- a) Melaksanakan Lomba UPK Award 2014 tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
- b) Melaksanakan Bimbingan Teknis Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) Se-Provinsi Kalimantan Utara.
- c) Memberikan bantuan sarana kerja bagi UPK Se- Provinsi Kalimantan Utara pada kegiatan PNPM MPd tahun 2014.

- d) Memberikan bantuan sarana kerja bagi 83 orang pendampingan masyarakat dan tenaga administrasi sekretariat PNPM MPd Provinsi Kalimantan Utara.
- e) Mengikutsertakan 18 orang pelaku PNPM MPd se-Kalimantan Utara termasuk pendampingan masyarakat Kabupaten Bulungan pada kegiatan “Gelar Karya” Pemberdayaan Masyarakat Expo dan Award 2014 di Jakarta Convention Center pada tanggal 21 s/d 24 Agustus 2014.

Diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat memotivasi seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dapat termotivasi untuk melaksanakan tugas pekerjaan pendampingan secara baik dan bertanggung jawab serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan yang lebih baik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dimana pemberdayaan masyarakat merupakan syarat utamanya. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam berbagai aspek pembangunan di wilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelestarian. Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan Pendamping Masyarakat atau Fasilitator. Maka dapat disimpulkan peran pendamping pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

1. Pendamping Masyarakat telah mengambil perannya di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, tidak saja melaksanakan tugasnya sebagai Fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat tetapi juga melaksanakan peran-peran teknis, yang mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis, melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber pembiayaan pembangunan.
2. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara berjalan pelaksanaannya dengan adanya pendamping masyarakat. Pendampingan sangat menentukan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku dan kemampuan, serta kesadaran memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat pada 71 desa di Kabupaten Bulungan.

3. Peran pendamping masyarakat sangat strategis terutama dalam proses transfer pengetahuan, memotivasi, mendidik, melatih juga menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul pada perjalanan program. Tingginya ketergantungan masyarakat di Kabupaten Bulungan terhadap keberadaan pendamping masyarakat mengindikasikan bahwa proses pemberdayaan melalui program pendampingan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan serta lebih komprehensif dan menyeluruh serta tidak bersifat insidentil pada kondisi-kondisi tertentu. Untuk meningkatkan performa fasilitator pendamping, hendaknya dilakukan kajian-kajian perlokal wilayah dampingan, karena tiap-tiap wilayah memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda-beda sehingga tidak bisa menggunakan satu acuan mengikuti pedoman yang diterbitkan pemegang program dan kegiatan, juga perlu stimulus dalam memotivasi para pendamping sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pendampingan.

B. Saran

1. Pendamping masyarakat di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara telah menunjukkan dampak perubahan pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat kita lihat semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap program yang digelontorkan pemerintah. Namun demikian, pemberdayaan merupakan suatu “proses” yang membutuhkan waktu, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dalam penelitian ini direkomendasikan sebagai berikut:
 - a) Pendampingan masyarakat sangat dibutuhkan dan dikembangkan secara komprehensif dan mencakup aspek yang lebih luas dan mendasar dalam

melaksanakan suatu program atau kegiatan secara berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah dan kondisi sumber daya manusia di Perdesaan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

- b) Pendamping masyarakat yang ditempatkan ditengah masyarakat harus diperhatikan dari aspek kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas pendamping masyarakat harus mempunyai tingkat pendidikan yang cukup dan dari berbagai disiplin ilmu, menguasai berbagai ketrampilan dan dari kuantitas atau jumlah pendamping masyarakat harus memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Bulungan atau jika memungkinkan jumlah pendamping masyarakat dilakukan sesuai dengan jumlah desa yang ada.
- c) Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pendamping di Kabupaten Bulungan membutuhkan perhatian yang serius. Hal ini penting karena pendamping masyarakat harus tetap berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) yang menghasilkan masyarakat yang mandiri dan mampu berkembang sesuai dengan daya kreatif dan kebijakannya, bukan sebaliknya menjadikan dan menghasilkan masyarakat yang tidak mandiri serta menggantungkan nasibnya pada orang lain termasuk kepada pendamping masyarakat.

2. Permasalahan mendasar pada setiap program dan kegiatan di Kabupaten Bulungan termasuk dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan adalah mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan pada pelaksanaan program yang sulit dipahami oleh masyarakat akibat keterbatasan sumber daya manusia di perdesaan Kabupaten Bulungan, untuk perlu dilakukan antara lain :

- a) Peningkatan Kapasitas pelaku program terutama pengurus-pengurus kelembagaan yang secara formal telah dibentuk dan dilembagakan secara berjenjang dari tingkat desa sampai pada tingkat kecamatan, dengan memperhatikan karakteristik wilayah setempat.
 - b) Perlu penyederhanaan mekanisme atau regulasi program untuk mempermudah pemahaman masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Proses Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bulungan perlu lebih pada penekanan menstimulasi para Pendamping masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai motivator, pendidik dan juga sebagai konsultan sehingga dapat melaksanakan sebagaimana yang disampaikan oleh Lao Tse di tiongkok pada tahun 700 Sebelum Masehi yang menyampaikan : “ Pergilah pada mereka, Tinggallah bersama mereka, Belajarlah dari mereka, Cintai mereka, Mulai dari apa yang mereka tahu, Bangun dengan apa yang mereka punya, dengan pemimpin-pemimpin yang baik, Ketika pekerjaan selesai dan tugas telah dituntaskan masyarakat akan mengatakan “Kita mampu melaksanakan sendiri”.

Kiranya petuah tersebut dapat menjadi tuntunan bagi seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis),(Jakarta: lembaga Penerbit FEUI, 2003), Cet 1.

Ali Hanapiah Muhi, 2011, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Alqaprint.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Anonim, *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*.

Bambang Sutrisno,. dkk, (ed). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam Akses Peran Serta Masyarakat, Lebih Jauh Memahami Community Development*, Jakarta: ICSD, 2003.

Delly Maulana. 2009. Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kondisi Ekonomi Kaum Perempuan Miskin (Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon. *Skripsi. Ilmu Administrasi Negara. Fisipol. UGM*.

Dahl Robert, 1983. *Democracy and its critics*, New Haven Conn : Yale University Press

Edi Suharto, (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS , (2004)
Social Work: An Empowering Profession, Boston: Allyn and Bacon
Ife, Jim (1995)

Ife, Jim (1995), *Community Development: Creating Community Alternatives*, Vision, Analysis and Practice, Longman, Australia (Terjemahan)

Nyoman Oka, 2009, *Perencanaan Pembangunan Desa: Seri Panduan Fasilitator CLAPP (Community Learning And Action Participatory Process)*, MITRA SAMYA dengan dukungan AusAID ACCESS

Lexy J. Moleong (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Pranaka dan Vidhyandika. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment)*. Jakarta: Centre of Strategic and International Studies (CSIS).

Panduan Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Tahun 2014.

Sugiyono. 2010. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

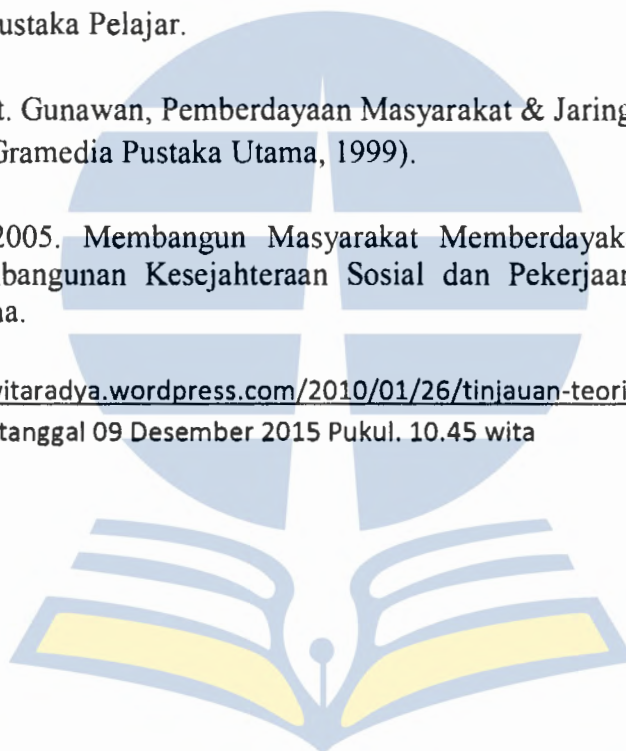
Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunyoto Usman. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumodiningrat. Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat & Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999).

Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.

<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-community-development/> tanggal 09 Desember 2015 Pukul. 10.45 wita



PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :
6. Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan :

1. Apakah menurut pendapat Saudara tenaga pendamping pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan telah melaksanakan tugasnya secara baik dan benar ?
2. Apakah kelembagaan dan kepengurusan pada program PNPM Mandiri Perdesaan dapat berfungsi dengan baik, melaksanakan tugas secara tepat dengan adanya tenaga pendamping di Kabupaten Bulungan ?
3. Menurut pendapat Saudara apakah Intervensi pendamping pada Program PNPM Mandiri Perdesaan mempermudah proses Pemberdayaan Masyarakat ?
4. Menurut Saudara, apakah mekanisme pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan ini terlalu sulit untuk dilaksanakan masyarakat ?
5. Apa yang menyebabkan sebagian kegiatan, misalnya SP dan UEP, Papan Informasi, web Provinsi dan lainnya

(termasuk tindak pidana) dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan ?

6. Menurut pendapat Saudara, apakah proses pendampingan masyarakat masih perlu dilanjutkan dalam program pemberdayaan masyarakat di Perdesaan ?
7. Apa kendala tenaga pendamping di perdesaan yang mengakibatkan sebagian capaian indikator pendampingan tidak tercapai ?
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang proses penyelesaian masalah, penyimpangan dana BLM yang dilakukan oleh tenaga pendamping, apakah peran mereka telah maksimal ?
9. Kabupaten Bulungan termasuk Daerah yang memiliki letak geografis yang sulit bahkan ektrim, menurut pendapat Saudara, apakah tenaga pendamping masyarakat sudah cukup memadai dengan jumlah sebanyak 74 desa lokus PNPM Mandiri Perdesaan sedangkan tenaga pendamping hanya 18 orang ?
10. Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan peran pendamping, termasuk hal-hal yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada khususnya dan program pemberdayaan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Bulungan ?

11. Bagaimana saran Saudara dalam hal pelaksanaan tenaga pendampingan kedepan termasuk distribusi penempatannya ?
12. Menurut Saudara, apakah kebijakan pendampingan masyarakat yang selama ini merupakan kebijakan Pemerintah perlu diadopsi oleh Pemerintah Daerah ?



PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :
6. Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan :

1. Apakah menurut pendapat Saudara tenaga pendamping pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan telah melaksanakan tugasnya secara baik dan benar ?

Jawaban :

“empat orang diantaranya berkelakuan tidak sesuai yang diharapkan, hal ini bertanda buruk jika tidak segera diusul untuk diberhentikan dalam program. Dikhawatirkan mereka bisa menjadi virus bagi rekan-rekannya dikemudian hari terutama bagi masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan yang saat ini bangga untuk membangun desanya menjadi desa yang lebih maju, mandiri dan kuat”.

2. Apakah kelembagaan dan kepengurusan pada program PNPM Mandiri Perdesaan dapat berfungsi dengan baik, melaksanakan tugas secara tepat dengan adanya tenaga pendamping di Kabupaten Bulungan ?

Jawaban :

“ bahwa sejak mereka di SK-kan oleh Bupati Bulungan, maka mereka terpenggil hati nuraninya untuk membangun desa mereka masing-masing. Salah satu upaya untuk mengatasi hambatan dan kesulitan dalam melaksanakan program PNPM Mandiri Perdesaa didesa mereka masing-masing adalah melalui kegiatan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut. BKAD berupaya maksimal mensinergikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan terhadap semua pelaku, termasuk bagaimana untuk mempercepat dan mengeksekusi

kegiatan. Jika dalam proses tersebut juga terkendala, maka kendala tersebut didiskusikan kepada pihak terkait yang lebih berpengalaman termasuk dalam hal ini pendamping masyarakat. Karena pendamping masyarakat merupakan jembatan informasi bagi masyarakat perdesaan di Kabupaten Bulungan. Mereka dapat dikatakan sebagai corong informasi bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan. Dan apabila juga masih belum bisa diputuskan untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, maka BKAD melalui pendampingan masyarakat akan membawa permasalahan tersebut ke tingkat rapat koordinasi, baik tingkat kecamatan, kabupaten hingga ke provinsi termasuk pusat. Selain itu juga, tim koordinasi akan melakukan supervise dan monitoring ke lapangan sebagai umpan balik dari hasil koordinasi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua pihak terlibat langsung dan sangat peduli terhadap pelaksanaan pembangunan di lokus PNPM Mandiri Perdesaan tersebut. Sehingga semua program/kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan dapat berjalan dengan lancar, aman dan tepat waktu sesuai perencanaan yang telah disusun/disepakati”.

3. Menurut pendapat Saudara apakah Intervensi pendamping pada Program PNPM Mandiri Perdesaan mempermudah proses Pemberdayaan Masyarakat ?

Jawaban :

“Untuk menjamin kualitas pembangunan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulungan, hampir seluruh komponen masyarakat mengawasinya, jika tidak sesuai, maka yang terkait langsung menegur pelaksana pembangunan tersebut, bahkan jika tidak diindahkan maka langsung diganti pekerjaanya”.

4. Menurut Saudara, apakah mekanisme pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan ini terlalu sulit untuk dilaksanakan masyarakat ?

Jawaban :

“ada mekanisme yang perlu mendapat perhatian kita semua, terutama mengenai sisten perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya terintegrasi atau terpadu dengan program PNPM Mandiri Perdesaan, misalnya hasil musyawarah desa yang telah menetapkan daftar prioritas pembangunan di desa yang terdantai melalui program dan melalui SKPD tidak jelas, terutama kegiatan dari SKPD di desa yang tidak jelas lokusnya. Hal tersebut membuat SPC tidak semua dapat dilaksanakan oleh masyarakat”.

5. Apa yang menyebabkan sebagian kegiatan, misalnya SP dan UEP, Papan Informasi, web Provinsi dan lainnya (termasuk tindak pidana) dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan ?

Jawaban :

“Hal itu benar pak...kan Kalimantan Utara ini baru terbentuk \pm 6 bln sejak serah terima Satker dari Kaltim, jadi kami masih tahap belajar juga pada waktu itu, namun kami prioritaskan bagaimana PNPM Mandiri Perdesaan itu jalan dulu sebagaimana adanya, para teman-teman dilapangan dapat gaji tiap bulan, BLMnya dapat lancar, persoalan aplikasi nanti dulu, kita memakai manual saja, karena keterbatasan fasilitas kantor, satker juga belum memiliki ruangan representatif, personil masih tidak ada, yang jelas banyaklah hambatan tentang itu, termasuk masalah mutasi yang relative singkat di Satker Bappeda selaku Saktker yang ditunjuk, tadinya bukan saya yang jadi PJOK-nya, ditengah tahun baru kita sama-sama laksanakan dengan tim yang lain. Intinya dapat berjalan meskipun tertatih-tatih. Kita sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman pendamping masyarakat (fasilitator) ini untuk membantu di sekretariat Provinsi bahkan kita tarik dari Kabupaten mereka yang berpengalaman tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini. Jadi, tenaga dan pikiran pendamping masyarakat yang kita miliki tersebut, bersama dengan rekan-rekan konsultan pada Satker PNPM Mandiri Perdesaan Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, dimanfaatkan keberadaannya semaksimal mungkin untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada waktu itu”.

6. Menurut pendapat Saudara, apakah proses pendampingan masyarakat masih perlu dilanjutkan dalam program pemberdayaan masyarakat di Perdesaan ?

Jawaban :

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara berjalan pelaksanaannya dengan adanya pendamping masyarakat. Pendampingan sangat menentukan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku dan kemampuan, serta kesadaran memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat pada 71 desa di Kabupaten Bulungan.

7. Apa kendala tenaga pendamping di perdesaan yang mengakibatkan sebagian capaian indikator pendampingan tidak tercapai ?

Jawaban :

“Di alam demokrasi, terutama di tingkat perdesaan, masing-masing calon kepala desa sangat rentan terhadap janji politiknya sebelum terpilih menjadi kepala desa. Salah satunya adalah memberikan peluang dan kesempatan kepada keluarga atau sahabat terdekat calon kepala desa dan atau konstituennya. Misal, menjadi pengurus BP UPK. Ada indikasi kecenderungan kepala desa untuk memilih pengurus BP UPK rekan-rekan yang bisa diajak kerjasama, namun pengertian kerjasama disalah artikan oleh penerima mandat, walaupun dalam praktiknya, proses pemilihan pengurus BP UPK melalui musyawarah di tingkat desa untuk dimusyawarahkan kembali ke tingkat kecamatan. Sehingga kesalahan dan khilafan untuk mengelola pemerintahan desa ada saja kekurangannya”.

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang proses penyelesaian masalah, penyimpangan dana BLM yang dilakukan oleh tenaga pendamping, apakah peran mereka telah maksimal ?

Jawaban :

“Jadi begini, mengenai kasus korupsi : sudah kita tempuh penanganannya melalui jalur non litigasi, tetapi tidak ada reaksi dari pelaku tersebut. Bila kita biarkan dan tidak ditindaklanjuti maka akibatnya lebih besar, contohnya kecamatan yang bersangkutan masuk dalam kategori kecamatan “bermasalah”, jika masuk dalam kategori kecamatan bermasalah maka BLM untuk kecamatan tersebut tidak dapat dicairkan. Dalam hal ini tidak mungkin gara-gara oknum tersebut semua dikorbankan. Keputusan diambil untuk ditempuh melalui jalur Litigas atau jalur hukum”.

9. Kabupaten Bulungan termasuk Daerah yang memiliki letak geografis yang sulit bahkan ekstrim, menurut pendapat Saudara, apakah tenaga pendamping masyarakat sudah cukup memadai dengan jumlah sebanyak 74 desa lokus PNPM Mandiri Perdesaan sedangkan tenaga pendamping hanya 18 orang ?

Jawaban :

“tenaga pendamping masyarakat kuotanya harus ditambah lagi agar lebih mendekati ideal. Agar bisa mengakomodir satu desa satu pendamping masyarakat terumata desa-desa yang belum mendapatkan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, selama ini hanya mengakomodir di ibukota kecamatan saja, dan sewaktu-waktu baru mereka bekerja di desa-desa. Tidak mungkin aparat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan perangkat desa bisa bersama-sama masyarakat perdesaan bisa memenuhi kebutuhan dasar, tanpa didukung peran tenaga pendamping masyarakat tersebut, bisa dipastikan program ini belum tentu sukses dan bermanfaat, mari segera kita peduli dan ambil bagian dalam kegiatan ini”.

10. Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan peran pendamping, termasuk hal-hal yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada khususnya dan program pemberdayaan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Bulungan ?

Jawaban :

“Kita selama ini menyadari bahwa permasalahan utama dalam pembangunan ini karena terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di perdesaan, oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut kita buatlah program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dipedesaan termasuk dalam program PNPM Mandiri Perdesaan. Anggaran yang cukup kita sediakan untuk program tersebut. Pemerintah selama ini berpikir bahwa sebesar apapun dana yang diluncurkan ke desa tidak akan membawa dampak yang cukup berarti jika kapasitas SDM perdesaan meningkat. Pelatihan-pelatihan yang diberikan termasuk oleh pendamping dan kader di desa sebenarnya untuk merubah pola pikir dan wawasan masyarakat. Memang banyak kendala yang dihadapi termasuk masalah waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan waktunya masyarakat, misalnya kebanyakan masyarakat itu ada bukan hari kerjanya pegawai, adanya masyarakat di kampung pada hari minggu juga merasa terganggu waktu mereka untuk mencari nafkah sehari-hari, inilah tantangan teman pendamping dilapangan”.

11. Bagaimana saran Saudara dalam hal pelaksanaan tenaga pendampingan kedepan termasuk distribusi penempatannya ?

Jawaban :

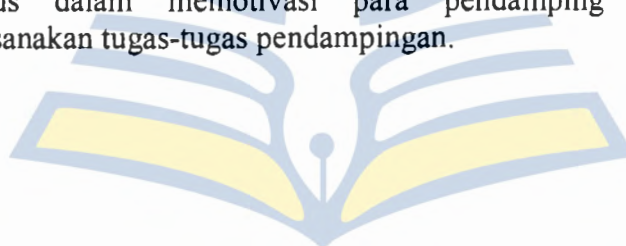
“tenaga pendamping masyarakat kuotanya harus ditambah lagi agar lebih mendekati ideal. Agar bisa mengakomodir satu desa satu pendamping

masyarakat terumata desa-desa yang belum mendapatkan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, selama ini hanya mengakomodir di ibukota kecamatan saja, dan sewaktu-waktu baru mereka bekerja di desa-desa. Tidak mungkin aparaturnya pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan perangkat desa bisa bersama-sama masyarakat perdesaan bisa memenuhi kebutuhan dasar, tanpa didukung peran tenaga pendamping masyarakat tersebut, bisa dipastikan program ini belum tentu sukses dan bermanfaat, mari segera kita peduli dan ambil bagian dalam kegiatan ini”.

12. Menurut Saudara, apakah kebijakan pendampingan masyarakat yang selama ini merupakan kebijakan Pemerintah perlu diadopsi oleh Pemerintah Daerah ?

Jawaban :

Peran pendamping masyarakat sangat strategis terutama dalam proses transfer pengetahuan, memotivasi, mendidik, melatih juga menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul pada perjalanan program. Tingginya ketergantungan masyarakat di Kabupaten Bulungan terhadap keberadaan pendamping masyarakat mengindikasikan bahwa proses pemberdayaan melalui program pendampingan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan serta lebih komprehensif dan menyeluruh serta tidak bersifat insidental pada kondisi-kondisi tertentu. Untuk meningkatkan performa fasilitator pendamping, hendaknya dilakukan kajian-kajian perlokal wilayah pendampingan, karena tiap-tiap wilayah memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda-beda sehingga tidak bisa menggunakan satu acuan mengikuti pedoman yang diterbitkan pemegang program dan kegiatan, juga perlu stimulus dalam memotivasi para pendamping sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pendampingan.



Lampiran Tabel Hal. 80

Nama Lokasi dan Usulan Kegiatan	Jml Usul	Panjang (meter)	Luas m²	Unit	Dana		Pemanfaat		
					BLM	Swadaya	L	P	A
1 Provinsi Kalimantan Utara									
1 Kabupaten Bulungan									
1 Kecamatan Pesu	4				950 000 000	26 000 000			
1 Instalasi Genset	1	0	0	1	290 000 000	9 500 000	420	381	754
2 Instalasi PLTS	1	0	0	0	281 052 600	8 365 000	323	285	598
3 Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group	1	0	126	1	347 368 400	6 635 000	40	41	76
4 Sarana Sekolah/ Pendidikan Lainnya	1	0	0	1	31 579 000	1 500 000	45	35	66
2 Kecamatan Pesu Ilir	8				1 850 000 000	151 824 000			
1 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Beton	1	303	0	0	349 998 500	20 340 500	350	296	646
2 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Telford	1	120	0	0	292 062 700	2 307 600	96	81	177
3 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Sirtu	1	350	0	0	233 575 900	2 307 600	157	129	286
4 Instalasi PLTS	1	0	0	0	234 951 700	231 000	274	266	540
5 Pembuatan Taman Bermain	1	0	0	1	72 780 000	3 569 000	36	23	59
6 Pembuatan Perpustakaan	1	0	96	1	249 650 300	4 101 900	257	129	386
7 Perbaikan Perpipaan	1	1800	0	0	349 950 200	118 966 400	822	805	1627
8 Peningkatan Kapasitas Kelompok	1	0	0	1	67 030 700	0	39	50	89
3 Kecamatan Tanjung Palas Barat	4				850 000 000	11 934 100			
1 Pembuatan Saluran Drainase	1	420	0	0	187 733 000	1 540 000	381	320	538
2 Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group	1	0	110	1	238 051 000	1 780 000	172	199	273
3 Pembuatan WC/ MCK/ Toilet di Sekolah	1	0	27	1	104 174 600	0	476	679	431
4 Pembuatan Gedung Posyandu	1	0	96	1	320 041 400	8 614 100	717	653	1204
4 Kecamatan Tanjung Palas	7				950 000 000	13 560 000			
1 Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Sirtu	1	234	0	0	173 394 700	3 350 000	984	1006	1145
2 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Beton	1	266	0	0	184 914 300	1 040 000	263	261	474
3 Pembuatan Tambatan Tepi Sungai	1	15	0	0	143 984 200	2 450 000	809	760	1033
4 Pembuatan Saluran Drainase	1	200	0	0	91 268 800	3 650 000	249	218	415
5 Pembuatan Gedung SD/ Ibtidaryah	1	0	162	2	324 859 000	3 070 000	253	292	491
6 Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	2	0	0	2	31 579 000	0	0	58	54
5 Kecamatan Tanjung Selor	9				900 000 000	10 675 000			
1 Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Telford	1	164	0	0	300 373 600	5 240 000	86	125	134
2 Pembuatan Saluran Drainase	1	409	0	0	297 710 500	4 640 000	349	392	354
3 Perlengkapan Tempat Kesehatan	1	0	0	1	24 383 000	0	115	88	54
4 PMT Lainnya	2	0	0	180	85 797 300	0	281	358	208
5 Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	2	0	0	2	64 210 500	0	0	14	14
6 Peningkatan Kapasitas Kelompok	2	0	0	2	127 525 100	795 000	9	24	21
6 Kecamatan Tanjung Palas Timur	8				950 000 000	3 050 000			
1 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Sirtu	1	220	0	0	249 373 200	0	120	125	40
2 Perbaikan Gedung SD/ Ibtidaryah	1	0	48	1	162 728 100	0	138	118	215

Nama Lokasi dan Usulan Kegiatan	Jml Usul	Panjang (meter)	Luas m ²	Unit	Dana		Pemanfaat		
					BLM	Swadaya	L	P	A
1 Provinsi Kalimantan Utara									
1 Kabupaten Bulungan	22				4 500 000 000	20 672 300			
1 Pembuatan Jalan Dusun dengan Beton	1	600	0	0	315 789 000	6 240 000	250	195	410
2 Pembuatan Jalan Desa dengan Telford	1	525	0	0	394 737 000	0	1149	1037	1391
3 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Beton	1	800	0	0	442 105 000	0	0	0	0
4 Pembuatan Tambatan Dermaga Sungai	1	12	0	0	301 053 000	0	343	290	218
5 Pembuatan Saluran Drainase	2	1207	0	0	856 428 000	2 595 000	1200	968	101
6 Pembuatan Tembok Penahan Tanah	1	90	0	0	265 263 000	0	1254	1126	1494
7 Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group	1	0	128	1	387 392 000	0	364	306	22
8 Pembuatan Prasarana Pendidikan	1	37	0	1	65 158 000	2 977 300	70	40	38
9 Mebel Sekolah	1	0	0	46	103 305 000	0	251	231	362
10 Sarana Sekolah/ Pendidikan Lainnya	1	0	0	1	56 724 000	0	302	248	420
11 Pembuatan Gedung Polindes/Poskesdes	1	0	96	1	263 544 000	0	2645	2320	605
12 Pembuatan Gedung Posyandu	1	0	72	1	208 242 000	3 490 000	8	15	11
13 Sarana dan Perlengkapan Lainnya	1	0	0	1	67 895 000	0	540	529	479
14 PMT Bulanan Balita dan Ibu Hamil/ Menyusui	3	0	0	214	159 306 000	0	253	220	437
15 Peningkatan Kapasitas Kelompok	5	0	0	5	613 059 000	5 370 000	82	100	110

Nama Lokasi dan Usulan Kegiatan	Jml Usul	Panjang (meter)	Luas m ²	Unit	Dana		Pemanfaat		
					BLM	Swadaya	L	P	A
1 Provinsi Kalimantan Utara									
1 Kabupaten Bulungan									
1 Kecamatan Pesio	3				683 145 000	9 730 000			
1 Pembuatan Jalan Dusun dengan Beton	1	600	0	0	315 789 000	6 240 000	250	195	410
2 Pembuatan Gedung Posyandu	1	0	72	1	208 242 000	3 490 000	8	15	11
3 Peningkatan Kapasitas Kelompok	1	0	0	1	159 114 000	0	20	0	20
2 Kecamatan Pesio Ilir	3				247 788 000	2 977 300			
1 Pembuatan Prasarana Pendidikan	1	37	0	1	65 158 000	2 977 300	70	40	38
2 PMT Bulanan Balita dan Ibu Hamil/ Menyusui	1	0	0	29	23 516 000	0	14	15	29
3 Peningkatan Kapasitas Kelompok	1	0	0	1	159 114 000	0	42	8	39
3 Kecamatan Tanjung Palas Barat	1				301 053 000	0			
1 Pembuatan Tambatan Dermaga Sungai	1	12	0	0	301 053 000	0	343	290	218
4 Kecamatan Tanjung Palas	1				406 316 000	2 595 000			
1 Pembuatan Saluran Drainase	1	550	0	0	406 316 000	2 595 000	671	523	52
5 Kecamatan Tanjung Seior	3				1 101 048 000	0			
1 Pembuatan Saluran Drainase	1	657	0	0	450 119 000	0	529	445	49
2 Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group	1	0	128	1	387 392 000	0	364	306	22
3 Pembuatan Gedung Polindes/Poskesdes	1	0	96	1	263 544 000	0	2645	2320	605
6 Kecamatan Tanjung Palas Timur	3				603 842 000	0			
1 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Beton	1	800	0	0	442 105 000	0	0	0	0
2 Sarana dan Perlengkapan Lainnya	1	0	0	1	67 895 000	0	540	529	479
3 Peningkatan Kapasitas Kelompok	1	0	0	1	93 842 000	0	9	33	21
7 Kecamatan Tanjung Palas Tengah	2				200 989 000	5 370 000			
1 Peningkatan Kapasitas Kelompok	2	0	0	2	200 989 000	5 370 000	11	59	30
8 Kecamatan Tanjung Palas Utara	2				650 000 000	0			
1 Pembuatan Jalan Desa dengan Telford	1	525	0	0	394 737 000	0	1149	1037	1391
2 Pembuatan Tembok Penahan Tanah	1	90	0	0	265 263 000	0	1254	1126	1494
9 Kecamatan Bunyu	4				295 819 000	0			
1 Mebel Sekolah	1	0	0	46	103 305 000	0	251	231	362
2 Sarana Sekolah/ Pendidikan Lainnya	1	0	0	1	56 724 000	0	302	248	420
3 PMT Bulanan Balita dan Ibu Hamil/ Menyusui	2	0	0	185	135 790 000	0	239	205	408

Nama Lokasi dan Usulan Kegiatan	Jml Usul	Panjang (meter)	Luas m ²	Unit	Dana		Pemanfaat		
					BLM	Swadaya	L	P	A
3 Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group	1	0	45	1	196 214 400	0	124	131	129
4 Pembuatan Gedung Posyandu	1	0	80	1	200 684 800	3 050 000	139	339	411
5 Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	4	0	0	4	140 999 500	0	0	122	116
7 Kecamatan Tanjung Palas Tengah	7				1 850 000 000	218 730 875			
1 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Beton	1	135	0	0	201 287 800	1 755 000	556	409	784
2 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Telford	1	507	0	0	348 024 100	6 115 000	1124	974	1286
3 Pembukaan Lahan atau Penimbunan Jalan	1	3000	0	0	347 331 000	3 700 000	712	636	1024
4 Pembuatan Pasar Umum berbentuk Los/ Lapa	1	0	250	1	349 715 900	25 000 000	1420	1349	1656
5 Pembuatan Saluran Drainase	1	70	0	0	180 222 000	2 092 500	556	409	812
6 Instalasi Genset	1	0	0	1	349 740 200	180 068 375	907	719	1000
7 Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	1	0	0	5	73 679 000	0	0	99	99
8 Kecamatan Tanjung Palas Utara	5				700 000 000	43 284 200			
1 Pembuatan Gedung Taman Kanak-kanak	1	0	192	1	346 699 200	41 864 200	24	29	25
2 Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group	1	0	60	1	211 195 800	1 420 000	23	24	33
3 Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	3	0	0	3	142 105 000	0	0	49	41
9 Kecamatan Sekatak	7				1 050 000 000	16 810 000			
1 Perbaikan Jembatan Kayu untuk Roda 4	1	18	0	1	121 148 500	1 670 000	391	316	561
2 Pembuatan Saluran Drainase	2	665	0	0	344 181 000	4 925 000	708	533	1033
3 Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group	1	0	96	1	247 713 700	4 750 000	70	54	104
4 Pembuatan Prasarana Pendidikan	1	8	104	1	231 706 300	3 265 000	324	307	494
5 Peningkatan Kapasitas Kelompok	2	0	0	2	105 250 500	2 200 000	156	133	258

Nama Lokasi dan Usulan Kegiatan	Jml Usul	Panjang (meter)	Luas m ²	Unit	Dana		Pemanfaat		
					BLM	Swadaya	L	P	A
1 Provinsi Kalimantan Utara									
1 Kabupaten Bulungan									
1 Kecamatan Pesio	3				683 145 000	9 730 000			
1 Pembuatan Jalan Dusun dengan Beton	1	600	0	0	315 789 000	6 240 000	250	195	410
2 Pembuatan Gedung Posyandu	1	0	72	1	208 242 000	3 490 000	8	15	11
3 Peningkatan Kapasitas Kelompok	1	0	0	1	159 114 000	0	20	0	20
2 Kecamatan Pesio Ilir	3				247 788 000	2 977 300			
1 Pembuatan Prasarana Pendidikan	1	37	0	1	65 158 000	2 977 300	70	40	38
2 PMT Bulanan Balita dan Ibu Hamil Menyusui	1	0	0	29	23 516 000	0	14	15	29
3 Peningkatan Kapasitas Kelompok	1	0	0	1	159 114 000	0	42	8	39
3 Kecamatan Tanjung Palas Barat	1				301 053 000	0			
1 Pembuatan Tambatan Dermaga Sungai	1	12	0	0	301 053 000	0	343	290	218
4 Kecamatan Tanjung Palas	1				406 316 000	2 595 000			
1 Pembuatan Saluran Drainase	1	550	0	0	406 316 000	2 595 000	671	523	52
5 Kecamatan Tanjung Selor	3				1 101 048 000	0			
1 Pembuatan Saluran Drainase	1	657	0	0	450 112 000	0	529	445	49
2 Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group	1	0	128	1	387 392 000	0	364	306	22
3 Pembuatan Gedung Polindes/Poskesdes	1	0	96	1	263 544 000	0	2645	2320	605
6 Kecamatan Tanjung Palas Timur	3				603 842 000	0			
1 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Beton	1	800	0	0	442 105 000	0	0	0	0
2 Sarana dan Peralengkapan Lainnya	1	0	0	1	67 895 000	0	540	529	479
3 Peningkatan Kapasitas Kelompok	1	0	0	1	93 842 000	0	9	33	21
7 Kecamatan Tanjung Palas Tengah	2				200 989 000	5 370 000			
1 Peningkatan Kapasitas Kelompok	2	0	0	2	200 989 000	5 370 000	11	59	30
8 Kecamatan Tanjung Palas Utara	2				660 000 000	0			
1 Pembuatan Jalan Desa dengan Telford	1	525	0	0	394 737 000	0	1149	1037	1391
2 Pembuatan Tembok Penahan Tanah	1	90	0	0	265 263 000	0	1254	1126	1494
9 Kecamatan Bunyu	4				295 819 000	0			
1 Mebel Sekolah	1	0	0	46	103 305 000	0	251	231	362
2 Sarana Sekolah/ Pendidikan Lainnya	1	0	0	1	56 724 000	0	302	248	420
3 PMT Bulanan Balita dan Ibu Hamil Menyusui	2	0	0	185	135 790 000	0	239	205	408

Nama Lokasi dan Usulan Kegiatan	Jml Usul	Panjang (meter)	Luas m ²	Unik	Dana		Pemanfaat		
					BLM	Swadaya	L	P	A
3 Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group	1	0	45	1	196 214 400	0	124	131	129
4 Pembuatan Gedung Posyandu	1	0	80	1	200 684 800	3 050 000	139	339	411
5 Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	4	0	0	4	140 999 500	0	0	122	116
7 Kecamatan Tanjung Palas Tengah	7				1 850 000 000	218 730 875			
1 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Beton	1	135	0	0	201 287 800	1 755 000	556	409	784
2 Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Telford	1	507	0	0	348 024 100	6 115 000	1124	974	1286
3 Pembukaan Lahan atau Penimbunan Jalan	1	3000	0	0	347 331 000	3 700 000	712	636	1024
4 Pembuatan Pasar Umum berbentuk Los/ Lapa	1	0	250	1	349 715 900	25 000 000	1420	1349	1656
5 Pembuatan Saluran Drainase	1	70	0	0	180 222 000	2 092 500	556	409	812
6 Instalasi Genset	1	0	0	1	349 740 200	180 068 375	907	719	1000
7 Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	1	0	0	5	73 679 000	0	0	99	99
8 Kecamatan Tanjung Palas Utara	5				700 000 000	43 284 200			
1 Pembuatan Gedung Taman Kanak-kanak	1	0	192	1	346 699 200	41 864 200	24	29	25
2 Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group	1	0	60	1	211 195 800	1 420 000	23	24	33
3 Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	3	0	0	3	142 105 000	0	0	49	41
9 Kecamatan Sekatak	7				1 050 000 000	16 810 000			
1 Perbaikan Jembatan Kayu untuk Roda 4	1	18	0	1	121 148 500	1 670 000	391	316	561
2 Pembuatan Saluran Drainase	2	665	0	0	344 181 000	4 925 000	708	533	1033
3 Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group	1	0	96	1	247 713 700	4 750 000	70	54	104
4 Pembuatan Prasarana Pendidikan	1	8	104	1	231 706 300	3 265 000	324	307	494
5 Peningkatan Kapasitas Kelompok	2	0	0	2	105 250 500	2 200 000	156	133	258

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Lampiran Tabel Hal. 81

Kecamatan	% Pencairan BLM (Rp)				% Penyaluran BLM ke TPK
	APBD	TTL APBD	APBN	Total BLM	
Jumlah	100%	100%	100%	100%	68.12%
Peso	100%	100%	100%	100%	73.96%
Peso Ilir	100%	100%	100%	100%	58.27%
Tanjung Palas	100%	100%	100%	100%	89.17%
Tanjung Palas Barat	100%	100%	100%	100%	17.65%
Tanjung Palas Utara	100%	100%	100%	100%	87.30%
Tanjung Palas Timur	100%	100%	100%	100%	48.98%
Tanjung Selor	100%	100%	100%	100%	67.13%
Tanjung Palas Tengah	100%	100%	100%	100%	72.32%
Sekatak	100%	100%	100%	100%	100.00%



Foto 1. Calon Pendamping Masyarakat mengikuti ujian Pendamping Masyarakat pada PNPM MPd Provinsi Kaltara di Tanjung Selor



Foto 2. Pendamping Masyarakat mengikuti test tertulis PNPM MPd Provinsi Kaltara di Tanjung Selor. 2014.



Foto 3. Tim Penilai mewawancarai calon pendamping masyarakat pada PNPM MPd Provinsi Kaltara di Tanjung Selor



Foto 4.

Musyawarah Desa II

Lokasi Foto :

Desa Mara Hilir
Tanjung Palas Barat

Tanggal Foto:

24-25 September 2014



Foto 5.

**Fasilitasi Musyawarah
Antar Desa Penetapan
pendanaan spp perguliran
dan fasilitasi**

Lokasi Foto :

Kec. Tanjung Palas Utara

Tanggal Foto:

11 September 2014



Foto 6. Fasilitasi Musyawarah Antar Desa di Kecamatan Peso Hilir



Foto 7. Memfasilitasi Hasil Monev Pelaksanaan PNPM MPd di Kecamatan Tanjung Palas.



Foto 8. Kepala Bappeda Prov. Kaltara (Ir.Fredrick Ellia Gugkang, MA) dan KPA PNPM MPd 2014 (Drs. Timbul Sibarani) membuka Bimtek bagi

Pelaku PNPM MPd se-Kabupaten Bulungan dan se-Kabupaten Tana Tidung di Tanjung Selor



Foto 9. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir.H. Syaiful Herman, M.AP memberikan arahan dan sekaligus membuka Rakor PNPM MPd ke IV di Tanjung Selor.



Foto 10. Pendamping Masyarakat Melaksanakan Rakor PNPM MPd Provinsi Kaltara di Tanjung Selor



Foto. 11. Pendamping Masyarakat Melaksanakan Pelatihan Penyegaran PNPM MPd Kaltara di Tanjung Selor



Foto 12. Pendamping Masyarakat melaksanakan Outbond pada Pelatihan Penyegaran PNPM MPd Provinsi Kaltara di Tanjung Selor.



Foto 13.

Kunjungan Bupati dalam kegiatan PNPM-MPd TA 2009-2013

Lokasai Foto :

Kecamatan Peso Hilir

Tanggal Foto:

25 September 2014

